

**GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
SEBAGAI UPAYA MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
*PARTNERSHIP***

**(STUDI PELAKSANAAN *PARTNERSHIP* DI DESA PRINGKUKU,
KECAMATAN PRINGKUKU, KABUPATEN PACITAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Disusun Oleh:

IKA SULISTYAWATI

0810310068



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2012**

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Baqarah: 153)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari segala urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(Q.S. 94 Alam Nasyroh Ayat 6-8)

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Q.S. 13 Ar Ra'du Ayat 11)

Dimana ada kemauan pasti disitu ada jalan.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI UPAYA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *PARTNERSHIP* (Studi Pelaksanaan *Partnership* di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan)**

Disusun oleh : Ika Sulistyawati

NIM : 0810310068

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 2 April 2012

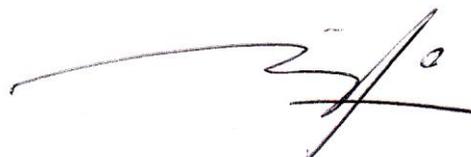
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Hermawan, Dr. S.IP. M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001



Mochamad Rozikin, Drs,MAP
NIP. 19630503 198802 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 April 2012

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Ika Sulistyawati

Judul : **GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) SEBAGAI UPAYA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PARTNERSHIP (Studi Pelaksanaan *Partnership* di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan)**

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



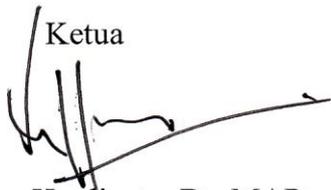
Hermawan, Dr. SIP. M.Si
NIP. 19720405 200312 1 001

Anggota



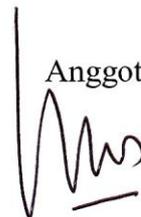
Mochamad Rozikin, Drs, MAP
NIP. 19630503 198802 1 001

Ketua



Imam Hardjanto, Dr. MAP
NIP. 19460619 197412 1 001

Anggota



Irwan Noor, Dr. MA
NIP. 19611024 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 2 April 2012



Nama : Ika Sulistyawati

NIM : 0810310068

RINGKASAN

Ika Sulistyawati, 2012, **Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Upaya Memberdayakan Masyarakat dalam Perspektif *Partnership* (Studi Pelaksanaan *Partnership* di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan)**, Hermawan, Dr. S.IP.M.Si dan Mochamad Rozikin, Drs, MAP, 187 hal + xix

Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Namun setelah diterapkan program PUAP, Gapoktan Rejo Mulyo Desa Pringkuku belum mampu memberdayakan petani. Unilever menawarkan untuk bermitra, menjamin pemasaran, kepastian harga, dan memberikan bimbingan kepada petani. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan, Pemerintah Desa Pringkuku dan masyarakat petani Desa Pringkuku menyetujui tawaran tersebut, mengingat sulitnya pemasaran produk pertanian di Desa Pringkuku serta melihat kondisi petani yang masih kurang berdaya dari segi sosial maupun ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis: peran *stakeholder* dalam memberdayakan masyarakat Desa Pringkuku; pelaksanaan kemitraan *stakeholder* dalam Program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam) di Desa Pringkuku, serta dampak kemitraan P3KH (Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan Kedelai Hitam) yang dilaksanakan *stakeholder* bagi pemberdayaan masyarakat Desa Pringkuku dalam perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang terkait dengan penelitian ini adalah penyuluh pertanian dinas tanaman pangan dan peternakan, pengurus gapoktan, project manager yayasan unilever, asisten lapang unilever, pengurus gapoktan Rejo Mulyo, Kepala Desa Pringkuku, dan masyarakat Desa Pringkuku. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang terdiri dari proses memahami, sintesis, teoritis, dan terakhir recontextualisasi.

Hasil penelitian menunjukkan, dengan adanya kemitraan gapoktan dan Unilever, dari segi sosial petani bisa berdaya karena SDM petani menjadi lebih baik. Dari sisi kelembagaan Gapoktan bisa menjadi lembaga yang dinamis. Dari segi ekonomi dalam skala kecil pendapatan petani bertambah, namun belum bisa dikatakan berdaya karena hasil yang diperoleh tersebut untuk membeli komoditi kecil (kebutuhan sehari-hari) saja belum mencukupi. Sebagai bentuk kepedulian Unilever kepada petani, akan lebih efektif bila evaluasi ditindak lanjuti dengan meninjau biaya produksi petani dibanding hasil yang di dapatkan dan juga ditinjau

lagi bagaimana SDM petani setelah dibimbing dan dibina. Jika petani gagal, hendaknya dibimbing lagi dengan lebih baik karena memberdayakan masyarakat itu memerlukan proses yang lama dan berkelanjutan, yang terdiri dari proses penyadaran, pembiasaan, pemanfaatan, dan penggunaan atau pemahaman. Unilever hendaknya menyediakan tenaga ahli yang lebih professional, yang lebih memahami kondisi tanah dan masyarakat Desa Pringkuku, dan masalah-masalah yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga bisa mengantisipasi masalah yang sama, serta memperbaiki pelaksanaan kemitraan di waktu yang akan datang agar hasilnya lebih baik lagi.



SUMMARY

Ika Sulistyawati, 2012. **Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) as An Effort in The Community Empowerment Based on *Partnership* Perspective (A Study of *Partnership* at Pringkuku Village, Pringkuku Subdistrict, Pacitan District)**. Advisors: Dr. S.IP, M.Si and Mochamad Rozikin, Drs, MAP. 187 pages + xix.

Key word: *partnership, empowerment.*

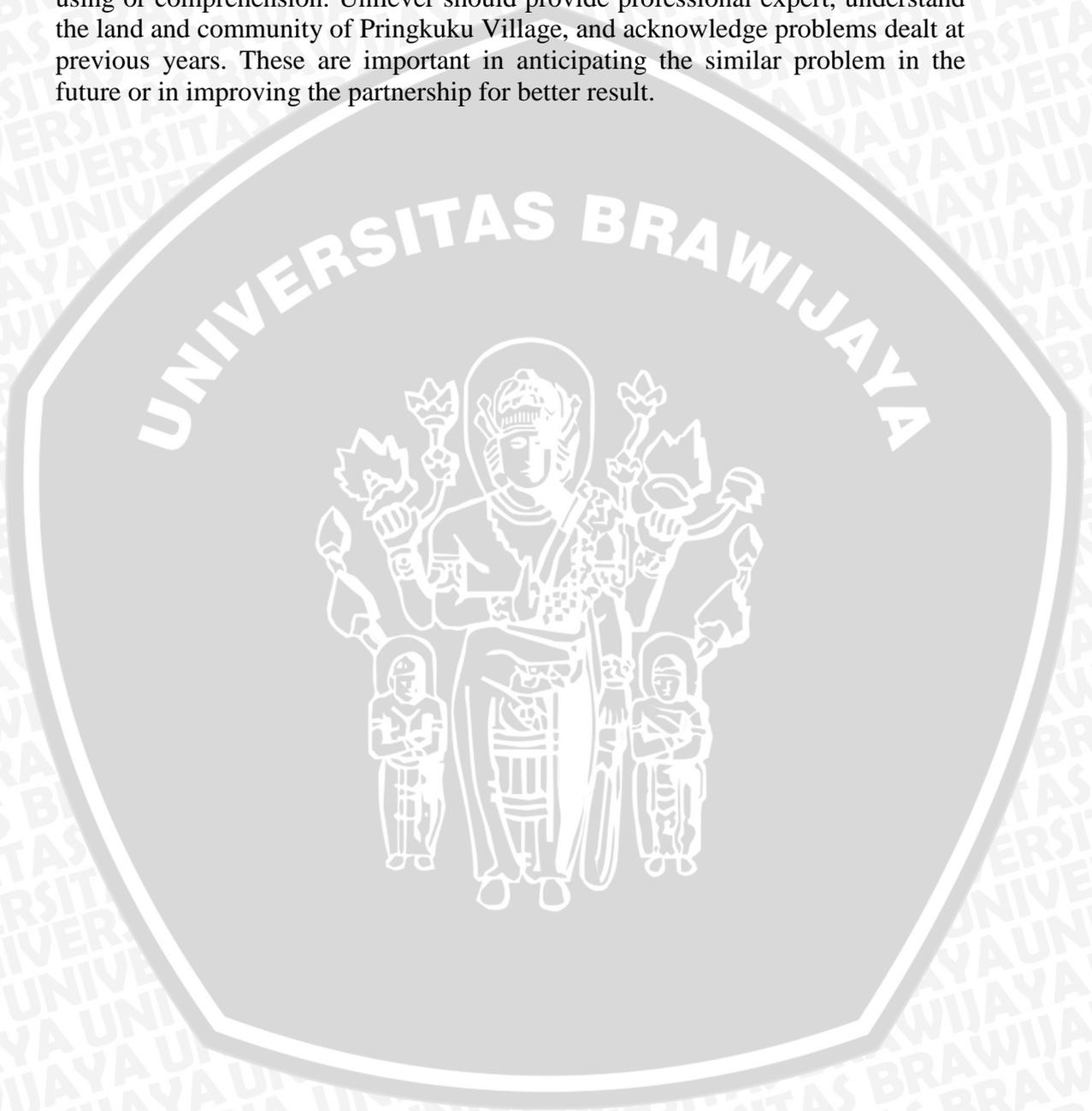
Gapoktan is a farmer organization designed to implement PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) to distribute the business capital for the member. However, after the applicable PUAP, Gapoktan Rejo Mulyo Pringkuku Village, has not able to empower farmers.. Unilever once offers the partnership, the marketing warranty, the price certainty, and the counseling for the farmer. The Office of Crop Food and Livestock at Pacitan District, the government of Pringkuku Village, and the farmer community at Pringkuku Village, agree with the offers. This consent is given recalling the difficulty of marketing for the agriculture product at Pringkuku Village and seeing the powerlessness the farmer in social and economical terms.

The objective of research is to describe and to analyze the role of *stakeholder* in empowering the community of Pringkuku Village, the implementation of *stakeholder* partnership in the Program P3KH (Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan Kedelai Hitam) at Pringkuku Village, and the impact of partnership for P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam) conducted by stakeholders on the empowerment of the community at Pringkuku Village, in term of their social and economical changes.

Research uses descriptive method using qualitative approach. The informant involved within research is the agriculture counselor in the behalf of The Office of Crop Food and Livestock at Pacitan District, the management of Gapoktan Rejo Mulyo, the project manager of Unilever Foundation, the field assistant of Unilever, the chief of Pringkuku Village, and the community of Pringkuku Village. Data collection methods include interview, observation and documentation. Data analysis involves some processes such as understanding, synthesizing, theorizing, and finally, recontextualizing.

Result of research indicates that the partnership of Gapoktan and Unilever, in the social term, allows the farmers to be empowered because the farmers will have better source. Related to its organization term, Gapoktan is a dynamic organization. In the small-scale economical aspect, the farmers' income is increased but it is not empowering enough because the result is still less possible to buy the small commodity (the daily demand). As form of Unilever's caring action to the farmers, the company finds more effectiveness to follow-up the evaluation with the review of farmers' production cost by comparing the cost

against the result obtained, or with the review of how is the farmers' human resource after counseling and fostering programs. If farmers should be failed, counseling may be repeated because the empowerment of community will need a long sustainable process, consist of awareness process, refraction, utilization, and using or comprehension. Unilever should provide professional expert, understand the land and community of Pringkuku Village, and acknowledge problems dealt at previous years. These are important in anticipating the similar problem in the future or in improving the partnership for better result.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Upaya Memberdayakan Masyarakat dalam Perspektif *Partnership*” (Studi Pelaksanaan *Partnership* di Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan).

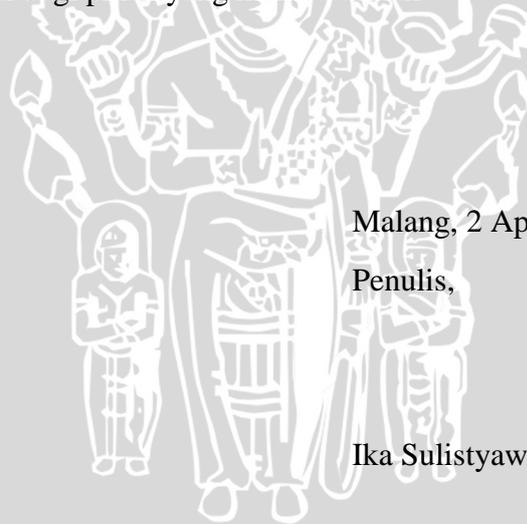
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan dalam segala hal.
2. Bapak Prof. Dr. Sumartono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Hermawan, Dr. S.IP, M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Mochamad Rozikin, Drs, MAP, selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik, yang telah membina, membimbing, memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan mental kepribadian selama 3,5 tahun.
6. Penyuluh Pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
7. Project Manager Yayasan Unilever beserta Asisten Lapang Unilever dan seluruh pendamping program kemitraan, yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian.

8. Pengurus Gapoktan Rejo Mulyo Desa Pringkuku yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Bapak Kepala Desa Pringkuku, beserta aparaturnya yang telah membantu dalam proses penelitian di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan.
10. Rekan-rekan angkatan 2008 fakultas Ilmu Administrasi Publik, yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan penulis sehingga skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, 2 April 2012

Penulis,

Ika Sulistyawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	12
1. Kontribusi Praktis	12
2. Kontribusi Akademis	13
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Governance	16



1. Konsep <i>Good Governance</i>	17
2. Prinsip <i>Good Governance</i>	18
3. Unsur-unsur <i>Governance</i>	20
B. Kemiskinan	21
1. Konsep Kemiskinan.....	21
2. Masalah Kemiskinan.....	24
3. Penanggulangan Kemiskinan.....	25
4. Indikator Kemiskinan.....	27
C. Pemberdayaan Masyarakat	28
1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	28
2. Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	32
3. Siklus dan Proses Pemberdayaan Masyarakat	34
4. Lingkup Pemberdayaan Masyarakat.....	36
5. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat.....	37
6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat.....	38
D. <i>Partnership</i> (Kemitraan).....	39
1. Pengertian <i>Partnership</i> (Kemitraan).....	39
2. Pola Kemitraan.....	41
3. Model Kemitraan	47
4. Manfaat Kemitraan	49
5. Gapoktan dalam Perspektif <i>Partnership</i>	50
F. Kerangka Pemikiran.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Fokus Penelitian.....	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian	58
1. Lokasi Penelitian.....	58
2. Situs Penelitian.....	59
D. Sumber Data.....	60

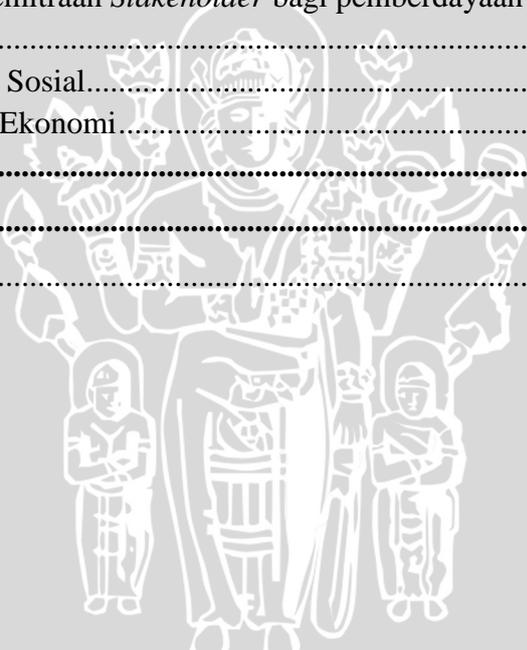


E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Instrumen Penelitian.....	63
G. Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan.....	68
2. Gambaran Umum Desa Pringkuku	73
a. Keadaan Geografis	71
b. Kondisi Demografi.....	76
c. Sarana dan Prasarana.....	77
d. Kondisi Sosial Ekonomi.....	79
e. Potensi Desa Pringkuku.....	83
f. Organisasi Perangkat Desa Pringkuku.....	84
3. Gambaran Umum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).....	87
a. Tolok Ukur Kapasitas dan Aspek Kelembagaan	87
b. Klasifikasi Gapoktan PUAP.....	90
c. Profil Gapoktan Rejo Mulyo.....	93
1. Legitimasi Gapoktan	93
2. Keanggotaan dan Wilayah Kerja.....	94
3. Kegiatan.....	95
4. Capaian.....	99
5. Prestasi.....	100
B. Penyajian Data	101
1. Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Desa Pringkuku	101
a. Peran Pemerintah (Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan)	102
b. Peran Swasta (Unilever).....	105
c. Peran Masyarakat (Petani Desa Pringkuku).....	112
2. Proses Kemitraan <i>stakeholder</i> dalam memberdayakan masyarakat di Desa Pringkuku	115
a. Persiapan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan dan Gapoktan Rejo Mulyo.....	116
b. Pelaksanaan Kemitraan Gapoktan Rejo Mulyo dengan Unilever	123
3. Dampak Kemitraan <i>Stakeholder</i> bagi pemberdayaan masyarakat Desa Pringkuku	142
a. Dampak Sosial.....	142
b. Dampak Ekonomi.....	146

C. Analisis dan Interpretasi	148
1. Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pemberdayaan Masyarakat di Desa Pringkuku	149
a. Peran Pemerintah (Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan)	149
b. Peran Swasta (Unilever)	157
c. Peran Masyarakat (Petani Desa Pringkuku)	160
2. Proses Kemitraan <i>stakeholder</i> dalam memberdayakan masyarakat di Desa Pringkuku	163
a. Persiapan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan dan Gapoktan Rejo Mulyo	164
b. Pelaksanaan Kemitraan Gapoktan Rejo Mulyo dengan Unilever	168
3. Dampak Kemitraan <i>Stakeholder</i> bagi pemberdayaan masyarakat Desa Pringkuku	176
1. Dampak Sosial	177
2. Dampak Ekonomi	179
BAB V PENUTUP	183
A. Kesimpulan	183
B. Saran	185

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Tingkat Kesejahteraan Penduduk	7
2	Kualitas Angkatan Kerja	8
3	Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat	32
4	Komposisi Penggunaan Lahan	75
5	Komposisi Usia Penduduk	77
6	Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk	78
7	Jumlah Pemeluk Agama Desa Pringkuku	79
8	Tingkat Kesejahteraan Penduduk	80
9	Komposisi Penduduk Usia Kerja	81
10	Kualitas Angkatan Kerja	82
11	Komposisi Pekerjaan Penduduk	82
12	Potensi Sumber Daya Alam	84
13	Susunan Aparat Pemerintah Desa Pringkuku	86
14	Daftar Pengurus Gapoktan Rejo Mulyo	122
15	Daftar CPCL Gapoktan Rejo Mulyo	131
16	Realisasi Tanam P3KH Tahun 2010	132
17	Laporan produksi P3KH Marengan tahun 2010	134
18	Laporan Pendapatan Gapoktan Rejo Mulyo 2010	135
19	Laporan Penggunaan Dana Gapoktan RejoMulyo 2010	135
20	Laporan Pendapatan Bersih Gapoktan Rejo Mulyo 2010	136
21	Daftar Gabungan Kelompok Sortasi Desa Pringkuku	138
22	Daftar perkembangan Dana Stimulan Gabungan Kelompok Sortasi Desa Pringkuku	141
23	Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat	152
24	Peran Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat	158
25	Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan	161

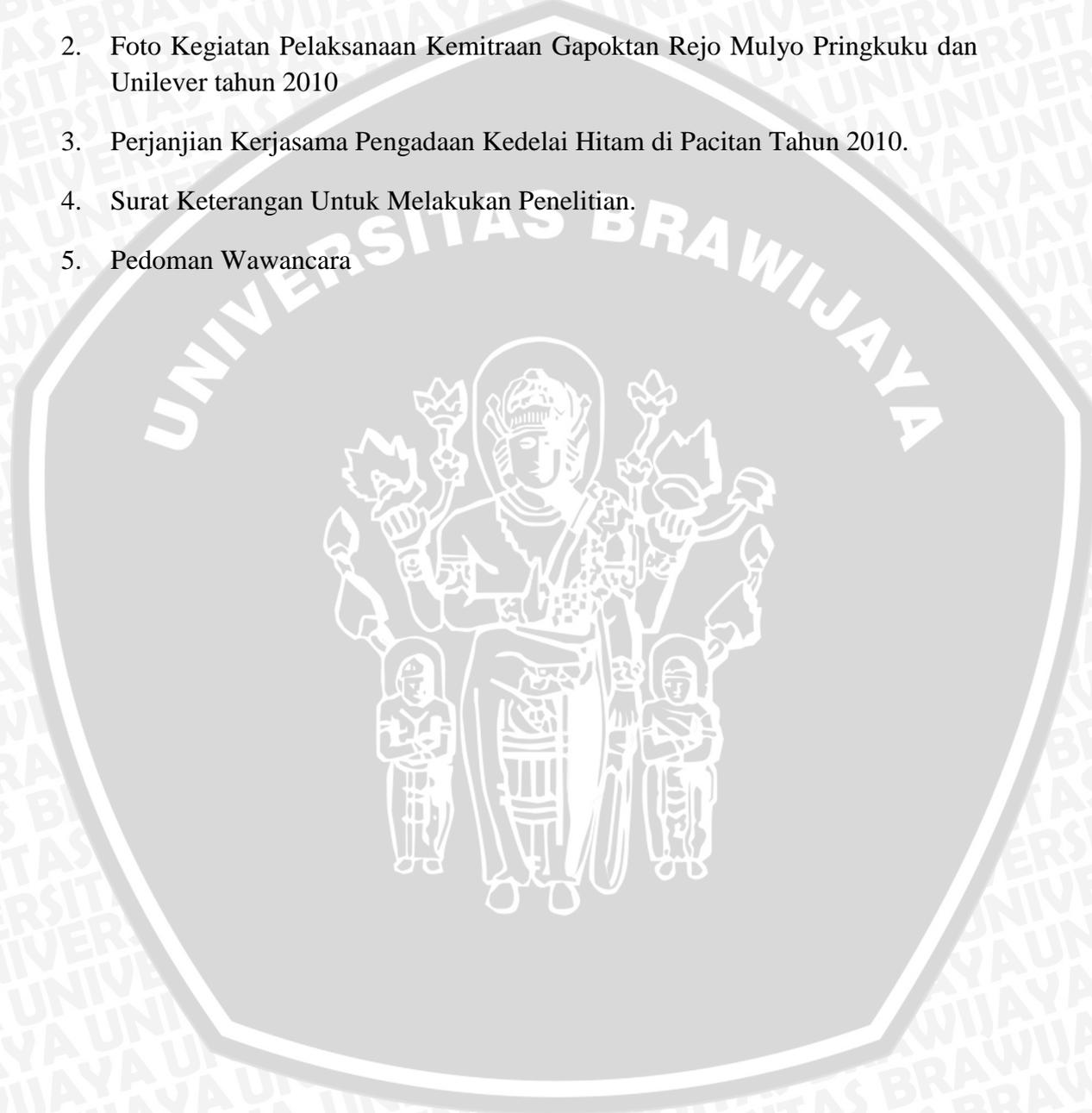
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1	Interaksi Antar Pelaku dalam Kerangka Kepemerintahan	21
2	Lingkar Setan Kemiskinan	25
3	Siklus Pemberdayaan	35
4	Proses Pemberdayaan	36
5	Peta Kabupaten Pacitan	71
6	Peta Kecamatan Pringkuku	72
7	Peta Desa Pringkuku	74
8	Bagan Pola Organisasi Desa	85
9	Struktur Organisasi Gapoktan Rejomulyo Desa Pringkuku Periode 2010-2012	120



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Distribusi Kemiskinan Jawa Timur 2010
2. Foto Kegiatan Pelaksanaan Kemitraan Gapoktan Rejo Mulyo Pringkuku dan Unilever tahun 2010
3. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kedelai Hitam di Pacitan Tahun 2010.
4. Surat Keterangan Untuk Melakukan Penelitian.
5. Pedoman Wawancara



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Karya ini kupersembahkan kepada:

*Ibundaku tercinta yang telah melahirkan, mendidik
dan membesarkanku dengan penuh kesabaran.*

*Ayahanda tercinta, yang telah mendidikku dan tiada
lelah berjuang untuk kehidupan keluargaku.*

*Adikku tersayang yang selalu memberikan
dukungan*

dan semangat.

*Dan seseorang yang nantinya akan menjadi
imamku .*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik merupakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. (Thoha, 2008:67). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi publik dilakukan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar lebih berdaya dan sejahtera. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dari cita-cita Bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional sendiri menurut seminar *Banking with the poor* dalam Sumodiningrat (1997:161) merupakan: “Pembangunan yang muncul dari, dilakukan oleh dan ditujukan untuk rakyat dalam semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Sedangkan Korten (1988: 242-245) mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu:

“Maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan

tujuannya sendiri. Untuk mewujudkan itu, perlu ada perubahan pada berbagai segi kehidupan. Perubahan tersebut menyangkut kebijakan politik, kehidupan demokrasi, sistem pendidikan dan penyediaan saluran informasi yang terbuka luas dan masyarakat berhak untuk memilih.”

Menurut definisi di atas, pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan agar tercipta pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Menurut UNDP: 1997 dalam Briliantes Alex (2000: 85):

“Governance has beendefined as “the exercice of economic, poliysical and administrative authority tomanage a cuntry’s affairs at all levels. It comprises mechanisms, process, and institution, throught which citizens and groups articulate their interest, exercise their legal rights,meet their legalobligations, and mediate their differences”. (“Governance merupakan pelaksanaan kewenangan / kekuasaan di bidang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara di segala tingkatan. Ini meliputi mekanisme, proses, dan institusi melalui penduduk dan kelompok mana yang mengartikulasi kepentingan mereka, melaksanakan hak-hak legal mereka, memenuhi kewajiban legal mereka dan memediasi perbedaan-perbedaan mereka”).

Di dalam teori *governance* tersebut terdapat *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mempunyai peran masing-masing, dan berinteraksi sehingga terwujud *good governance*. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Nasirin, dkk (2010: 42): *“Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, swasta dan masyarakat”. Kesinergian interaksi antara pemerintah,

swasta, dan masyarakat yang dimaksud disini adalah bekerjasama dalam hal pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terdapat kendala yaitu realita kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan. Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, sulitnya akses terhadap barang dan jasa, hambatan lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Tjkrowinoto dalam Sulistiyani (2004: 27) menyebutkan bahwa:

“Kemiskinan merupakan permasalahan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan (*welfare*), kerentanan (*vulnerability*), ketidak berdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi,rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya”.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta (13,33 persen dari total penduduk 234,2 juta jiwa). Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan cara memberdayakan masyarakat. Nasirin, dkk (2010: 4) menjelaskan:

”Fenomena kemiskinan yang terjadi di perdesaan membutuhkan intervensi pemberdayaan. Proses pemberdayaan hendaknya dapat dituangkan dalam

bentuk program aksi yang jelas disertai oleh langkah-langkah pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan khususnya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan di dalam banyak segi kehidupan”.

Terkait dengan hal tersebut, Asnarulkhadi & Aref, (2009: 1) dalam Fatemeh Allahdadi Fatemeh Allahdad, menjelaskan: *“Empowerment is recognized as an essential strategy to strengthen the well-being of individuals, families and communities, government and non government agencies.”* (“Pemberdayaan diakui sebagai strategi penting untuk memperkuat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan non lembaga pemerintah”).

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pemberdayaan membutuhkan upaya-upaya berkelanjutan, membutuhkan kesungguhan serta pengorbanan yang panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, pada tanggal 11 Juni 2005 Presiden RI mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya. (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273).

Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dalam satu kawasan desa dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah yang

fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan, yaitu dengan membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Di dalam Gapoktan tersebut terdapat program yang disebut Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). PUAP merupakan program terobosan Kementerian Pertanian dan dilakukan secara terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Presiden dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. PUAP merupakan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di perdesaan dengan memberikan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang salah satu tujuannya yaitu memberikan kepastian akses pembiayaan kepada petani anggota Gapoktan. (Peraturan Kementerian Pertanian Nomor: 42 Tahun 2010).

Pemberdayaan masyarakat melalui Gapoktan PUAP juga dilakukan di Kabupaten Pacitan. Menurut BPS Kabupaten Pacitan angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, hingga saat ini masih tergolong tinggi dengan jumlah mencapai 19,01 persen dari total penduduk yang telah mendekati kisaran 570 ribu jiwa. Selain itu disebutkan bahwa Kabupaten Pacitan masuk dalam keterangan warna merah dalam peta kemiskinan Jawa Timur yang artinya bahwa Kabupaten Pacitan masuk dalam kategori tingkat kemiskinan cukup tinggi. Melihat keadaan tersebut, tepat jika program pemberdayaan tersebut juga diterapkan di Pacitan. Program dari Kementerian Pertanian tersebut masuk ke

daerah-daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Sasaran Program tersebut adalah penduduk miskin terutama petani yang masih menggunakan pola budidaya tradisional dan petani di lahan marginal.

Salah satu Desa di Kabupaten Pacitan yang mendapat bantuan dari Program PUAP adalah Desa Pringkuku karena Desa Pringkuku merupakan salah satu Desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani, dan petani di Desa Pringkuku kurang berdaya dari segi ekonomi maupun sosial. Rata-rata petani di Desa Pringkuku mempunyai lahan kurang dari 0,5 ha, dan itu masuk dalam kategori miskin. Selain lahan yang sempit, tanah di Desa Pringkuku tergolong kering dan kurang subur, sehingga penghasilan para petani dari sektor pertanian sangat minim. Hasil tanaman padi hanya untuk dikonsumsi sendiri, itupun kadang tidak mencukupi. Yang bisa mereka jual hanya komoditi lain seperti jagung, ketela, kacang tanah, kedelai putih, dan kacang hijau, itupun dengan hasil yang sedikit. Pendapatan tidak sebanding dengan biaya produksi, apalagi jika ditambah dengan iklim yang tidak mendukung dan adanya hama, petani sering rugi. Akan tetapi dari pada lahannya bero mereka tetap menanam berapapun hasilnya. Itulah yang menyebabkan mereka dalam kondisi miskin.

Pada tahun 2008 kemiskinan di Desa Pringkuku sangat banyak yaitu 56,12 persen atau 554 kk dari 987 kk, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Kesejahteraan Keluarga

No	Keterangan	Jumlah KK	Prosentase
1.	Keluarga prasejahtera	501 keluarga	50,7 %
2.	Keluarga sejahtera 1	53 keluarga	5,4 %
3.	Keluarga sejahtera 2	61 keluarga	6,2 %
4.	Keluarga sejahtera 3	368 keluarga	37,3 %
5.	Keluarga sejahtera 3 plus	4 keluarga	0,4 %
	Total jumlah kepala keluarga	987 keluarga	100 %

Sumber: Daftar Isian Profil Desa Pringkuku tahun 2008

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa, kesejahteraan masyarakat masih rendah, yaitu, keluarga prasejahtera 501 KK, keluarga sejahtera I 53 KK, keluarga sejahtera II 61 KK, keluarga sejahtera III 368, dan keluarga sejahtera III plus 4 KK.

Terkait dengan kondisi sosial, masyarakat Desa Pringkuku masih menganut gotong royong, berbeda dengan masyarakat kota yang individualisme. Ketika ada tetangga yang repot mereka saling membantu secara bergantian. Akan tetapi di sisi lain kondisi sosial mereka pun kurang mendukung. Sebagian besar petani di Desa Pringkuku tingkat pendidikannya rendah, rendahnya kualitas sumberdaya manusianya pun rendah. Para petani di Desa Pringkuku masih memakai pola budidaya tradisional, karena mereka tidak *update* dengan teknologi pertanian terkini. Dengan kemampuan terbatas yang dimiliki petani menanam di lahan yang kurang subur, hasilnya tentu akan buruk. Rendahnya kualitas SDM dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2
Kualitas Angkatan Kerja

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Tidak Sekolah (Buta)	4	0,2 %
2	Tidak Tamat SD/ Sederajat	7	0,3%
3	Tamat SD/ Sederajat	1.270	51,6 %
4	Tamat SLTP/ Sederajat	542	22,1 %
5	Tamat SLTA/ Sederajat	506	20,6 %
6	Tamat D1,D2, D3	45	1,8 %
7	Sarjana/ S1	84	3,4 %
	Jumlah	2458	100 %

Sumber: Daftar Isian Profil Desa Pringkuku tahun 2008

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar angkatan kerja yang berjumlah 2458 orang, 1270 orang atau 51,6% hanya lulus SD. Berangkat dari keadaan yang serba minim, yaitu keadaan tanah di Desa Pringkuku yang kering dan kurang subur serta pengetahuan petani dalam bercocok tanam yang masih kurang diharapkan bisa terbantu dengan adanya program Gapoktan PUAP. Kemudian dari hasil wawancara pra riset (Riyanto/ Petani:) pada 11 Mei 2011 disebutkan: “Dana PUAP bisa membantu petani mendapat pinjaman untuk membeli pupuk”. Namun program Gapoktan PUAP ternyata belum sepenuhnya mampu memberdayakan petani. Dari segi sosial (SDM) kemampuan petani dalam mengolah tanah dan budidaya tanaman masih terbatas. Petani di Desa Pringkuku sangat sulit untuk diberi bimbingan tentang cara mengolah tanah dan budidaya tanaman yang tepat. Itu semua karena mereka telah terbiasa dengan pola bertani yang tradisional dan kebiasaan tersebut sulit untuk dirubah. Dari segi ekonomi

tentu penghasilan mereka tidak bertambah dengan adanya pemberdayaan melalui Gapoktan PUAP. Selain itu Gapoktan belum bisa membantu petani dalam pemasaran hasil produksinya. Padahal ketika panen petani sangat mengharapkan terjaminnya pemasaran hasil panennya, mengingat tempat tinggal sebagian besar petani Desa Pringkuku jauh dari pasar.

Satu tahun setelah Gapoktan PUAP berjalan, tepatnya tahun 2008, PT Unilever Indonesia masuk ke Kabupaten Pacitan dan menawarkan untuk bermitra, dalam program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam). Unilever juga akan memberikan, benih, bimbingan, kepastian harga, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan sebagai pintu masuk menunjuk Kecamatan Pringkuku khususnya Desa Pringkuku (GAPOKTAN Pringkuku) untuk melakukan kemitraan dengan Unilever. Dengan mempertimbangkan sisi positif yaitu demi perubahan kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik, maka akhirnya Pemerintah Desa Pringkuku dan Gapoktan menyetujui untuk melakukan kemitraan dengan PT Unilever dengan segala resikonya.

Terkait dengan kemitraan di atas, *LOKNITI, The journal of The NGO Coalition* dalam Utama (2006:46) menjelaskan arti kemitraan secara lebih spesifik dalam konteks kelembagaan (*institutional partnership*) sebagai: “*the mode of interaction among various sector, agencies, or groups to achieve a particular task, objective, goal, or vision while maintaining their own institutional autonomy*”. (“Kemitraan merupakan modus interaksi antar berbagai sektor, lembaga, atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sambil mempertahankan otonomi kelembagaan mereka sendiri”). Yang dimaksud disini

adalah interaksi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan tujuan saling melengkapi kekurangan yang ada. Akan tetapi juga ada resiko yang ditimbulkan dalam pelaksanaan *partnership* tersebut.

Pelaksanaan kemitraan di Desa Pringkuku adalah kemitraan dalam hal program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam (P3KH) yang dilanjutkan dengan program lain yang mendukung. Dalam P3KH petani Desa Pringkuku yang tertarik ikut program, diharuskan menanam kedelai hitam setelah menanam padi, dan kedelai tersebut ditanam sebelum bulan Juli. PT Unilever memberikan benih unggul yang bernama “Malika” dan ada pendamping dari UGM dan juga dari Yayasan Unilever untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petani bagaimana cara menanam kedelai yang baik dan juga memberikan solusi ketika ada masalah pertanian. PT Unilever menjamin pemasaran hasil panen mereka dengan menetapkan harga beli dan konsekuensi hasil panen dari kedelai tersebut harus disetorkan ke Unilever melalui Gapoktan, dan Unilever membeli kedelai tersebut dengan harga yang telah ditetapkan dan disepakati sebelumnya. Kedelai hitam tersebut digunakan sebagai bahan dasar produksi kecap “BANGO” oleh PT Unilever.

Tidak hanya sebatas membeli kedelai hasil panen petani binaannya. Berdasarkan hasil wawancara pra riset dengan Himawan (pendamping GAPOKSI), dijelaskan:

“Dari kemitraan tersebut, akhirnya pada tahun 2010 Unilever juga memberikan program Gapoksi (Gabungan Kelompok Sortasi), untuk memberdayakan istri-istri petani dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti sortasi kedelai, ketrampilan mengolah barang bekas, membuat makanan dan kue, latihan kesenian, berwirausaha dan lain-lain yang berguna untuk untuk memberdayakan mereka. Dalam program tersebut

juga ada pendamping yang akan membina kegiatan ibu-ibu petani.” (wawancara pra riset pada hari Rabu 12 Mei 2011 pukul 19.00, di Rumah Bapak Karni)

Kemudian Dari hasil wawancara pra riset dengan Bapak Sugiyanto (Kepala Desa Pringkuku) dijelaskan:

“Pemerintah Desa Pringkuku sadar bahwa setiap program yang dilaksanakan dan setiap kebijakan pemerintah adalah usaha untuk memberdayakan rakyat. Oleh karena itu Pemerintah Desa Pringkuku menerima tawaran kemitraan dari Unilever, dengan harapan bisa membantu memberdayakan masyarakatnya dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat walaupun dalam skala kecil”. (wawancara pra riset pada hari Kamis 12 Mei 2011, pukul 09.30 di Kantor Desa Pringkuku)

Dengan pelaksanaan kemitraan program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam serta program pemberdayaan terhadap ibu-ibu tersebut diharapkan mampu merubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Pringkuku, sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan berdaya. Berdasarkan fakta di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Upaya Memberdayakan Masyarakat dalam Perspektif *Partnership*” (Studi Pelaksanaan *Partnership* di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran *stakeholder* dalam memberdayakan masyarakat Desa Pringkuku?
2. Bagaimanakah proses kemitraan *stakeholder* dalam Program P3KH (Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan Kedelai Hitam) di Desa Pringkuku?

3. Bagaimanakah dampak kemitraan P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam) bagi pemberdayaan masyarakat Desa Pringkuku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis peran *stakeholder* dalam memberdayakan masyarakat Desa Pringkuku.
2. Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan kemitraan *stakeholder* dalam Program P3KH (Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan Kedelai Hitam) di Desa Pringkuku.
3. Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis dampak kemitraan P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam) yang dilaksanakan *stakeholder* dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pringkuku.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi *governance stakeholder* dan pihak-pihak yang melaksanakan *partnership*.
- b. Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan *good governance*, pemberdayaan dan kemitraan, sehingga program tersebut benar-benar bermanfaat dan dapat memberdayakan masyarakat.

2. Kontribusi Akademis

- a. Sebagai salah satu kajian dalam studi Administrasi Publik, terutama tentang unsur *governance*, yang berperan sebagai *partnership stakeholder*.
- b. Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain dalam mengembangkan studi lebih lanjut yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan *partnership*.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu kesatuan, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penelitian mulai dari kondisi social ekonomi masyarakat Desa Pringkuku, kondisi dan permasalahan yang ada di Desa Pringkuku, hingga masuknya program kemitraan di Desa Pringkuku. Selain itu juga perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi yang diperoleh dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan tema penelitian yang terdiri dari: *Governance*, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat, dan *Partnership*.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, dimana peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, fokus penelitian ini mengkaji mengenai peran *stakeholder* dalam memberdayakan masyarakat Desa Pringkuku, proses kemitraan, serta dampak dari kemitraan bagi pemberdayaan masyarakat Desa Pringkuku dalam perubahan kondisi social dan ekonomi mereka. Adapun lokasi penelitian yang dipilih, yaitu di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Dan yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Gapoktan Rejo Mulyo Pringkuku, Kantor Desa Pringkuku, dan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Project Manager Yayasan Unilever, Asisten Lapang dari Yayasan Unilever, pengurus Gapoktan, kepala Desa Pringkuku, masyarakat desa Pringkuku serta data tentang gambaran umum desa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari proses memahami, sintesis, teoritis, dan terakhir recontextualisasi (pengembangan teori).

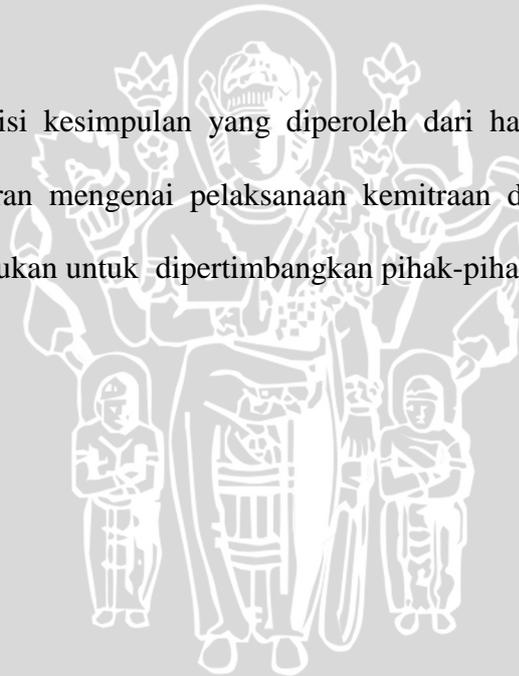
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian mengenai gambaran umum Kabupaten Pacitan, Gambaran umum Desa

Pringkuku, Gambaran Umum Gabungan Kelompok Tani, Profil Gapoktan RejoMulyo Pringkuku Dalam bab ini juga dimuat pembahasan hasil penyajian data dan analisis peran stakeholder dalam memberdayakan masyarakat, proses kemitraan, dan dampak kemitraan yang hasilnya bisa merubah kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik, dan menambah pendapatan hanya dalam skala kecil, namun belum mampu merubah kondisi ekonomi masyarakat Desa Pringkuku menjadi lebih baik dan berdaya secara ekonomi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta berbagai saran mengenai pelaksanaan kemitraan di Desa Pringkuku, sebagai masukan untuk dipertimbangkan pihak-pihak terkait.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Governance*

Sejak akhir tahun 1980an, istilah *governance* mulai digunakan untuk pengertian yang berbeda. Ketika istilah *governance* dipopulerkan, perubahan penggunaan istilah dari *government* ke *governance* lebih dimaksudkan untuk menunjukkan perlunya gelombang baru reformasi pemerintahan. Istilah *government reform*, *democracy* dan sejenisnya, dianggap telah mengalami inflasi dan tidak mampu menarik perhatian untuk menggerakkan semangat *reform*. Penggunaan istilah *governance* digunakan untuk menegaskan perlunya arah dan semangat baru reformasi pemerintahan. Istilah *governance* telah digunakan untuk menegaskan signifikansi perlunya perubahan proses, metode dan capaian pemerintahan.

Penggunaan istilah *governance* sebagai konsep yang berbeda dengan *government*, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Bank Dunia (1989) mendefinisikan *governance* sebagai “*exercise of political power to manage nation*” (pelaksanaan kekuasaan politik untuk mengelola bangsa). Selanjutnya, laporan ini menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor negara (pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus, dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif.

Oleh karena itu, legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi *Good Governance* versi Bank Dunia ini hanya bisa dibangun dengan melibatkan aktor non-negara yang seluas-luasnya dan mengurangi keterlibatan negara (pemerintah).

1. Konsep *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik)

Istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “*governance*” yaitu “*the act, fact, manner of governing*”, yang berarti: “Tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian “*governance*” adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman dalam Sedarmayanti (2004: 2-3) bahwa *governance* lebih merupakan “...serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. Istilah “*governance*” tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, dan penyelenggaraan.

Selain itu Asian Development Bank (ADB) (2000) mendefinisikan: “*Governance is manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development.*” (“*Governance* merupakan cara yang mana kekuasaan dilaksanakan dalam manajemen sumber-sumber sosial dan ekonomi negara untuk pembangunan.”)

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah kepemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai- nilai

yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. (LAN: 2000).

2. Prinsip *Good Governance*

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Dalam Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni: ”...proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis,

professional menjunjung supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih, dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”.

Dalam penerapannya ada beberapa prinsip dalam *governance*, seperti yang dikemukakan oleh Mustopadijaja dalam Syamsiar (2006: 63-66), yaitu:

1. Prinsip demokrasi dan pemberdayaan
Demokrasi merupakan prinsip penyelenggaraan negara yang mengakui dan menghormati hak dan kewajiban warga negara. Dalam hubungan ini peran negara diperlukan pula dalam pemberdayaan seperti pengurangan hambatan atas partisipasi masyarakat, perluasan akses pelayanan serta pengembangan kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
2. Prinsip pelayanan
Dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta menjadi mitra atau melakukan kerjasama dengan masyarakat diperlukan semangat melayani masyarakat yang bisa terwujud melalui pembudayaan perilaku aparatur
3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas
Dalam upaya peningkatan partisipasi dan kemitraan maka diperlukan beberapa pendekatan yaitu mengembangkan keterbukaan birokrasi pemerintah, deregulasi dan debirokratisasi peraturan yang menghambat serta membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk turut serta aktif dalam program pembangunan.
4. Prinsip Partisipasi
Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat melalui proses kemitraan serta kebersamaan yang dapat dilakukan dengan pola desentralisasi pelayanan sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat sejalan dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
5. Prinsip Kemitraan
Bagi kemajuan pembangunan nasional maka diperlukan iklim yang kondusif bagi terciptanya kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dalam skala kecil, menengah maupun besar dan mendorong pertumbuhannya.
6. Prinsip Desentralisasi
Pembangunan pada hakikatnya dilaksanakan di daerah-daerah sehingga kewenangan sebaiknya diserahkan kepada daerah. Dalam proses pembangunan tersebut pemerintah daerah bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat sehingga membutuhkan desentralisasi dalam pemberian perijinan, efisiensi pelayanan, penyesuaian kebijakan pajak bagi pembangunan serta ketersediaan dan kemudahan informasi mengenai peluang bisnis dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.
7. Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum

Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijakan yang akhirnya harus dituangkan dalam undang-undang dan harus memiliki kekuatan hukum dan harus mengandung kepastian hukum.

3. Unsur- unsur *Governance* (*Governance Stakeholders*)

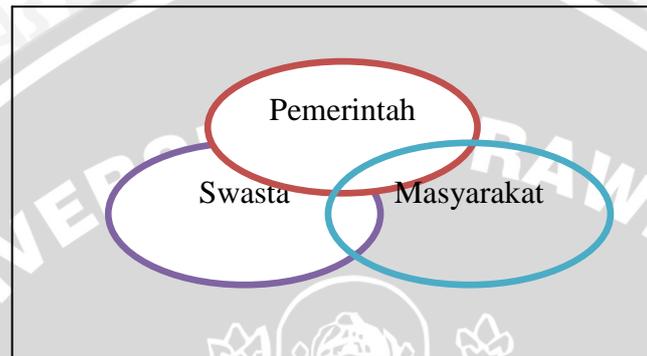
Pada dasarnya unsur pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori, Sedarmayanti (2004:38):

- a. Negara /Pemerintahan: Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (*Civil Society Organizations*).
- b. Sektor Swasta: Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani (*Civil Society*): Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Kelembagaan dalam *governance* meliputi tiga domain diatas yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat memfasilitasi interaksi sosial budaya dan politik, menggerakkan kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Istilah "*governance*" didefinisikan sebagai "*how societies steer the selves*". (bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri).

Berbagai pengertian mengenai konsep pemerintahan pada dasarnya hampir sama, intinya yaitu mengenai bagaimana pemerintahan berinteraksi dengan

masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, maka berikut ini adalah gambar interaksi sosial politik dan ekonomi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam konsep *governance*.



Sumber: Sedarmayanti (2004:38)

Gambar 1
Interaksi Antar Pelaku dalam Kerangka Kepemerintahan

B. Kemiskinan

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena bagaimana upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dan sampai sejauh mana upaya tersebut mampu meraih apa yang diinginkan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Tjkrowinoto dalam Sulistiyani (2004: 27) menyebutkan bahwa,

“Kemiskinan merupakan permasalahan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan (*welfare*), kerentanan (*vulnerability*), ketidak berdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya”.

Persoalan kemiskinan sesungguhnya jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Kata sejahtera berada pada beberapa tingkat di atas kemiskinan. Kondisi yang menggambarkan kemiskinan tentulah sangat jauh rentangnya dengan kondisi sejahtera. Pemaknaan kata sejahtera adalah apabila seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok. Oleh karena itu masalah kesejahteraan akan berada pada tataran peningkatan kondisi dari miskin menjadi berkecukupan dan tahap berikutnya menjadi sejahtera. Orang yang hidup sejahtera tidak lagi berhadapan dengan persoalan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemiskinan acapkali terkait dengan kerentanan. Orang miskin biasanya sekaligus pada kondisi yang rentan atau lemah. Orang miskin tidak memiliki daya kemampuan yang cukup di banyak bidang. Orang miskin secara ekonomi, dibarengi oleh miskin pendidikan, sedikit wawasan, tidak berdaya, dan tidak memiliki kekuasaan. Lemahnya sistem pertahanan ekonomi telah mempengaruhi ketahanan di banyak bidang. Kemiskinan juga dibarengi oleh ketidakberdayaan. Orang miskin tidak memiliki daya atau kemampuan yang cukup. Biasanya tidak berdaya secara ekonomi, pendidikan, politik, sosial, maupun kekuasaan.

Ketidakberdayaan ekonomi disebabkan oleh terbatasnya akses produksi, alat produksi, kegiatan pelayanan jasa dan lain-lain. Kalaupun masyarakat miskin terlibat dalam kegiatan produksi, pelayanan, jasa dan aktivitas ekonomi lainnya, biasanya hanya dalam komoditas yang rendah nilainya, dengan perputaran waktu yang lambat, sehingga sangat sedikit keuntungan yang diperoleh. Penghasilan

yang diperoleh hanya cukup untuk dikonsumsi, tidak dapat melakukan *saving* atau membangun modalan dari komoditas yang diusahakannya.

Ketidakterdayaan di bidang pendidikan sangat nyata terlihat, bahwa orang miskin rata-rata memiliki latar belakang pendidikan rendah. Dengan demikian orang miskin tidak memiliki wawasan yang cukup, yang dapat menjadi modal yang berharga. Orang miskin tidak berdaya, tidak dapat mengembangkan wawasan, dengan demikian sangat rentan terhadap kemajuan ilmu dan teknologi, dan akhirnya menjadi orang yang selalu tertinggal. Ketika kemajuan ilmu dan teknologi serta informasi terus melaju, maka ketidakberdayaan orang miskin akan semakin dirasakan. Ketidakberdayaan secara politik tampak nyata di dalam komunitas miskin. Akses untuk ikut serta dalam proses formulasi kebijakan sangat tidak mungkin dilakukan. Sedangkan ketidakberdayaan secara sosial tampak sekali dalam bangunan stratifikasi sosio-kultur di dalam masyarakat. Komunitas miskin biasanya menempati strata terbawah di dalam segmentasi sosial masyarakat. Posisi dalam struktur ini sangat menentukan akses dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur social semakin dekat aksesnya terhadap pengambilan keputusan, dan semakin rendah posisinya semakin jauh aksesnya terhadap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian komunitas miskin posisinya menjadi sangat kecil dalam proses pengambilan keputusan.

2. Masalah Kemiskinan

Menurut Usman (2006:127-128), sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim digunakan untuk mendekati masalah kemiskinan yaitu: perspektif kultural (*cultural perspective*) dan perspektif struktural dan situasional (*situational perspective*). Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis: individual, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai dengan sifat pasrah pada nasib, boros, dan tergantung,. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar. Dan pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif.

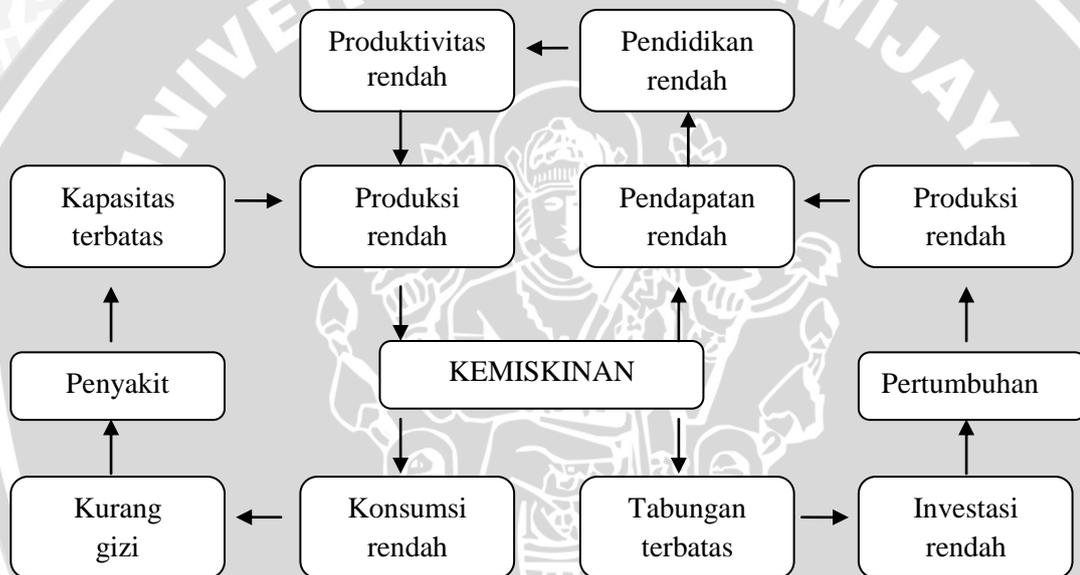
Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan dan kurang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan.

Kartasmita (1996:240-241), menjelaskan penyebab kemiskinan sebagai berikut:

1. Pertama, rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2. Kedua, rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
3. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.

- Keempat, kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpinggirkan sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Keempat penyebab kemiskinan yang diungkapkan diatas menunjukkan menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Semuanya saling terkait dan seakan tidak dapat dipisahkan. Seperti ditunjukkan pada gambar 4 tentang lingkaran setan dibawah ini:



Sumber : Nuscheler, F : *Lern-und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik*, Bonn 1996, hal. 144 dalam Izzedin Bakhit (2001:6)

Gambar 2
Lingkaran Setan Kemiskinan

3. Penanggulangan Kemiskinan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membuktikan bahwa kemiskinan dapat dipatahkan dengan menggali pengetahuan-pengetahuan baru sebagai basis bagi pengalaman-pengalaman baru, melalui berbagai informasi dan pelatihan,

melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih baik, melalui upaya-upaya swadaya pada lembaga-lembaga terorganisir di tingkat lokal dan dengan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi.

Streeten dalam Supriatna (2000:32) menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar, dimana kebutuhan dasar dari setiap negara berbeda-beda yang pada hakekatnya didasarkan pada pendekatan tiga tujuan pokok, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan minimum keluarga untuk konsumsi: a.) Pangan, b.) Sandang, c.) Papan.
2. Peningkatan akses kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik (*access to public services*).
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam formulasi dan implementasi program atau kebijaksanaan yang menyangkut diri masyarakat.

Untuk mencapai kebutuhan dasar dari setiap negara, peranan pemerintah penting dalam menyalurkan pelayanan masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan birokrasi pemerintahan pada negara-negara berkembang terus-menerus meningkat sejalan dengan penambahan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh arus informasi maupun dinamika dan tuntutan masyarakat.

4. Indikator Kemiskinan

Begitu banyak indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan (kesejahteraan). Diantaranya adalah Pengukuran atau indikator kemiskinan berdasarkan penjelasan Huraerah (2008:168) bahwa ukuran atau indikator utama kemiskinan saat ini adalah dilihat dari tingkat pendapatan seseorang, yaitu dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, papan, pangan kesehatan, dan pendidikan. Sesuai dengan Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan BLT kepada Rumah Tangga Miskin dan Indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), maka seorang kepala keluarga dikatakan miskin jika bekerja sebagai petani dengan luas lahan kurang dari 0,5 Ha atau bekerja di bidang lain dengan pendapatan Rp 600.000,00 perbulan.

Indikator lain yaitu, indikator yang dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 1994, yaitu mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan mempergunakan indikator ekonomi, kesehatan, gizi, dan sosial. Hasil dari penelitian tersebut dapat memetakan kesejahteraan dalam tingkatan sebagai berikut:

1. Keluarga Pra sejahtera
2. Keluarga Sejahtera I
3. Keluarga Sejahtera II
4. Keluarga Sejahtera III
5. Keluarga Sejahtera III Plus

Dari indikator ini dijelaskan bahwa keluarga yang masuk dalam kategori miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Sulistiyani (2004: 35).

C. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya Eropa modern pada pertengahan abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke-masa kini-an, yang telah umum digunakan. Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau kekuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar umat manusia. Oleh karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Menurut Suharto (2005: 58):

“Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam a). Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; b). Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Selanjutnya, Asnarulkhadi & Aref, 2009 dalam Fatemeh Allahdadi Fatemeh Allahdad, menjelaskan:

“Empowerment is recognized as an essential strategy to strengthen the well-being of individuals, families and communities, government and non government agencies (Aref, 2010). In other word empowerment is an abiding process which takes place with specific intent so enabling them to have further control over society’s resources. (“Pemberdayaan diakui sebagai strategi penting untuk memperkuat kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan non lembaga pemerintah (Aref, 2010). Dengan kata lain pemberdayaan adalah taat proses yang terjadi dengan maksud tertentu sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol lebih lanjut atas sumber daya masyarakat.”)

Pemberdayaan dalam konteks masyarakat adalah individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta memiliki kebudayaan yang tinggi, untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik melalui suatu perencanaan dan pelaksanaan yang baik pula sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat banyak. Prijoko dan Pranaka dalam Sulistiyani (2004:78) menjelaskan bahwa pemberdayaan mengandung dua makna pokok, yakni: pertama, *to give power or authority* (artinya memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat, yang belum atau kurang berdaya. Kedua, *to give ability or enable* (artinya memberikan kemampuan atau

keberdayaan serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu).

Kartasasmita (2000:159) juga menyatakan bahwa “salah satu strategi awal pemberdayaan adalah dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), yang mana titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan”. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan sebuah program pemberdayaan, masyarakat merupakan elemen penting dan suyek pembangunan, dengan tujuan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Kemudian, menurut Iffe (1995: 61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- Pilihan- pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

- Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan, dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

Berdasarkan teori-teori pemberdayaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. dengan menggunakan sumberdaya yang ada, yang memerlukan keterlibatan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat serta pihak swasta untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2. Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin perlu dirancang kontribusi masing-masing aktor, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sehingga terbentuk model kemitraan yang diharapkan. Dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3
Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan Penetapan <i>Policy</i> , Implementasi Monitoring dan evaluasi. Mediasi.	Kebijakan: Politik, Umum, Khusus/ Departemen/ sektoral. Penganggaran, Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan. Peraturan hukum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi, network, system manajemen informasi, edukasi.
Swasta	Kontribusi pada formulasi implementasi, monitoring dan evaluasi.	Konsultasi & rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/policy action implementasi, donator, private investment, pemeliharaan	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil.
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Policy action, dana swadaya. Menjadi obyek, partisipan, pelaku utama/subyek. Menghidupkan fungsi sosial kontrol	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih.

Sumber: Sulistiyani (2004:97)

Berdasarkan pemetaan peran ketiga aktor dalam tabel di atas, peran pemerintah yang paling menonjol terletak pada peran pengambilan keputusan dan

pendanaan. Namun perlu adanya mediasi, terutama untuk mengontrol peran swasta supaya berjalan wajar tidak merugikan masyarakat. Untuk menjaga kualitas hasil, pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas dan berkelanjutan. Dalam rangka memudahkan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, menjaga kualitas dan tanggung jawab bermitra hendaknya pemerintah menyusun dan menetapkan kriteria evaluasi, pada setiap program pembangunan.

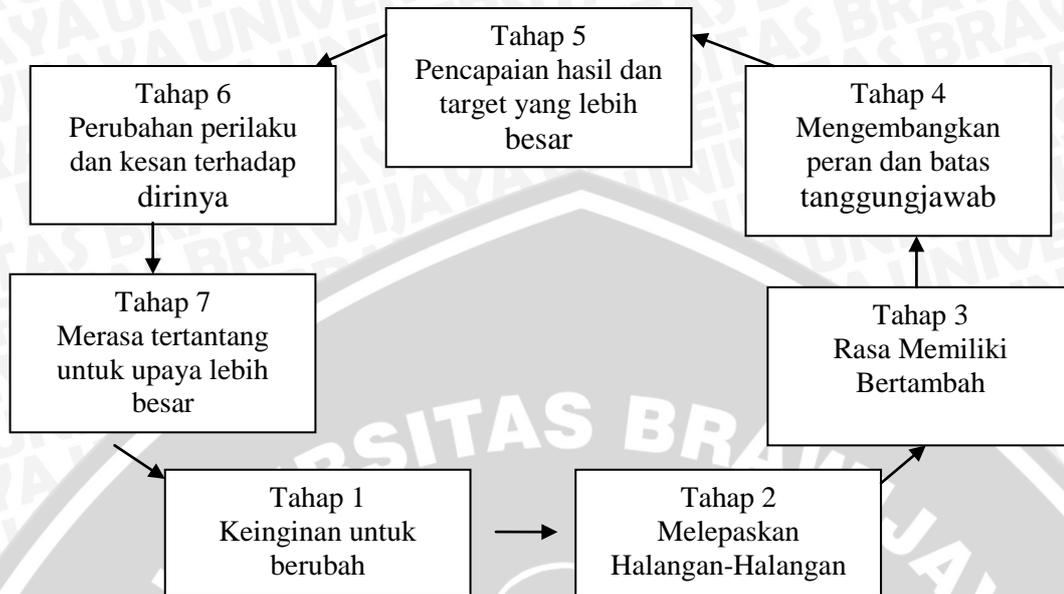
Swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah/*policy action* bersama masyarakat. Peran swasta dalam implementasi kebijakan pemberdayaan juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi pihak swasta juga memberi andil dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi. Dengan demikian bentuk fasilitasi akan berupa penerjunan tenaga ahli dan sangat terampil serta teknologi yang memadai.

Sedangkan peran masyarakat secara umum diberikan dalam bentuk partisipasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan tergantung pada tingkat keberdayaan yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memberdayakan masyarakat agar berkemampuan untuk memberikan ide, kritik, dsb perlu dilakukan proses edukasi masyarakat, dengan cara seperti yang disebutkan Sulistiyani (2004: 99):

1. Memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat untuk menyampaikan ide, masukan, kritik, rasa keberatan, permintaan dsb, tanpa dibebani sanksi dan ancaman.
2. Memberikan informasi secara transparan dan aksesibilitas kepada masyarakat yang menyangkut berbagai aspek pembangunan lokal maupun nasional.
3. Pelibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan dengan melihat profesionalisme, kompetensi di samping nilai kepentingan masyarakat terhadap program pemberdayaan.

3. Siklus dan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wilson (1996:12) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat lebih merupakan kelanjutan dari tahap ketiga yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggungjawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

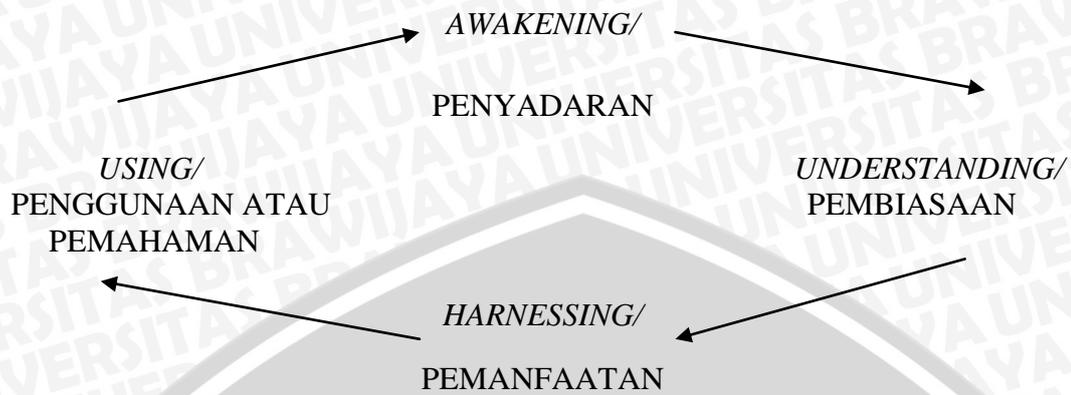


Sumber: Wilson, 1996

Gambar 3
Siklus Pemberdayaan

Proses bisa diartikan sebagai runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu (Depdiknas, 2003), jadi proses pemberdayaan bisa dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Wilson (1996:31) memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:

1. *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.
2. *Understanding* atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.
3. *Harnessing* atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.
4. *Using* atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.



Sumber: Wilson, 1996

Gambar 4
Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses yang cukup lama (Wilson, 1996:34).

4. Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Agar kita dapat melakukan analisis dan pemahaman yang tepat mengenai pemberdayaan, harus dipahami dulu kerangka konseptual mengenai lingkup dan tingkatan pemberdayaan. Dari kajian-kajian empiris pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, Alshop dan Heinshon dalam Sumaryadi (2005:10) menggambarkan 3 hal dalam lingkup pemberdayaan, yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, sedangkan Ndraha (dalam Sumaryadi, 2005:11) menyebutkan satu lingkup lainnya pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan politik lebih mengarah kepada upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan posisi tawar

masyarakat terhadap pemerintah atau pihak-pihak lainnya, yang meliputi aspek-aspek penegakan keadilan, kepemimpinan politik, dan pelayanan publik.

Pemberdayaan ekonomi adalah pendekatan yang diutamakan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktifitas dalam bidang ekonomi dan memiliki penghasilan yang lebih baik, sehingga mampu menanggung dampak negatif dari pertumbuhan yang terjadi. **Pemberdayaan sosial** lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyadari posisi dan peran seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dalam komunitasnya. Pemberdayaan lingkungan adalah upaya yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjalin hubungan baik dalam interaksi manusia dengan lingkungannya.

5. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Sumaryadi (2005: 154-158) dijabarkan menjadi 8 faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Ketersediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
3. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpolo dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.

8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung dari kondisi masyarakat dan peran serta semua *stakeholder* yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.

6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Adapun indikator pemberdayaan menurut Suharto (2005:64) adalah:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya ; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan untuk membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas. Poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya ; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan- keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/ istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPR setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya: gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Dari indikator diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berdaya mempunyai kebebasan mobilitas, mampu membeli komoditas kecil maupun besar (memenuhi kebutuhan rumah tangga), ikut terlibat dalam pembuatan keputusan, mempunyai kesadaran hukum dan politik, serta memiliki jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

D. Partnership (Kemitraan)

1. Pengertian Partnership (Kemitraan)

Partnership, berasal dari akar *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan "pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon". Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Penjelasan diatas merupakan pengertian kemitraan dilihat dari perspektif etimologis. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemitraan didefinisikan sebagai “perihal hubungan (jalinan kerja sama dsb.) sebagai mitra”. Sedangkan mitra diartikan sebagai ”kawan kerja, pasangan, kerja, rekan”. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *partnership* sama dengan kemitraan. Selanjutnya kata *partnership* dan kemitraan akan digunakan secara silih berganti.

Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kemitraan mencakup pengertian “jalinan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk sebuah kepentingan dan tujuan tertentu”. Berdasarkan pengertian umum tentang kemitraan tersebut, secara lebih spesifik menurut (LOKNITI, The journal of The NGO Coalition,) dalam Utama (2006:46) kemitraan dalam (*institutional partnership*) dimaknai sebagai: “*the mode of interaction among various sector, agencies, or groups to achieve a particular task, objective, goal, or vision while maintaining their own institutional autonomy*”. (“modus interaksi antar berbagai sektor, lembaga, atau kelompok untuk mencapai suatu tugas tertentu, sambil mempertahankan otonomi kelembagaan mereka sendiri”). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1. “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Bertolak dari pengertian tersebut diatas, maka Sulistiyani (2004:129) menjelaskan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
3. Ada kesepakatan.
4. Saling membutuhkan.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya. Dalam kemitraan harus adanya faktor kerjasama amat penting, seperti kerjasama dalam hal penyediaan modal dan kerjasama individu dengan individu yang lain agar tercipta tujuan yang diharapkan. Kerjasama tersebut memerlukan waktu dan tahapan tertentu, agar pihak yang terlibat terjalin komunikasi. Kepentingan yang ada berjalan secara seimbang dan tidak ada satu kepentingan yang berada di atas kepentingan yang lain, dan tidak ada kepentingan yang diabaikan. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan partisipatif sehingga dapat terwujud tujuan kemitraan.

2. Pola Kemitraan

Dalam rangka merealisasikan kemitraan sebagai wujud dari keterkaitan usaha, maka diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan

tujuan usaha yang dimitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik didalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya. Pembinaan kemitraan tersebut adalah sebagai berikut (Hafsah, 2000: 67-80) :

1. Pola Inti Plasma

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan Usaha Menengah bertindak sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil sebagai plasma. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan pola inti plasma adalah “hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha”. Kerjasama inti plasma akan diatur melalui suatu perjanjian kerjasama antara inti dan plasma. Dalam program inti plasma ini diperlukan keseriusan dan kesiapan, baik pada pihak usaha kecil selaku pihak plasma yang mendapat bantuan dalam upaya mengembangkan usahanya, maupun pada pihak usaha besar atau usaha menengah yang mempunyai tanggungjawab sosial untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Selain itu juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha pola inti plasma yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak terdapat antara lain : (1) Pengusaha Besar (Pemrakarsa), (2) Pengusaha Kecil (Mitra Usaha) dan (3) Pemerintah. Peran

pengusaha besar selaku (inti) sebagaimana tersebut di atas tentunya juga harus diimbangi dengan peran usaha kecil (plasma) yaitu meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya yang berkelanjutan serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah. Selanjutnya untuk peran pemerintah akan dibahas lebih lanjut pada sub bab yang tersendiri.

2. Pola Subkontrak

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 bahwa “pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.

Pola subkontraktor adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dengan usaha kecil atau menengah, Ciri khas dari bentuk kemitraan ini adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga, dan waktu. Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan ketrampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;

- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Dapat pula dikatakan bahwa dalam pola subkontrak, usaha kecil memproduksi barang dan atau jasa yang merupakan komponen atau bagian produksi usaha menengah atau usaha besar. Oleh karena itu, maka melalui kemitraan ini usaha menengah dan atau usaha besar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil untuk membeli bahan baku yang diperlukan secara berkesinambungan dengan harga yang wajar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan dengan pola subkontrak, bagi perusahaan kecil antara lain adalah dapat menstabilkan dan menambah penjualan, kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan. Sedangkan bagi perusahaan besar adalah dapat memfokuskan perhatian pada bagian lain, memenuhi kekurangan kapasitas, memperoleh sumber pasokan barang dengan harga yang lebih murah daripada impor, selain itu juga dapat meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

3. Pola Dagang Umum

Menurut penjelasan Pasal 27 huruf (c) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, Pola Dagang Umum adalah “hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”. Dengan demikian maka dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Oleh karena itu pola kemitraan ini memerlukan struktur pendanaan yang kuat dari pihak yang bermitra, baik mitra usaha besar maupun perusahaan mitra usaha kecil, membiayai sendiri-sendiri dari kegiatan usahanya karena sifat dari kemitraan ini pada dasarnya adalah hubungan membeli dan menjual terhadap produk yang dimitrakan. Lembaga penunjang dalam mendukung pembiayaan kegiatan ini sangat mendukung proses pelaksanaan system kemitraan pola dagang ini.

Keuntungan dari pola kemitraan dagang ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah disepakati . Namun kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha. Kelemahan lainnya adalah perusaha

besar menentukan dengan sepihak mengenai harga dan volume yang sering merugikan pengusaha kecil.

4. Pola Keagenan

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 huruf (e) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, pola keagenan adalah “hubungan kemitraan, yang di dalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya”. Dalam pola keagenan, usaha menengah dan atau usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa produknya memberi hak keagenan hanya kepada usaha kecil. Dalam hal ini usaha menengah atau usaha besar memberikan keagenan barang dan jasa lainnya kepada usaha kecil yang mampu melaksanakannya.

Selanjutnya menurut Munir Fuady (1997:165), pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak principal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen terhadap pihak ketiga, serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha.

5. Pola Waralaba

Menurut Penjelasan Pasal 27 Huruf (d) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995, Pola Waralaba adalah “ hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan

bimbingan manajemen”. Berdasarkan pada ketentuan seperti tersebut di atas, dalam pola waralaba pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri usaha kepada penerima waralaba. Dengan demikian, maka dengan pola waralaba ini usaha menengah dan atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan dan atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

3. Model-model Kemitraan

Munculnya ide untuk mendiskusikan model-model kemitraan berikut ini adalah diilhami oleh fenomena biologis. Menurut Sulistiyani (2004:130-132) kemitraan dibagi menjadi:

1. *Pseudo Partnership*, atau Kemitraan Semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak tertentu belum memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa. Kemitraan semu semacam ini tampak nyata terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada jaman orde baru, yang sering disosialisasikan melalui slogan “pembangunan dari dan

oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna atas semua itu, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

2. *Mutualism Partnership*, atau Kemitraan Mutualistik

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen /organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain. Pemikiran kemitraan demikian ini diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang.

3. *Conjugation Partnership* atau Kemitraan Melalui Peleburan dan Pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energy dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok, atau

perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

4. Manfaat Kemitraan

Manfaat kemitraan bisa juga disebut sebagai dampak positif dilaksanakannya kemitraan. Adapun dampak positif tersebut adalah:

a. Produktivitas

Chaseand Aquilano dalam Hafsah (2000: 54) mengungkapkan bahwa dalam era ekonomi global dimana mekanisme pasar menjadi acuan semua pelaku ekonomi, maka kata kunci yang menjadi indikator keunggulan adalah produktivitas. Secara umum produktivitas didefinisikan dalam model ekonomis bagi output dibagi dengan input. Dengan kata lain produktivitas akan meningkat apabila dengan *input* yang sama dapat diperoleh hasil yang lebih tinggi atau sebaliknya dengan tingkat hasil yang sama hanya membutuhkan *input* yang lebih rendah.

b. Efisiensi

Definisi efisiensi dipandang dari sudut penggunaan tenaga kerja, menurut Schonberger and Knod dalam Hafsah (2000: 56), adalah jumlah waktu yang sebenarnya digunakan untuk memproduksi barang dibagi dengan standar waktu yang telah ditetapkan atau output yang dihasilkan lalu dibagi dengan standar output yang ditetapkan.

c. Jaminan Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas

Hafsah (2000:59) menjelaskan tentang kualitas, kemitraan dan kontinuitas yang biasa disingkat “Tiga Tas” sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan produktivitas yang menentukan terjaminnya pasokan pasar dan gilirannya menjamin keuntungan perusahaan mitra “Tiga Tas” ini memerlukan manajemen yang mantap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Sehingga perlu disertai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang jelas dan disiplin yang ketat. “Tiga Tas” ini juga merupakan perekat kemitraan, apabila berhasil dapat melanggengkan kelangsungan kemitraan ke arah penyempurnaan.

d. Risiko

Hafsah (2000: 60) mengungkapkan bahwa setiap kegiatan selalu ada risiko. Bahkan satu norma yang dianut oleh dunia usaha bahwa keuntungan/kesuksesan yang besar biasanya mengandung konsekuensi risiko yang besar dapat ditanggung bersama (*risk sharing*). Tentunya pihak-pihak yang bermitra akan menanggung risiko secara proporsional sesuai dengan besarnya modal dan keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian risiko kerugian akibat kelebihan hasil penurunan harga dapat dihindarkan. Risiko

yang ditanggung bersama ini bukan hanya membagi risiko secara proporsional sehingga lebih ringan melalui *risk sharing*, mengandung makna lebih dalam, yaitu senasib sepenanggungan, eksistensi perusahaan yang bermitra menjadi besar, sehingga risiko berkurang menjadi lebih ringan lagi (Hafsah, 2000:60).

e. Sosial

Dengan kemitraan bukan hanya memberikan dampak positif dan saling menguntungkan melainkan dapat memberikan dampak sosial (*social benefit*) yang cukup tinggi. Ini berarti negara terhindar dari kecemburuan sosial yang bisa berkembang menjadi gejolak sosial akibat ketimpangan. Demikian pula melalui kemitraan dapat menghasilkan persaudaraan antar pelaku ekonomi yang berbeda status. Ini sesungguhnya merupakan wujud dari keadilan social dan keadilan ekonomi seperti diamatkan dalam UUD 1945 (Hafsah, 2000: 61).

f. Ketahanan Ekonomi Nasional

Dalam mendorong terciptanya kemitraan yang sering dilakukan adalah dengan menciptakan iklim kondusif berupa peraturan, mewujudkan model atau pola kemitraan yang sesuai, yaitu dengan menyediakan prasarana penunjang. Dengan adanya upaya dan fasilitas fisik diharapkan akan terwujud kemitraan. Produktivitas, efektivitas dan efisiensi, akan meningkat yang akhirnya akan bermuara pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan para pelaku kemitraan (Hafsah, 2000: 62). Dengan adanya peningkatan pendapatan yang diikuti tingkat kesejahteraan dan sekaligus terciptanya pemerataan yang lebih baik otomatis akan mengurangi timbulnya kesenjangan ekonomi antar pelaku yang terlibat dalam kemitraan yang pada gilirannya mampu meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

5. Gapoktan dalam Perspektif *Partnership*

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dalam satu kawasan desa dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. GAPOKTAN merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani. Tujuan

penggabungan kelompok menjadi GAPOKTAN dalam Permentan Nomor 273 Tahun 2007 adalah untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam posisi tawar. (Permentan Nomor 16 Tahun 2008). Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan langkah terobosan Departemen Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementerian/ Lembaga lain dibawah payung program PNPM Mandiri.

Dalam rangka mempercepat keberhasilan PUAP diperlukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui:

1. Pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan melalui peningkatan kualitas SDM
2. Penguatan modal bagi petani, buruhtani dan rumah tangga tani
3. Penguasaan teknologi produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan nilai tambah.

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan, “kelompok tani” adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam

memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan uraian diatas Gapoktan mempunyai peran untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, pemasaran serta kerjasama dalam posisi tawar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Karena itu akhirnya Pemerintah melalui Gapoktan bermitra dengan Unilever dengan tujuan agar bisa memberdayakan masyarakat terutama petani agar kondisi sosial dan ekonomi mereka lebih baik, mereka lebih berdaya.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi Publik merupakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.. Tujuan untuk kepentingan masyarakat tersebut sesuai pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan sendiri merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tercipta pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good governance*. *Good Governance* sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat.

Akan tetapi dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan tersebut terdapat kendala yaitu adanya kemiskinan, khususnya di perdesaan. Kemiskinan

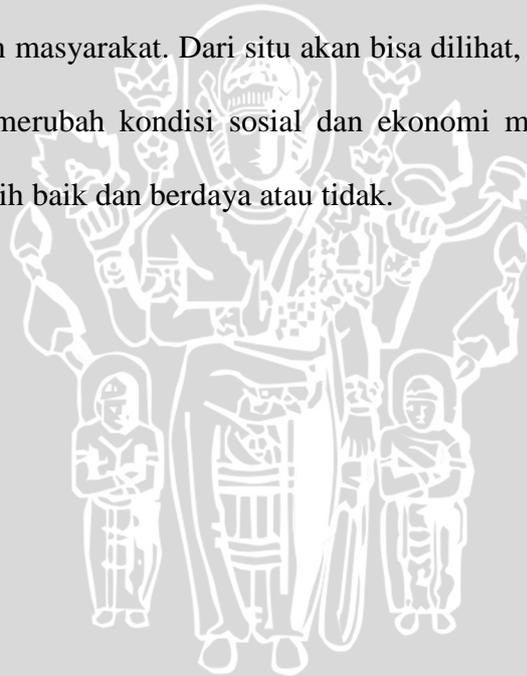
yang terjadi di perdesaan membutuhkan intervensi pemberdayaan, khususnya pemberdayaan ekonomi agar masyarakat sejahtera dan pemberdayaan sosial agar SDM mereka lebih maju.

Terkait dengan adanya kemiskinan tersebut, maka pada Presiden RI mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan Permentan Nomor 273 Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani, Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan, yaitu dengan membentuk Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan program yang disebut dengan GAPOKTAN PUAP.

Pemerintah menganjurkan untuk membentuk dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan, serta menciptakan program-program pemberdayaan adalah sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, dan memberdayakan masyarakat. Program tersebut juga dilaksanakan di Desa Pringkuku, kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Adanya dana PUAP diakui bisa membantu petani mendapat pinjaman untuk membeli pupuk, namun program Gapoktan PUAP ternyata belum sepenuhnya mampu memberdayakan petani dari segi sosial, ekonomi, dan juga dalam hal pemasaran hasil produksi pertanian mereka.

Kemudian di tahun 2008 Unilever menawarkan untuk bermitra dalam program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam). Kedelai hitam tersebut digunakan sebagai bahan dasar produksi kecap “BANGO” oleh PT Unilever. Setelah melalui proses panjang akhirnya Gapoktan Rejo Mulyo Desa Pringkuku dan Unilever sepakat mengadakan kemitraan.

Dari *partnership* tersebut akan bisa dilihat bagaimana peran stakeholder, dalam memberdayakan masyarakat, bagaimana proses pelaksanaan kemitraan Gapoktan dengan Unilever, apa sajakah dampak dari adanya *partnership* tersebut dalam memberdayakan masyarakat. Dari situ akan bisa dilihat, kemitraan tersebut bermanfaat dan bisa merubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Pringkuku menjadi lebih baik dan berdaya atau tidak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sebuah proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan metode ilmiah serta aturan- aturan yang berlaku. Untuk menerapkan suatu metode ilmiah serta aturan- aturan yang berlaku. Untuk menerapkan suatu metode ilmiah dalam praktek penelitian maka diperlukan suatu desain penelitian, yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam atau dangkalnya penelitian yang akan dilakukan. Rancangan atau desain penelitian merupakan rencana atau pola yang akan diikuti dalam melaksanakan penelitian, termasuk analisisnya.

Metode penelitian adalah alat-alat untuk memandu peneliti tentang bagaimana penelitian dilakukan untuk membantu peneliti agar dapat memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian metode penelitian dapat dikatakan sebagai cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan ilmiah yang berupa penyelidikan yang dilakukan secara berhati-hati melalui pengumpulan data yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan. Nasir (2005:51)

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat sifat atau sesuatu yang tengah terjadi dan

berlangsung pada penelitian. Alasan penulis menggunakan penelitian jenis deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena. Nazir (2005 : 54) mendefinisikan metode penelitian deskriptif sebagai:

“Suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi sistem, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat antar fenomena yang diselidiki”.

Sedangkan menurut Whitney dalam Nazir (2005 : 54-55) metode deskriptif adalah:

“Pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2009:8) menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi”.

Penggunaan metode deskriptif adalah merupakan upaya untuk menggambarkan apa yang terjadi termasuk siapa, kapan, di mana atau berhubungan dengan karakteristik suatu gejala masalah sosial, baik pola, bentuk, ukuran, maupun distribusi objek penelitian. Sejalan dengan tujuan penelitian, maka metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan *partnership*

GAPOKTAN Desa Pringkuku dengan PT Unilever sebagai upaya memberdayakan masyarakat dari segi sosial dan ekonomi.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi objek kajian agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan, dan untuk menghindari dari data yang tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Spradley (dalam Sugiyono, 2008: 377-379) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Spradley juga mengungkapkan empat alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu :

- a. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan, seperti tokoh masyarakat.
- b. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu *organizing domain* , seperti kebijakan pemerintah.
- c. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada.
- d. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu ingin melengkapi dan memperluas teori yang sudah ada.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Peran *stakeholder* dalam memberdayakan masyarakat Desa Pringkuku.
 - a. Peran Pemerintah (Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan)
 - b. Peran Swasta (Unilever)
 - c. Peran Masyarakat (petani Desa Pringkuku)
2. Proses kemitraan *stakeholder* dalam Program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam) di Desa Pringkuku.
 - a. Persiapan Dinas Tanaman Pangan Gapoktan dalam kemitraan dengan Unilever
 - b. Pelaksanaan kemitraan Gapoktan Rejo Mulyo dengan Unilever di Desa Pringkuku.
3. Dampak kemitraan *stakeholder* bagi pemberdayaan masyarakat Desa Pringkuku dalam perubahan:
 1. Dari Segi Sosial
 2. Dari segi ekonomi

C. Lokasi dan Situs Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah, dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pringkuku, Kecamatan

Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Di Desa Pringkuku sebagian besar penduduknya adalah petani, dan kesejahteraan petani di Desa Pringkuku memprihatinkan. Dimana di Desa Pringkuku ini penduduk miskinnya mencapai 56,12 persen atau dari jumlah penduduk yang berjumlah 3682 jiwa, atau 554 kk dari 987 kk masih dalam kondisi miskin.
- b. Kemitraan dengan Unilever ini adalah kemitraan yang pertama kali ada di Desa Pringkuku, karena itu peneliti tertarik apakah kemitraan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa Pringkuku atau tidak.

2. Situs Penelitian

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Oleh karena itu yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Kantor GAPOKTAN Desa Pringkuku, Kantor Desa Pringkuku, dan Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan. Dengan demikian penelitian terhadap situs ini didasarkan pertimbangan bahwa lokasi atau tempat tersebut memungkinkan untuk diperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

D. Sumber Data

Keberadaan sumber data memang memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Menurut Arikunto (2006:129) bahwa: “Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh”. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Sumber data dalam penelitian, baik primer maupun sekunder merupakan objek dari data yang diperoleh, atau subjek di mana data melekat.

Sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh untuk mempermudah dalam pengklarifikasian data, maka sumber data dapat diidentifikasi menjadi 3 macam yang lebih dikenal dengan 3P, menurut Arikunto (2006: 129) yaitu:

- a. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan, atau jawaban yang tertulis melalui angket/kuisisioner. Oleh karena itu sumber data ini adalah berupa orang per orang yang dapat dijadikan sumber penelitian melalui wawancara.
- b. *Place*, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Hal ini berkaitan dengan lokasi dan objek penelitian yaitu Desa Pringkuku.
- c. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dalam penelitian ini data yang

digunakan adalah data dan arsip yang berada di Kantor GAPOKTAN Desa Pringkuku, dan Kantor Desa Pringkuku.

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, menurut Sugiyono (2009: 225) sumber data dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data informan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penyuluh Pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
 - b. Project Manager Yayasan Unilever
 - c. Asisten Lapang dari Yayasan Unilever
 - d. Pengurus Gapoktan
 - e. Kepala Desa Pringkuku
 - f. Masyarakat Desa Pringkuku
2. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperlukan serta dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Gambaran Umum mengenai wilayah Desa Pringkuku, meliputi kondisi geografis, kependudukan, dan data pemerintahan.

- b. Gambaran mengenai GAPOKTAN dan pelaksanaan partnership dengan Unilever di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang bahkan merupakan pendukung utama dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2006). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Merupakan suatu proses mencari atau memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informann, dengan maksud agar mendapatkan data-data, keterangan-keterangan, pandangan maupun pendapat responden agar diperoleh kebenaran yang valid dan relevan. Menurut Sugiyono (2009: 231),

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil”.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan tentang hal- hal yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian informasi yang didapatkan tersebut dikembangkan lebih lanjut selama dan setelah wawancara berlangsung. Dalam penelitian di lapangan bisa jadi jumlah informan bertambah karena perkembangan hasil wawancara untuk memperoleh informasi yang dianggap berkaitan dengan penelitian.

2. Observasi

Merupakan cara memperoleh data dengan cara dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan melakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini bertujuan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Penggunaan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen tertulis (peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan ketentuan lain) sebagai bahan referensi dan komparasi. Dokumen-dokumen tersebut tentunya yang berhubungan dengan *partnership* GAPOKTAN dengan Unilever.

F. Instrumen Penelitian

Berdasarkan teknik pengumpulan data di atas maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010:306) bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Dengan berperan sebagai instrumen utama, diharapkan peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang sedang terjadi mengenai apa yang diteliti di saat itu. Peneliti menggunakan alat panca inderanya untuk melakukan pengamatan langsung fenomena-fenomena yang sedang terjadi di lapangan.
- b. Pedoman Wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara
- c. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan pikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan *tape recorder*, agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

G. Analisis Data

Penelitian diadakan dengan tujuan pokok adalah menjawab pertanyaan peneliti untuk mengungkapkan fenomena sosial atau cara untuk mencapai tujuan pokok itu dengan mengadakan analisis data terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang didapat di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dan

uraian. Analisis data dalam penelitian kualitatif harus mulai sejak awal. Data yang diperoleh di lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis.

Menurut Sugiyono (2009:244),

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Selain itu, tokoh penelitian kualitatif Bogdan dan Biklen dalam Kasiram (2008:301) mendefinisikan: “Analisis data adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.”

Morse dan Field mencatat bahwa analisis kualitatif adalah proses tentang pencocokan data bersama-sama, bagaimana membuat yang samar menjadi nyata, menghubungkan akibat dengan sebab. Yang merupakan suatu proses verifikasi dan dugaan, koreksi dan modifikasi, usul dan pertahanan. Menurut Morse dan Field (1995: 126-129) terdapat empat proses dalam analisis kualitatif, yaitu:

1. *Comprehending* (Memahami)

Awal proses analitik, peneliti-peneliti kualitatif berusaha untuk bisa mempertimbangkan data dan belajar mencari ”apa yang terjadi.” Bila pemahaman dicapai, peneliti bisa menyiapkan cara deskripsi peristiwa, dan data baru tidak ditambahkan dalam uraian. Dengan kata lain, pemahaman diselesaikan bila kejenuhan telah dicapai. Jadi pada tahap ini peneliti

mengenali data yang baru dan menarik yang mungkin masuk atau data yang sebelumnya sudah ada.

2. *Synthesizing* (Sintesis)

Sintesis meliputi penyaringan data dan menyatukannya. Pada langkah ini, peneliti mendapatkan pengertian dari apa yang “khas” mengenai suatu peristiwa dan apa variasi dan cakupannya. Pada akhir proses sintesis, peneliti dapat mulai membuat pernyataan umum tentang peristiwa mengenai peserta studi.

3. *Theorizing* (Teoritis)

Merupakan fase pemisahan dimana terjadi seleksi dan pencocokan secara sistematis dari model-model terpilih ke dalam data. Selama proses teori, peneliti mengembangkan penjelasan alternatif dari peristiwa dan kemudian menjaga penjelasan ini sampai menentukan apakah “cocok” dengan data. Proses teoritis dilanjutkan untuk dikembangkan sampai yang terbaik dan penjelasan paling hemat diperoleh.

4. *Recontextualizing* (Rekontekstualisasi)

Proses dari rekontekstualisasi meliputi pengembangan teori lebih lanjut dan aplikabilitas untuk kelompok lain yang diselidiki. Di dalam pemeriksaan terakhir pengembangan teori, adalah teori harus generalisasi dan sesuai konteks.

Bertitik tolak dari pendapat Morse dan Field diatas, maka analisis data yang akan diterapkan oleh peneliti yang pertama dengan memahami dan mempelajari hal-hal dan peristiwa yang ada dilokasi penelitian, yang berkaitan

dengan kemitraan Gapoktan dengan Unilever. Setelah itu, peneliti dapat memulai untuk mencari data dan menyaringnya baik melalui wawancara maupun data dari hasil pengamatan dan dokumentasi, sehingga diperoleh data-data secara umum tentang peristiwa yang diamati peneliti. Data-data yang telah diperoleh mulai dipilah-pilah dan dicocokkan dengan teori yang ada. Setelah itu, teori dan data yang diperoleh akan dikembangkan lagi menjadi lebih sederhana namun informatif sehingga menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama penelitian, peneliti melakukan pengecekan data dengan berupaya untuk membandingkan data yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Dalam hal ini peneliti akan memadukan data hasil wawancara dengan pihak dinas tanaman pangan dan peternakan, pengurus gapoktan, asisten lapang unilever, kepala desa dan masyarakat Desa Pringkuku, dengan data dokumentasi. Selain itu, peneliti juga akan berusaha menjaga keteralihan data dengan cara mencatat setiap informasi yang diterima dan juga menghindari subjektivitas data sehingga data yang diperoleh adalah murni.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan secara geografis terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur, dengan batas wilayah:

- Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur)
- Timur : Kabupaten Trenggalek (Jawa timur)
- Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Selatan : Samudera Indonesia

Kabupaten Pacitan terletak pada $7,55^{\circ}$ sampai $8,17^{\circ}$ lintang selatan dan $110,55^{\circ}$ sampai $111,25^{\circ}$ bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Pacitan adalah $1.389,87 \text{ km}^2$ dengan wilayah terluas berjenis tanah kering seluas $1.259,72 \text{ km}^2$ atau sekitar 90.64 persen dari total wilayah Pacitan. Dan sisanya berjenis tanah sawah dengan luas $130,15 \text{ km}^2$ atau sekitar 9,36 persen. Wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa bukit dan gunung, jurang terjal dan termasuk deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Pulau Jawa.

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan

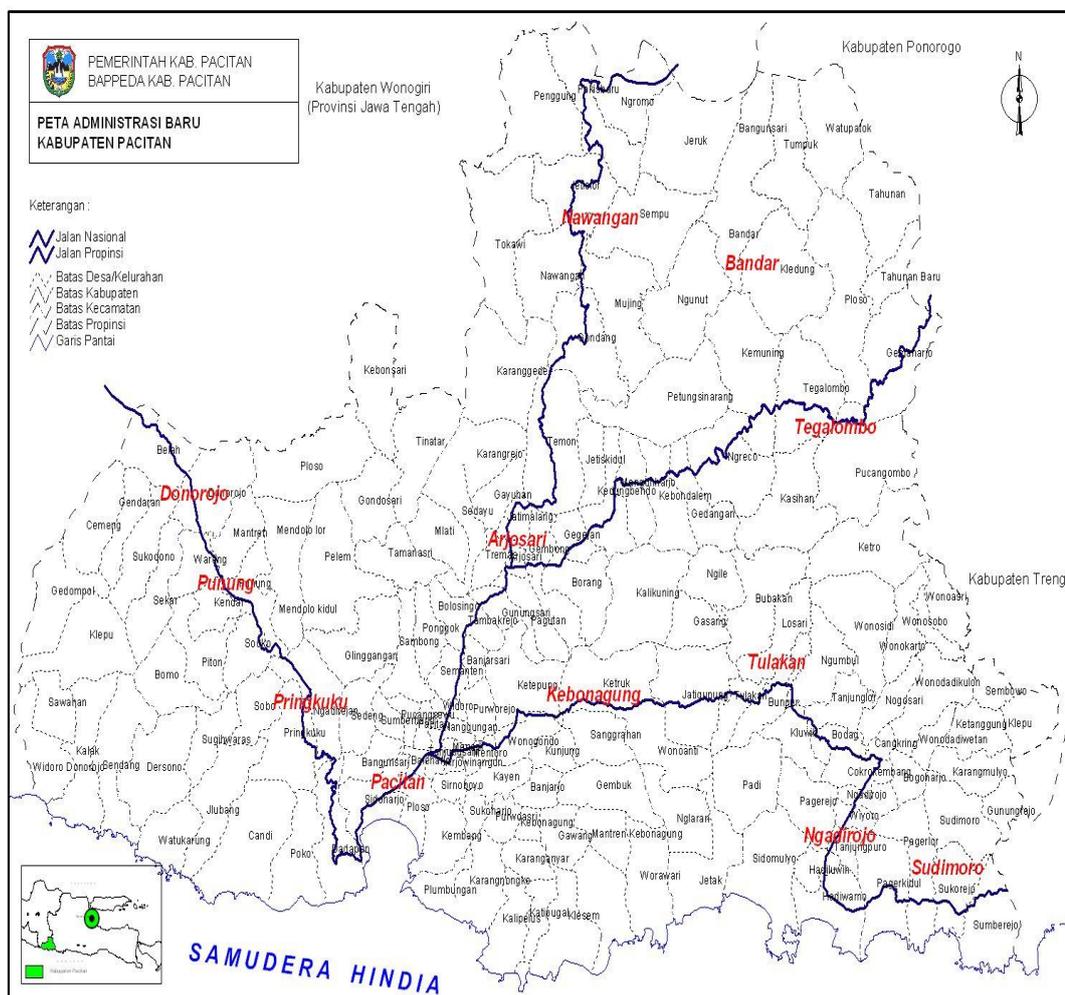
1. Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
2. Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
3. Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
4. Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm³, suhu udara berkisar antara 22,6°C sampai dengan 32,1°C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%. Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Tanah ladang | : 21,51 % atau 29.890,58 ha |
| 2. Pemukiman Penduduk | : 02,27 % atau 3.153,33 ha |
| 3. Hutan | : 58,56 % atau 81.397 ha |
| 4. Sawah | : 09,36 % atau 13.014,26 ha |
| 5. Pesisir dan tanah kosong | : 08,29 % atau 11.530,99 ha |

Berdasarkan fungsi kawasan di Kabupaten Pacitan yang terbagi atas 2 (dua) kawasan yaitu kawasan budi daya dan kawasan lindung. Kawasan budi daya yang terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan lahan kering, kawasan perikanan, kawasan perkebunan, kawasan perternakan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perindustrian dan kawasan pertambangan. Sedangkan Kawasan Lindung yang meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan lindung yang senantiasa dikawal dengan kegiatan yang diarahkan untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak keseimbangan alam sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga.

Lahan kritis di Kabupaten Pacitan pada tahun 2006 seluas 27.170,10 ha dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi seluas 24.843,04 ha penurunan ini dapat menahan laju lahan kritis baru yang semakin maraknya pemanfaatan hutan rakyat yang kurang terkendali. Kondisi lahan yang demikian banyak menyebabkan timbulnya potensi bencana tanah longsor, banjir. Selain hal tersebut potensi rawan bencana di kabupaten Pacitan antara lain gempa bumi, angin puting beliung, gelombang pasang air laut, kekeringan dan kebakaran hutan.

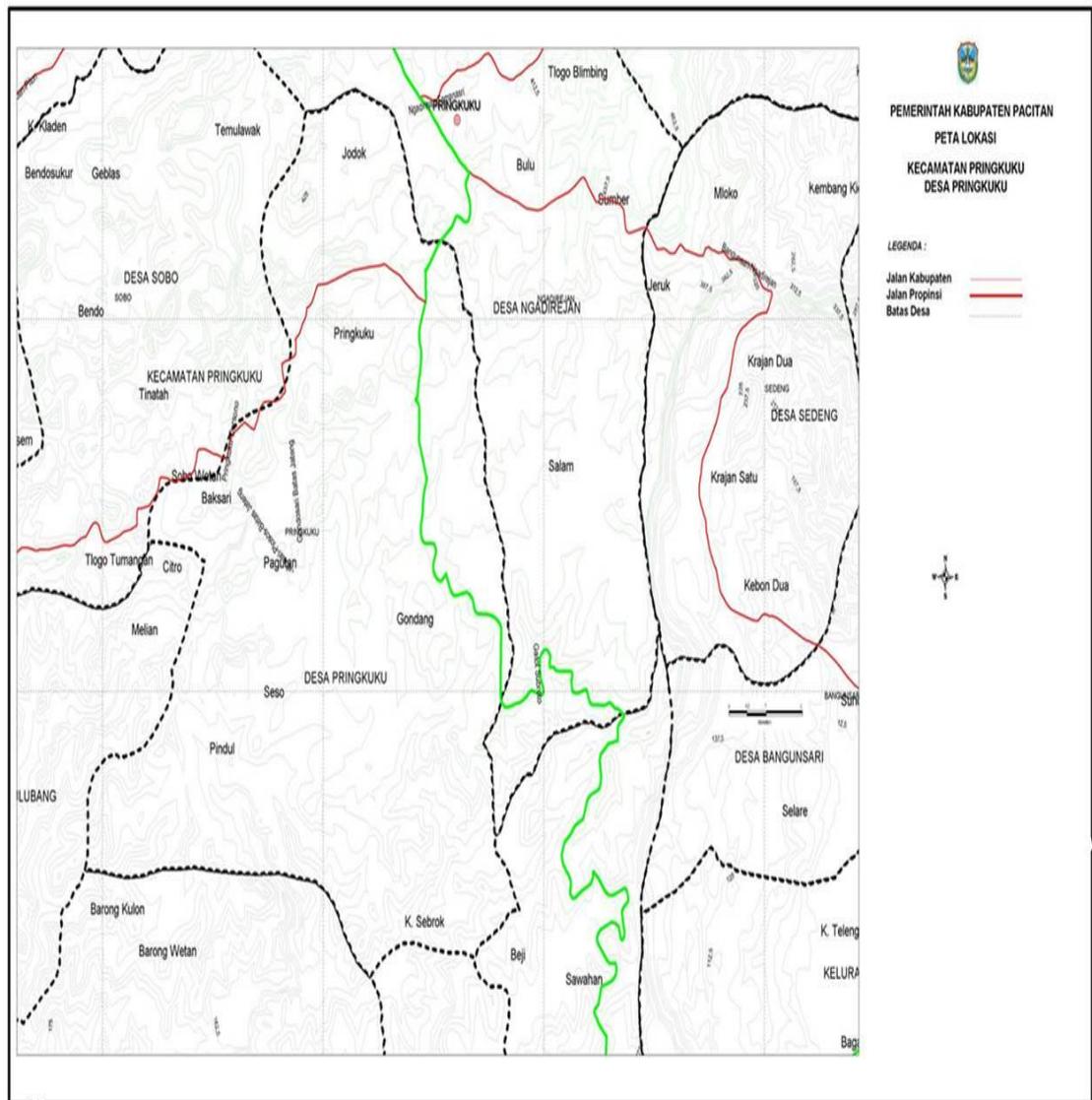


Gambar 5
Peta Kabupaten Pacitan

Wilayah administrasi kabupaten Pacitan terbagi dalam 12 kecamatan, 166 desa, 5 kelurahan, 1.613 rukun warga (RW), dan 5.166 rukun tetangga (RT). Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 540.881 jiwa. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan lapangan pekerjaan utama penduduk Pacitan. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 59,40 %. kedua



adalah sektor industry sebesar 13,48 %, dan ketiga adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan presentase sebesar 11,93 %.



Gambar 6
 Peta Kecamatan Pringkuwu

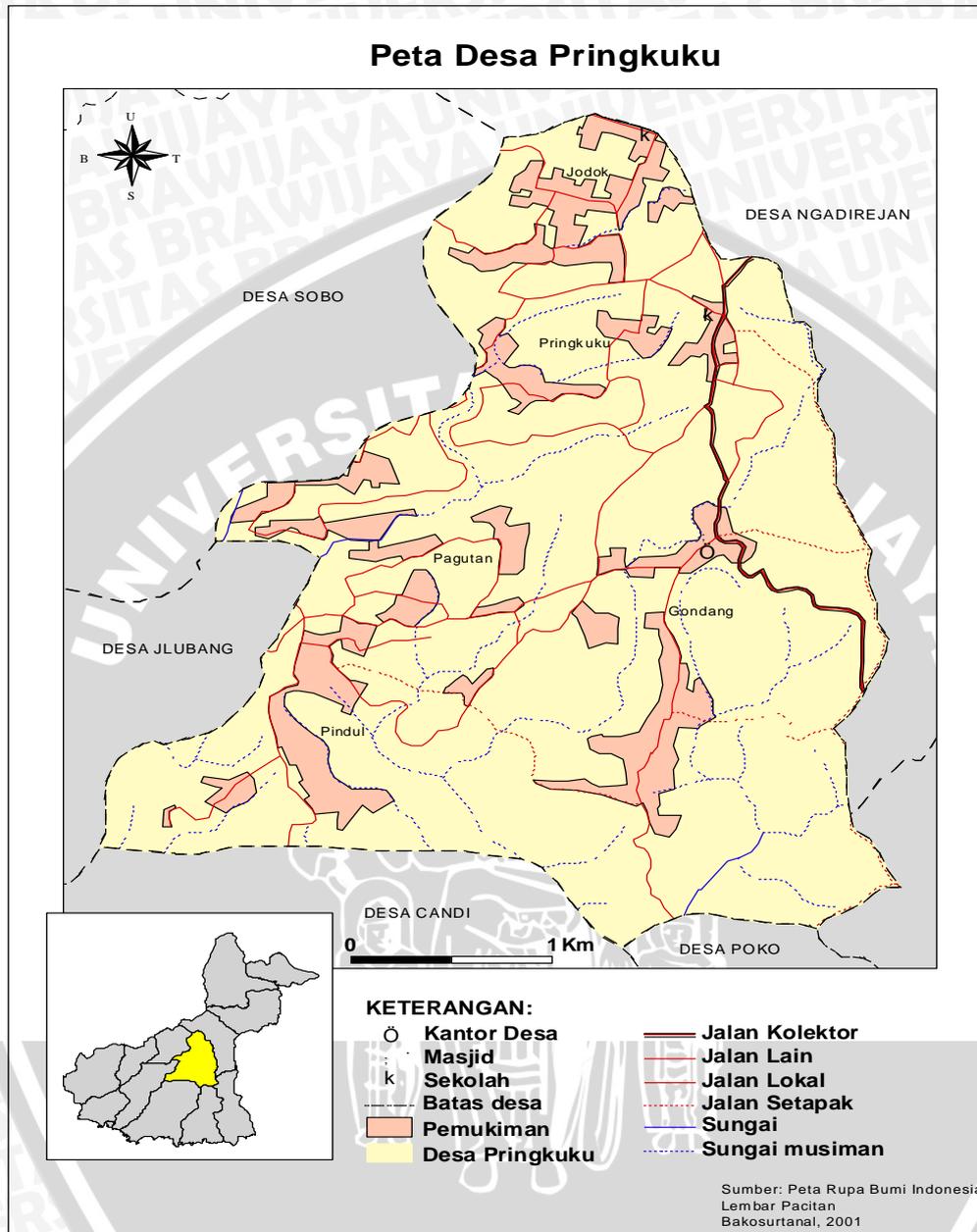
2. Gambaran Umum Desa Pringkuku

a. Keadaan Geografis

Desa Pringkuku adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Orbitasi atau jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 3 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 5 menit, sedangkan orbitasi ke Kabupaten Pacitan adalah 10 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit. Batas-batas wilayah Desa Pringkuku adalah:

- Utara : Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku.
- Selatan : Desa Poko, dan Desa Candi, Kecamatan Pringkuku.
- Timur : Desa Dadapn, Kecamatan Pringkuku.
- Barat : Desa Sobo, Desa Jlubang, Kecamatan Pringkuku.

Desa Pringkuku merupakan Desa yang terletak di barat kota Pacitan atau biasa disebut dengan “dureng barata” (Ndhuwur pereng barat kota). Yang maksudnya letaknya di atas pegunungan sebelah baratnya kota Pacitan. Walaupun letaknya di pegunungan namun akses ke Desa Pringkuku bisa dikatakan mudah. Jalan dari kota Pacitan ke Desa Pringkuku sudah banyak diperbaiki, dan angkutan umum menuju Desa Pringkuku juga tersedia. Namun jalan menuju dusun-dusun di Desa Pringkuku belum semuanya di aspal dan belum ada angkutan umum antar dusun. Adanya angkutan umum hanya pada waktu “pasar” saja, atau waktu pasar kecamatan buka, yaitu pada hari pasaran pon dan kliwon. Itupun tidak banyak, karena angkutan umum itu kebanyakan hanya menjemput pedagang yang akan berjualan di pasar.



Gambar 7
Peta Desa Pringkuku

Jumlah Dusun yang ada di Desa Pringkuku adalah 7 Dusun, yaitu:

1. Dusun Pringkuku
2. Dusun Gondang

3. Dusun Jodog
4. Dusun Pagutan
5. Dusun Baksari
6. Dusun Pindul
7. Dusun Seso.

Luas wilayah desa adalah 1.167,82 Ha dimana lahan yang ada telah difungsikan sebagai berikut:

Tabel 4
Komposisi Penggunaan Lahan

No	Penggunaan	Jumlah	Prosentase
1	Pemukiman	44,44 ha	3,80 %
2	Tanah Sawah	73,32 ha	6,28 %
3	Tegal/Ladang	659,26 ha	56,45 %
4	Pekarangan	11,20 ha	0,95 %
5	Perkebunan rakyat	250,00 ha	21,41 %
6	Kuburan Desa	3,50 ha	0,30 %
7	Perkantoran	0,25 ha	0,02 %
8	Bangunan Sekolah	1,75 ha	0,15 %
9	Jalan	3,50 ha	0,30 %
10	Lapangan Olahraga	1,00 ha	0,10 %
11	Tanah Kas Desa	7,50 ha	0,64 %
12	Hutan Rakyat	112,10 ha	9,60 %
		1167,82 ha	100,00 %

Sumber : Daftar Isian Profil Desa Pringkuku Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas desa Pringkuku adalah 1167, 82, dengan komposisi penggunaan lahan sebagai berikut: lahan yang digunakan untuk pemukiman di Desa Pringkuku seluas 44,44 Ha, sawah 72, 32 Ha, tegal/ladang

179,26 ha, pekarangan 11,20 ha, perkebunan rakyat 730 ha, kuburan desa 3,50 ha, perkantoran 0,25 ha, bangunan sekolah 1,75 ha, jalan 3,50 ha, lapangan olahraga 1,00 ha, tanah kas desa 7,50 ha, serta lahan yang digunakan untuk hutan rakyat 112,10 ha.

Tingkat kesuburan tanah rata-rata Desa Pringkuku adalah rendah atau tidak subur. Dari luas Desa Pringkuku 1167,82 tanah suburnya (tanah sawah) hanya seluas 73,32. Sisanya adalah tanah kering yang berupa tegal/ladang, tanah yang digunakan untuk pemukiman, perkebunan, dan hutan.

Sementara itu curah hujan rata-rata 7 bulan per tahun dengan curah hujan rata-rata 138 mm³. Topografi lahan di wilayah tersebut merupakan dataran tinggi dan perbukitan dimana wilayah dataran tinggi adalah 875,86 Ha dan perbukitan yaitu 291,96 Ha dari total luas wilayah Desa Pringkuku. Tinggi Desa Pringkuku dari permukaan laut adalah 337 m.

b. Kondisi Demografi

Menurut Data Profil Desa Pringkuku pada Tahun 2011, total jumlah penduduk desa adalah 3823 jiwa, dengan komposisi jumlah laki-laki 1841 orang atau 48,16% dan perempuan 1982 orang atau 51,84%. Komposisi penduduk berdasarkan usia di Desa Pringkuku secara berurutan adalah:

Tabel 5
Komposisi Usia Penduduk

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-12 bulan	146	3,82 %
2	1-15 Tahun	734	19,20 %
3	16-25 Tahun	573	14,99 %
4	26-35 Tahun	539	14,10 %
5	36-45 Tahun	529	13,84 %
6	46-55 Tahun	444	11,61%
7	≥ 56 Tahun	858	22,44 %
	Jumlah	3823	100,00 %

Sumber : Sumber : Daftar Isian Profil Desa Pringkuku Tahun 2011

Penduduk berusia 0-12 bulan berjumlah 146 orang, penduduk berusia 1-15 berjumlah 734 orang, 16-25 tahun sebanyak 537 orang, penduduk berusia 26 sampai 35 tahun sebanyak 539 orang, penduduk berusia 36-45 tahun sebanyak 529 orang, penduduk berusia 46-55 tahun berjumlah 444 orang, sisanya penduduk berusia diatas 56 tahun yaitu 858 orang.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Pringkuku adalah prasarana pendidikan, perhubungan darat, transportasi, pemerintahan desa, sosial dan prasarana umum lainnya.

Tingkat pendidikan penduduk desa Pringkuku sangat rendah bahkan masih ada yang buta huruf, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Belum sekolah / Anak-anak 0-2 tahun	229	6,00 %
2	Tidak sekolah (Buta huruf)	4	0,10 %
3	Usia 3-6 tahun yang sedang Playgroup/TK	168	4,40 %
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	595	15,56 %
5	Tidak tamat SD	7	0,18 %
6	Tamat SD / sederajat	1290	33,74 %
7	Tamat SMP / sederajat	642	16,80 %
8	Tamat SMA / sederajat	705	18,44 %
9	Tamat D1, D2, D3	54	1,41 %
10	Tamat S1	125	3,27 %
11	Tamat S2	2	0,05 %
12	Tamat SLB C (Tuna Grahita/ mental)	2	0,05 %
	Jumlah	3823	100,00 %

Sumber : Daftar Isian Profil Desa Pringkuku Tahun 2011

Tingkat pendidikan penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa berpendidikan rendah yakni sebanyak 1290 orang hanya tamat SD, sebanyak 7 orang tidak tamat SD, sebanyak 4 orang masih buta huruf dan 2 orang lulus SLB C (tuna mental). Sedangkan penduduk yang berpendidikan menengah sampai tinggi yaitu S2 hanya 2 orang, S1 125 orang, Diploma 54 orang, lulus SLTA 705 orang, yang lulus SMP 642 orang. Sedangkan yang sedang menempuh pendidikan adalah, Playgroup dan TK sebanyak 168, yang sedang menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, adalah 595 orang, dan sisanya adalah anak-anak yang belum sekolah sebanyak 229 orang.

Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia adalah 7 Playgroup, 2 Taman Kanak-Kanak (TK), 3 sekolah dasar (SD), dan 1 Madrasah Ibtidayah (MI). Sarana dan prasarana perhubungan darat adalah jalan diaspal 5,5 Km, jalan makadam 14 Km, jalan Rabat 1 Km, , jembatan beton 4 unit. Panjang jalan di Desa Pringkuku adalah 25,5 Km. Sarana dan prasarana transportasi adalah kendaraan umum roda 4 dan sepeda motor. Untuk sarana dan prasarana pemerintahan desa memiliki gedung kantor desa atau yang disebut dengan balai desa. Tersedia peralatan berupa 9 meja, 21 kursi, 2 mesin tik, 1 computer, 1 printer, kalkulator, 2 lemari arsip, 1 papan penyajian data, 2 kendaraan dinas, dan penerangan listrik. Terdapat ruang kepala desa, ruang sekretaris desa, ruang pertemuan, panggung, gudang, maupun toilet.

d. Kondisi Sosial Ekonomi

Untuk kondisi sosial ibadah agama sudah mencukupi yakni ada masjid, mushola dan Gereja. Dimana jumlah masjid dan mushola ada 22 buah, dan Gereja Khatolik sebanyak 1 buah. Keragaman pemeluk agama di desa Pringkuku dapat terlihat dari jumlah penduduk menurut agama, masing masing.

Tabel 7
Jumlah Pemeluk Agama Desa Pringkuku

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	3819	99,90 %
2	Kristen	1	0.03 %
3	Katolik	3	0,07 %
	Jumlah	3823	100,00%

Sumber : Daftar Isian Profil Desa Pringkuku Tahun 2011

Keragaman berbagai pemeluk agama dengan jumlah yang relatif tidak berimbang antara muslim dan non muslim, tetap saja menjadikan kehidupan masyarakat desa memiliki toleransi yang tinggi satu dengan yang lain. Lebih-lebih lagi peran kebersamaan dalam gotong royong. Salah satu ciri khas yang dimiliki di hampir seluruh kawasan desa Indonesia adalah gotong-royong. Di Desa Pringkuku sendiri gotong royong itu masih ada, terutama ketika ada saah satu masyarakat yang punya hajat, atau sedang tertimpa musibah. Masyarakat di sekitarnya (tetangga) akan membantu meringankan bebannya tanpa pamrih. Ini sangat berbeda dengan kehidupan di kota yang individualisme.

Dilihat dari kondisi perekonomian, penduduk miskin Desa Pringkuku masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 8
Tingkat Kesejahteraan Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah KK	Prosentase
1.	Keluarga Pra Sejahtera	501	49,21 %
2.	Keluarga Sejahtera I	53	5,20 %
3.	Keluarga Sejahtera II	61	5,99 %
4.	Keluarga Sejahtera III	399	39,20 %
5.	Keluarga Sejahtera III Plus	4	0,40 %
	Jumlah	1018	100,00 %

Sumber : Daftar Isian Profil Desa Pringkuku Tahun 2011

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Pringkuku adalah 1018 KK. dengan rincian sebagai berikut : keluarga pra sejahtera 501 KK, keluarga sejahtera

I53KK, keluarga sejahtera II 61 KK, keluarga sejahtera III 399 KK, dan keluarga sejahtera III Plus 4 KK.

Tabel 9
Komposisi Penduduk Usia Kerja

No	Angkatan Kerja	Jumlah	Prosentase
1	Penduduk usia 0-6 tahun	394 orang	10,31 %
2	Penduduk yang masih sekolah 7-18 th	701 orang	18,34 %
3	Pengangguran (18-56 Tahun)	287 orang	7,51 %
3	Angkatan Kerja (18-56 Tahun)	1610 orang	42,11 %
4	Purna Kerja (> 56 Tahun)	831 orang	21,73 %
	Jumlah	3823 orang	100,00 %

Sumber : Daftar Isian Profil Desa Pringkuku Tahun 2011

Jumlah angkatan kerja adalah 1610 orang atau 42,11 % dari total penduduk yang berjumlah 3823 orang. Anak-anak usia 0-6 tahun berjumlah 394 orang, penduduk yang masih bersekolah 701 orang, dan penduduk berusia lanjut (diatas 56 tahun) adalah 831 orang . Dari jumlah angkatan kerja yang ada, orang yang merupakan pengangguran berjumlah 287 orang atau 7, 51 % dari total jumlah penduduk.

Tabel 10
Kualitas Angkatan Kerja

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Angkatan Kerja Tidak Tamat SD	2	0,12 %
2.	Angkatan Kerja Tamat SD	605	37,58 %
3.	Angkatan kerja Tamat SLTP	411	25,53 %
4.	Angkatan Kerja Tamat SLTA	416	25,84 %
5.	Angkatan Kerja Tamat DIPLOMA	53	3,30 %
6.	Angkatan Kerja Tamat S-1	121	7,51 %
7.	Angkatan Kerja Tamat S-2	2	0,12 %
	Jumlah	1610	100,00 %

Sumber : Daftar Isian Profil Desa Pringkuku 2011

Sebagian besar angkatan kerja yang ada di Desa Pringkuku hanya tamat SD yaitu sebanyak 605 orang. Pada usia produktif ini pemerintah harus lebih memperhatikan karena pada usia produktif masih banyak yang tidak mempunyai pekerjaan.

Tabel 11
Komposisi Pekerjaan Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani	1246	77,40%
2	PNS/TNI/POLRI	56	3,47 %
3	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	41	2,55 %
4	Pekerja Sektor Nonformal	267	16,58 %
	Jumlah	1610	100,00 %

Sumber : Daftar Isian Profil Desa Pringkuku Tahun 2011

Sementara itu dari angkatan kerja yang ada sebagian besar bekerja sebagai petani yaitu 1247 orang, pekerja sektor non formal seperti pemilik usaha jasa transportasi, pedagang, tukang, pengrajin, sopir, pekerja seni dan lain-lain adalah 267, PNS/TNI/POLRI sebanyak 56 orang sedangkan sisanya pensiunan PNS/ABRI/ POLRI atau sebanyak 41 orang.

e. Potensi Desa Pringkuku

Sumber daya alam yang ada di Desa Pringkuku diantaranya adalah sumber daya pertanian dari sawah, tegal/ladang, perkebunan rakyat dan hutan rakyat. Sedangkan hasil hutan yang dimiliki adalah kayu berbagai jenis seperti jati, sengon, mahoni, akasia dan lain-lain serta bambu. Tetapi sampai saat ini belum tercatat berapa jumlah panen per tahun yang dimiliki di Desa Pringkuku. Sumber daya peternakan di Desa Pringkuku adalah peternakan kambing, ayam buras, sapi, dan itik. Sumber daya perindustrian yang ada adalah kerajinan dari kayu dan bambu yaitu sebanyak industri kecil dan industri rumah tangga. Tetapi sampai saat ini belum tercatat berapa pendapatan dari sektor industri di Desa Pringkuku. Hasil pertanian, dan perkebunan, pada tahun 2011 terperinci dalam tabel berikut.

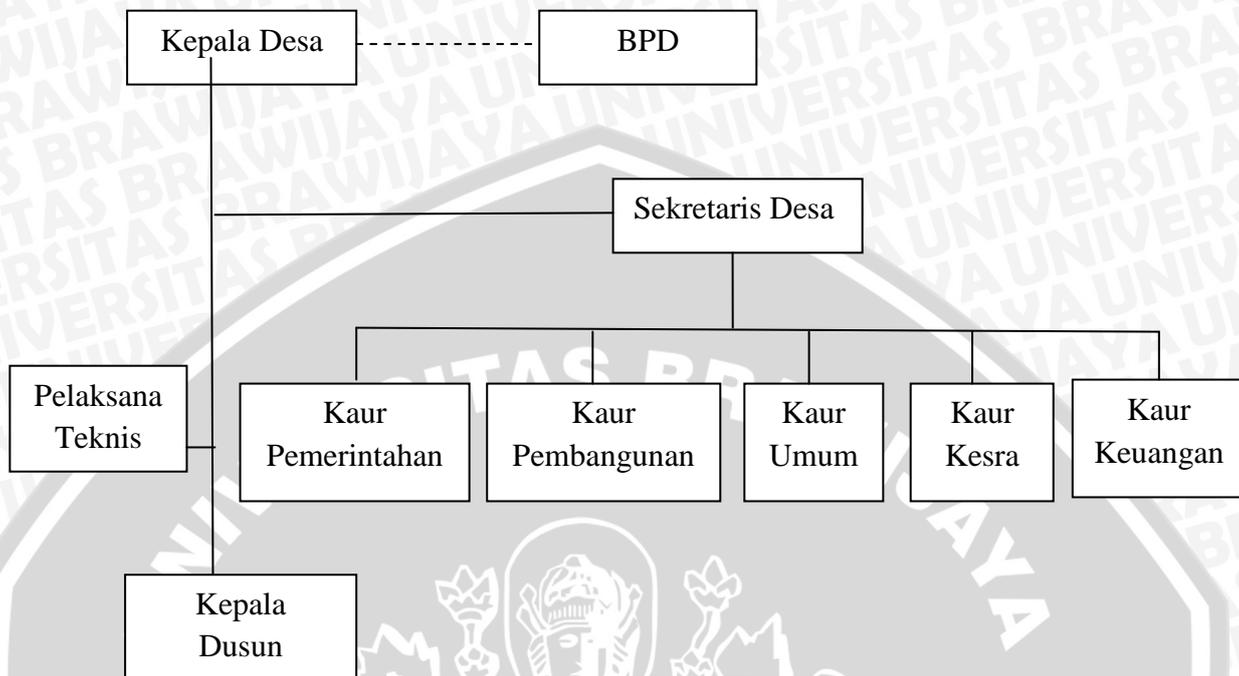
Tabel 12
Potensi Sumber Daya Alam

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman	Hasil
1	Hasil Pertanian		
	Kedelai	435,00 ha	1,25 ton/ha
	Kacang tanah	73,00 ha	1,36 ton/ ha
	Jagung	59,00 ha	6,43 ton/ha
	Ubi kayu	75,00 ha	18,89 ton/ha
	Padi	499,00 ha	4,44 ton/ ha
2	Hasil Perkebunan		
	Cengkeh	0,50 ha	1,00 kw/ha
	Tembakau	4,00 ha	0,80 kw/ha
	Kelapa	2,00 ha	9,20 kw/ha
	Kopi	0,50 ha	0,50 kw/ha
	Buah-buahan	243,00 ha	0,75 kw/ha

Sumber : Daftar Isian Profil Desa Pringkuku Tahun 2011

f. Organisasi Perangkat Desa Pringkuku

Sebagaimana biasanya yang terjadi di desa-desa lainnya, desa Pringkuku memiliki pemerintahan desa dengan dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut ini adalah pola organisasi Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Dari bagan tersebut dapat kita lihat bagaimana kegiatan dan pengorganisasian pemerintah Desa Pringkuku.



Keterangan : - - - - - : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando

Sumber : Kantor Desa Pringkuku Tahun 2011

Gambar 8
Bagan Pola Organisasi Desa

Tabel 13
Susunan Aparat Pemerintah Desa Pringkuku

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Sugiyanto	Kepala Desa	S1
2.	Sucipto	BPD	SMA
3.	Hadi Sucipto	Sekretaris Desa	SMA
4.	Sukamto	Kepala Urusan Pemerintahan	SMA
5.	Sugito	Kepala Urusan Pembangunan	SD
6.	Samukin	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	SD
7.	Sutopo	Kepala Urusan Umum	SMA
8.	Muryadi	Kepala Urusan Keuangan	SMA
9.	Agus Supriyanto	Pelaksana Teknis	SMA
10.	Hariyanto	Pelaksana Teknis	SMA

Sumber : Kantor Desa Pringkuku, 2011

Disamping kelembagaan pemerintahan, Desa Pringkuku juga memiliki lembaga kemasyarakatan, seperti LKMD, PKK, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dasa wisma, karang taruna Doreng Barata, kelompok tani, kelompok keamanan desa. Keseluruhan fungsi kelembagaan pemerintahan dan sosial hidup berdampingan dengan keputusan tertinggi ada pada rembug desa yang dikuatkan oleh BPD.

3. Gambaran Umum Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi petani diperdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan dibentuk atas dasar:

1. Kepentingan yang sama diantara para anggotanya
2. Berada pada kawasan usahatani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya
3. Mempunyai kader pengelola yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani
4. memiliki kader atau pemimpin diterima oleh petani lainnya
5. Mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya
6. adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat.

a. Tolok Ukur Kapasitas dan Aspek Kelembagaan Gapoktan

Untuk membangun Gapoktan yang ideal sesuai dengan tuntutan organisasi masa depan, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani dalam pembiayaan, dan pemasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman pembinaan kelembagaan petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat

perdesaan. Dalam rangka mengukur kapasitas dan aspek tata kelola organisasi menggunakan ukuran sebagai berikut:

1. Aturan yang dimiliki.

Sejalan dengan strategi pembinaan Gapoktan PUAP untuk ditumbuhkan menjadi LKM-A, maka diperlukan aturan tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota dengan Gapoktan sebagai organisasi. Aturan yang harus dimiliki oleh gapoktan adalah Anggaran Dasar (AD) yang merupakan aturan dasar dari sebuah lembaga gapoktan yang disusun oleh petani pemilik gapoktan dalam menentukan arah dan kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan penjabaran dari anggaran dasar yang memuat aspek: hak dan kewajiban anggota, pengurus dan pengelola; kegiatan usaha, modal dan simpanan anggota, pembinaan dan pengawasan dan lain-lain.

2. Pengelola LKM-A

Pengelola dan pengurus dalam suatu organisasi lembaga keuangan yang sehat sebaiknya terpisah. Secara umum pengurus mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan organisasi, pengawasan, melaporkan perkembangan dan kemajuan organisasi kepada anggota atau pemegang saham. Pengelola merupakan organik pelaksana operasional bisnis keuangan organisasi LKM-A sesuai dengan AD/ART. Pengelola LKMA antara lain terdiri dari Manajer, Pembiayaan, Administrasi Pembukuan, Teller dan penggalangan dana.

3. Rencana Kerja.

Rencana kerja organisasi merupakan rencana bisnis yang telah diputuskan melalui rapat anggota. Pembentukan rencana kerja yang ideal pada umumnya dilaksanakan secara partisipatif. Rencana kerja gapoktan ditetapkan oleh pengurus melalui rapat anggota dan menjadi dasar pengelola dalam pengembangan usaha dan bisnis gapoktan.

4. Rapat anggota secara berkala.

Pertemuan atau rapat anggota yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal merupakan hal dasar yang dapat mengukur kedinamisan pengelolaan Gapoktan sebagai organisasi ekonomi. Tradisi melaksanakan rapat-rapat internal Gapoktan secara teratur menunjukkan kinerja pengelolaan organisasi yang baik sehingga dapat dipastikan seluruh anggota mengetahui kebijakan dan program gapoktan serta langkah-langkah organisasi yang bertujuan untuk memecahkan persoalan anggota.

5. Penyelenggaraan Rapat Anggota (RAT)

Sebagai organisasi yang mempunyai basis dasar hukum koperasi maka penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gapoktan PUAP adalah menjadi ukuran keberhasilan pengelola dalam mengorganisasikan LKM-A sebagai lembaga ekonomi. Jadwal waktu pelaksanaan RAT juga menjadi ukuran keberhasilan pengelola untuk mencapai tujuan organisasi.

6. Badan Hukum

Sebagai lembaga keuangan mikro yang mengelola dana petani dan masyarakat, Badan hukum merupakan persyaratan penting yang harus

dimiliki. Gapoktan yang diproyeksikan menjadi LKM-A disarankan menggunakan dasar hukum Undang Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dan dalam operasionalnya menggunakan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Disamping menggunakan badan hukum koperasi, gapoktan juga dapat menggunakan badan hukum melalui peraturan daerah (perda) walaupun secara teknis belum/tidak dapat dipakai sebagai dasar program linkage dengan perbankan/lembaga keuangan.

b. Klasifikasi Gapoktan PUAP

Gapoktan merupakan kelembagaan ekonomi diperdesaan yang didalamnya bergabung kelompok-kelompok tani. Gapoktan sebagai asset kelembagaan dari Kementerian Pertanian diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat pertanian mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan untuk dapat melayani seluruh kebutuhan petani diperdesaan. Sebagai organisasi ekonomi milik petani diperdesaan, diharapkan gapoktan dapat melayani kebutuhan petani tentang pembiayaan.

Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 273 / Kpts/OT.160 /4/ 2007, telah memberikan arahan bahwa Gapoktan dapat melakukan fungsi-fungsi ekonomi antara lain: unit usaha pengolahan, unit usaha Saprodi, unit usaha Pemasaran, unit usaha Keuangan Mikro sesuai dengan kebutuan dan harus disepakati oleh seluruh anggota gapoktan. Permentan 273, adalah aturan dasar pada Kementerian Pertanian untuk membangun kelembagaan tani berbasis

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam 1(satu) desa, diharapkan gapoktan dapat tumbuh menjadi organisasi tani yang kuat, mandiri sebagai basis pertumbuhan ekonomi perdesaan. PUAP merupakan program strategis Kementerian Pertanian telah menetapkan Gapoktan sebagai pelaksana dan pengelola dana bantuan modal untuk dimanfaatkan membiayai usaha tani anggota secara berkelanjutan. Untuk itu gapoktan pelaksana program PUAP dapat diklasifikasikan sebagai dasar pembinaan organisasi lebih lanjut dalam 3(tiga) strata yaitu :

1. Gapoktan Pemula.

Gapoktan yang baru dibentuk dan dipersiapkan oleh tim teknis kabupaten/kota untuk melaksanakan program PUAP. Sebagai program pemberdayaan Kementerian Pertanian telah melakukan pelatihan kepada pengurus dan pengelola gapoktan. Setelah pelatihan maka dilakukan pendampingan oleh Penyuluh dan PMT dengan maksud dan harapan dana penguatan modal usaha PUAP yang diterima oleh Gapoktan dapat dikelola oleh pengurus untuk dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan petani. Ciri-ciri dasar gapoktan yang dapat diklasifikasikan sebagai gapoktan pemula yang baik antara lain :

- a. Gapoktan dapat mengkoordinasikan anggota untuk memanfaatkan dana penguatan modal usaha PUAP dalam membiayai usaha produktif sesuai dengan usulan. Penyaluran dana telah sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB).

- b. Seluruh anggota sepakat untuk menggulirkan dana dalam bentuk simpan pinjam, serta mempunyai aturan yang disepakati dan diikuti oleh seluruh anggota, namun tidak maksimal dalam mengorganisir dana masyarakat dalam rangka penambahan asset.

2. Gapoktan Madya

Gapoktan Madya merupakan gapoktan pemula yang dibina dan didampingi secara baik oleh tim teknis kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan tingkat keswadayaan kepengurusan dan organisasi serta dana sehingga sudah dapat diproyeksikan pada tahun ke 3 menjadi LKM sesuai struktur kebijakan program PUAP. Ciri-ciri dasar gapoktan yang dapat diklasifikasikan sebagai gapoktan Madya antara lain :

- a. Adanya kesungguhan anggota dan pengurus untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan meningkatkan akumulasi dana keswadayaan dana dari anggota dan meningkatkan laba dari operasional dana bantuan modal usaha PUAP.
- b. Gapoktan telah dapat membagi struktur kepengurusan khusus mengelola dana dalam format simpan pinjam.

3. Gapoktan Utama

Gapoktan Utama adalah gapoktan yang sudah mengelola dan menjaga perguliran dana BLM PUAP serta dana keswadayaan (simpanan anggota) dalam format Usaha Simpan Pinjam (U S/P). Gapoktan Utama yang akan ditumbuhkan menjadi LKM-A diharapkan dapat meningkatkan akumulasi dana sebagai modal dari dana keswadayaan anggota melalui tabungan dan

saham anggota. Ciri-ciri dasar gapoktan yang dapat diklasifikasikan sebagai gapoktan utama antara lain :

- a. Gapoktan secara reguler dan konsisten telah melaksanakan rapat anggota
- b. Sudah membagi kepengurusan unit LKM pada gapoktan dan kepengurusan sebagai pengelola gapoktan
- c. Sudah memiliki aturan organisasi, AD/ART
- d. Memiliki pencatatan/pembukuan dan manajemen yang baik
- e. Sudah menerapkan pola dan sistem pelayanan anggota
- f. Memiliki dana keswadayaan yang tumbuh secara progresif
- g. Sudah memiliki kantor pelayanan sebagai bagian dari sentra pelayanan anggota (sewa/milik sendiri)
- h. Sudah dapat meningkatkan jumlah dana yang dikelola saat ini terdiri dari dana PUAP, Simpanan sukarela, Simpanan (pokok,wajib, ,saham) dan dari laba/ keuntungan usaha

c. Profil Gapoktan Rejo Mulyo Desa Pringku

1. Legitimasi Gapoktan

Gapoktan Rejo Mulyo sebagai lembaga tani desa dibentuk dan didirikan pada tanggal 16 Januari 2007 dengan **Berita Acara Pendirian Nomor: 411.61/04/408.62.2008/2007**, merupakan implementasi dari **UU Nomor 16 tahun 2006**, tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K) Pasal 19, diperkuat dengan **SK Bupati Pacitan Nomor: 188.45/187/408.21/2008 tanggal 26 Mei 2008** tanggal 26 Mei

2008 tentang Pengukuhan Gapoktan, dan diakui keberadaannya dengan **Akta Notaris Yanti Komalawati, SH. Nomor 57 tanggal 16 september 2008.**

2. Keanggotaan dan Wilayah Kerja

a. Keanggotaan:

Pada saat didirikan, Gapoktan beranggotakan 461 orang yang bernaung dibawah 9 Kelompok Tani. Namun dalam perkembangannya, pada akhir tahun 2010 sejumlah 596 orang anggota, dengan 14 Kelompok Tani.

b. Wilayah Kerja:

Sesuai legitimasinya, Gapoktan Rejo Mulyo berwilayah kerja di Desa Pringkuku, meliputi 7 wilayah dusun yaitu dusun, Jodok, Pringkuku, Gondang, Pagutan, Pindul, Baksari, dan Seso.

Ditinjau dari aspek lahan, memiliki 62 ha sawah yang terdiri dari 40 ha berpengairan teknis dan 25 ha merupakan sawah tadah hujan. Lahan tegal yang dikelola petani seluas 426 ha, dengan peruntukan sebagai lahan tanaman pangan (50%) dan perkebunan/ tanaman kayu-kayuan. 56 ha pekarangan digunakan untuk komoditi ternak, hortikultura dan sebagian palawija.

Untuk Unit P3KH, karena mengikuti perkembangan usaha, sehingga Gapoktan menggandeng lembaga tani luar desa / Kecamatan Pringkuku di wilayah Kabupaten Pacitan. Hal ini menjadikan Gapoktan Rejo Mulyo Desa Pringkuku berada pada level yang lebih tinggi dari

Gapoktan lainnya, namun hal ini juga menuntut beban dan tanggungjawab yang lebih tinggi pula.

3. Kegiatan

Dalam rangka melayani petani, Gapoktan membangun Visi:

1. Terwujudnya masyarakat tani yang sejahtera, produktif, inovatif, dan berorientasi agribisnis serta berbasis kelembagaan.

Untuk mewujudkan misi tersebut dijalankan melalui Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (aspek SDM)
2. Memanfaatkan, memelihara dan meningkatkan potensi sumber daya alam (aspek SDA)
3. Memberdayakan kelembagaan tani dan membangun kemitraan (aspek lembaga).
4. Meningkatkan dan mengembangkan produksi pertanian (aspek Produksi).

Bentuk pelayanan yang diberikan berupa usaha pelayanan kepada anggota. Untuk menjalankan usahanya Gapoktan mendapatkan bantuan modal dari pemerintah berupa BLM-PUAP sebesar 100 juta Rupiah, yang dimanfaatkan untuk pelayanan sarana produksi dan perkreditan. Disamping itu juga mengelola simpanan anggota yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pelayanan Sarana Produksi

Gapoktan bertanggung jawab menampung usulan kebutuhan saprodi bagi anggota sesuai dengan pesanan dari Poktan dalam bentuk RDKK serta mengupayakan kelancaran pelayanan dari pengecer.

Poktan bertanggung jawab secara penuh untuk menyusun dan mengirimkan RDKK serta mengkondisikan kebutuhan dan penyelesaian keuangan untuk pengadaan maupun distribusi serta penyaluran kepada anggota.

Gapoktan bersama poktan mengupayakan penyelesaian tanggungan pinjaman, baik sisa pinjaman atas nama poktan yang digunakan untuk pengadaan saprodi oleh poktan, untuk dikembalikan pada Gapoktan. Kebersamaan disini mengacu pada kapasitas masing-masing antara Gapoktan dan Poktan.

2. Perkreditan Anggota

Ketua Poktan memberi REKOMENDASI kepada anggota untuk mendapatkan pinjaman dari Gapoktan. Disini ketua / pengurus poktan berfungsi sebagai filter, sehingga diharapkan tidak terjadi kemacetan. Poktan bertanggung jawab atas masuknya angsuran pinjaman dari anggota. Jasa dibagi antara Gapoktan dengan Poktan sesuai kesepakatan.

3. Simpanan Anggota

Poktan menampung Simpanan Pokok dan SimpananWajib anggota untuk disetor ke Gapoktan. Poktan bertanggung jawab lunasnya

pembayaran simpanan tersebut sesuai dengan jumlah anggota. Poktan menjadi filter dan penentu kelayakan petani yang akan masuk menjadi anggota. Dari sini diharapkan data anggota akurat. Keanggotaan tidak mengejar kuantitas, namun hanya menerima anggota yang berkualitas (yang mau melaksanakan kewajibannya).

4. Arisan

Arisan diadakan oleh Gapoktan setiap bulan sekali pada tanggal 15 dan 20. Pada tanggal 15 khusus pertemuan mengenai keuangan yang terdiri dari simpan pinjam. Dan tanggal 20 merupakan pertemuan yang membahas program ditambah dengan arisan. Pada waktu arisan tiap anggota membayar iuran wajib sebesar 1000 rupiah tiap pertemuan. Selain itu dalam acara arisan juga diberi pengarahan-pengarahan oleh pengurus gapoktan, dan masyarakat juga diberi kesempatan untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya terkait dengan masalah pertanian dan Gapoktan.

5. Pengembangan Kedelai Hitam

Gapoktan Rejo Mulyo merupakan salah satu lembaga tani yang bemitra dengan PT. Unilever dalam rangka pengembangan kedelai hitam sebagai bahan baku kecap BANGO. Untuk menjamin keberhasilan kemitraan ini, Gapoktan membagi tanggung jawab dengan poktan. Gapoktan bertanggung jawab untuk: menyalurkan sarana produksi, mengelola kelestarian program, memantau pelaksanaan di lapangan, membantu dan memfasilitasi dalam penyelesaian masalah

yang ada di lapangan, menampung penjualan hasil dan melakukan evaluasi.

Sedangkan poktan bertanggungjawab untuk: Mengkondisikan petani agar mau melaksanakan teknis budidaya sesuai anjuran, bersama Gapoktan dan petani, member solusi menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan, mengkondisikan petani agar menjual hasil panen ke Gapoktan/ mampu menjaga komitmen, memastikan bahwa setoran hasil sesuai dengan standart kualitas.

Untuk mengembangkan produksi, Gapoktan mengembangkan sayap wilayah kemitraan hingga 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Pacitan, meliputi kecamatan Pringkuku, Punung, Donorojo, Arjosari, Pacitan, Kebonagung dan Ngadirojo.

6. Magang Tenaga Teknis Lapang dan Pendampingan Kelompok Tani

Gapoktan menunjuk pengurus untuk dipersiapkan sebagai Tenaga Teknis Lapangan yang akan mengawal program Gapoktan agar bisa diterima dan di dukung Kelompok tani dan anggota. Mengirimkan petani untuk mengikuti pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta.

Dalam rangka mendampingi Kelompok Tani, maka Gapoktan menghadiri pertemuan di Poktan, antara lain dalam rangka mengawasi setoran keuangan dari Poktan (jemput bola) selain itu juga memantau dan mendampingi kegiatan yang dilaksanakan di Poktan. Sehingga

diharapkan Gapoktan akan dapat berfungsi sebagai Pusat Informasi dan Pusat Kegiatan Pertanian di Desa.

4. CAPAIAN

1. Dipercaya sebagai exciting Program P3KH (Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan Kedelai Hitam). Pola kerja yang dilaksanakan diakui mitra kerja sehingga program yang dimasukkan ke desa bertambah dan sebagai lokasi magang bagi calon Aslap dalam hal system Kerja Gapoktan (2009 s/d sekarang). Dan juga Program Pemberdayaan Perempuan sebanyak 11 kelompok (2010 s/d sekarang).
2. Dapat mempermudah dan memperlancar pelayanan kebutuhan pupuk semua anggota (2009 s/d sekarang).
3. Mampu mendorong petani dalam rangka mencapai peningkatan produktivitas.
4. Menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat di atas 200 juta Rupiah per tahun yang berasal dari pengembangan kedelai hitam
5. Mampu menjalin mitra dengan FTP-UGM dalam program bhakti masyarakat (2009-2010), hingga mendapatkan bantuan:
 - a. Sumur Renteng 1 unit
 - b. Dryer 1 unit.
6. Mampu menjalin hubungan baik dengan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Pacitan sehingga, mendapatkan program / kegiatan / bantuan/ sarana dan prasarana pertanian, antara lain:
 1. Pompa air, 2008, poktan Gondang Rejo VIII



2. Dam Parit, 2008, Seso
3. SLPTT, 2008, 2 unit
4. Handtractor, 2009, Poktan Gondang Rejo VIII
5. SLPTT, 2009, 7 unit
6. Jalan Usaha Tani, 2010, Gondang
7. Chopper, 2010, Gapoktan
8. DAM Penampung Air, 2010, Gondang
9. Sekolah Lapang Iklim, 2010 DAS Pringkuku- Pagutan-Pindul
10. SLPTT, 2010, 12 unit
11. Sekolah Lapang Iklim 2011, DAS Gondang
12. Pemberdayaan P3A, 2011, DAS Gondang
13. RP3O, 2011, Gapoktan.

5. PRESTASI

1. Juara I lomba cerdas tani kedelai antar Kab. Pacitan- Wonogiri tahun 2008.
2. Juara III final lomba cerdas tani petani kedelai tahun 2008 dari 3 wilayah Propinsi
3. Sebagai nominasi Gapoktan dari Kupaten Pacitan untu maju sebagai peserta Lomba Gapoktan pelaksana PUAP terbaik di Propinsi tahun 2009

B. Penyajian Data

1. Peran Stakeholder dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pringkuku.

Governance merupakan cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Dalam penyelenggaraan *good governance*, pemerintah, swasta, dan masyarakat, saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif karena selain berperan sebagai regulator juga diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator, yang memungkinkan masyarakat berperan serta aktif secara mandiri sebagai pelaku ekonomi-sosial. Sektor swasta berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, dan ekonomi, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Dalam salah satu prinsip *governance*, yaitu prinsip demokrasi dan pemberdayaan disebutkan bahwa peran negara diperlukan pula dalam pemberdayaan seperti pengurangan hambatan atas partisipasi masyarakat, perluasan akses pelayanan serta pengembangan kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya dalam rangka pemberdayaan. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan peran dari ketiga unsur *governance* tersebut untuk saling bekerjasama menjadi mitra dan saling melengkapi dalam memberdayakan masyarakat.

a. Peran Pemerintah (Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan).

Desa Pringkuku merupakan Desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, di Pringkuku masih banyak petani yang kurang berdaya dari segi ekonomi, maupun sosial yang mencakup SDM, pengalaman berorganisasi, dan lainnya. Sudah menjadi tugas pemerintah daerah, untuk ikut berpartisipasi melaksanakan pembangunan, baik pembangunan sarana prasarana maupun SDM yang ada di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membantu pemerintah pusat memberdayakan masyarakat melalui berbagai program. Demikian pula yang terjadi di Pacitan khususnya Desa Pringkuku, peranan pemerintah (dinas tanaman pangan dan peternakan) dalam program pemberdayaan masyarakat, adalah sebagai penyusun formulasi, penetapan *Policy*, Pembuat Kebijakan: Umum, Khusus/ Departemen/ sektoral, Penganggaran, penetapan Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan, Peraturan hukum, penyelesaian sengketa, fasilitator, monitoring, evaluasi, mediasi, dan penanggungjawab program dari pemerintah maupun swasta. Dengan didukung sumber data hasil wawancara dengan Bapak Reno Subroto, PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, sebagai berikut:

”Peran Dinas adalah sebagai penyusun formulasi, penetapan *Policy*, Pembuat Kebijakan: Umum, Khusus / Departemen / sektoral, Penganggaran, penetapan Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan, Peraturan hukum, penyelesaian sengketa. Ketika ada program, Dinas Tanaman Pangan berperan sebagai fasilitator, monitoring, evaluasi, mediasi dan penanggungjawab program dari

pemerintah dan program swasta yang terkait dengan sektor Teknologi Pertanian dan petani, karena pada dasarnya semua urusan tanaman pangan di Kabupaten Pacitan menjadi tanggung jawab Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Dan dinas melaksanakan tanggung jawabnya dengan seoptimal mungkin agar program pemberdayaan tersebut bisa berhasil” (wawancara pada hari kamis, 5 Januari 2012, pukul 16.00, di rumah Bapak Reno)

Peran pemerintah sebagai penyusun formulasi, penetapan *Policy*, Pembuat Kebijakan: Umum, Khusus / Departemen / sektoral, Penganggaran, penetapan Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan, Peraturan hukum, penyelesaian sengketa, fasilitator, yaitu dengan memberikan bantuan dana, alat, sistem manajemen, informasi, teknologi serta edukasi terhadap masyarakat. Memonitoring kegiatan yang dilaksanakan masyarakat sendiri maupun masyarakat dengan pihak swasta, dan kemudian mengevaluasi kegiatan-kegiatan tersebut. Ketika ada sengketa, dinas berperan sebagai mediasi, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun masyarakat bersama pihak swasta. Terkait dengan hal diatas, didukung hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Kades Pringkuku, sebagai berikut:

”Peran dinas Tanaman Pangan dan Peternakan adalah sebagai monitoring, evaluasi, dan mediasi. Terkait monitoring, tiap program dimonitoring secara sistematis oleh Dinas tanaman pangan tiap bulan sekali. Terkait evaluasi pelaksanaan sama dengan monitoring hanya saja pelaksanaanya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Terkait mediasi, jika dalam pelaksanaan program ada permasalahan, Dinas akan memberikan arahan atau solusi berdasarkan peraturan yang ada” (wawancara pada hari kamis, 26 Januari 2012, pukul 15.00, di rumah Kades Pringkuku).

Hal ini didukung wawancara dengan Bapak Muryadi, Pengurus Unit Saprodi Gapoktan Rejo Mulyo, sebagai berikut:

”Menambahkan keterangan pak Kades, Peran Pemerintah sebagai fasilitator memberikan dana PUAP sebesar 100 juta rupiah dan dana tersebut digunakan untuk sarana produksi seperti pembelian bibit tanaman dan pupuk serta perkreditan. Selain itu juga dibantu alat-alat antara lain tracktor sebanyak 4 unit, APPO (alat pembuatan pupuk organik) 2 unit, RP3O (Runah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik), 1 unit kendaraan Tossa, dan lain sebagainya. (wawancara pada hari Kamis, 26 Januari 2012, pukul 15.00, di rumah Kades Pringkuku).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Pemerintah berperan memberikan dana dan alat kepada masyarakat dengan tujuan untuk menunjang program pemberdayaan masyarakat, dan agar Gapoktan mandiri. Selain itu masih ada bentuk fasilitasi lain dari pemerintah berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukarni, Seksi Gudang Gapoktan Rejo Mulyo, berikut ini:

”Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan mengadakan sekolah lapang yang diadakan tiap tahun, yaitu SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) di sekolah tersebut petani dididik tentang cara menanam tanaman pangan dengan cara yang baik. Kemudian dari segi teknologi dinas melatih pembuatan pupuk organik yang terbuat dari daun-daunan serta memberikan fasilitas alat untuk pembuatan pupuk tersebut. (wawancara pada hari Sabtu, 31 Desember 2011, pukul 15.00, di kantor Gapoktan).

Selain pendapat dari PPL, dan pengurus Gapoktan, Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat juga dijelaskan oleh wawancara dengan Bapak Sugiyatno, (petani) anggota Gapoktan Rejo Mulyo, sebagai berikut:

”Pemerintah banyak memberikan alat-alat seperti alat pembuat pupuk, kendaraan untuk mengangkut daun yang dibuat pupuk, memberi bantuan uang yang disimpan pinjamkan kepada kami, juga memberikan pengarahan tentang cara menanam, mengadakan sekolah iklim, terus juga kadang datang ke ladang bersama pengurus gapoktan untuk melihat kedelai, dan mengukur kira-kira berapa hasil panen nanti.” (wawancara pada hari Rabu, 8 Februari 2012, pukul 18.30, di rumah Bapak Sugiyatno).

Berdasarkan wawancara diatas, telah jelas disebutkan bahwa peran dinas dalam program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai, monitoring, evaluasi, mediasi, penanggungjawab dan fasilitator. Dimana pihak pemerintah memberikan bantuan berupa dana dan alat-alat yang harusnya digunakan masyarakat yang tergabung dalam kelompok untuk produksi, dan agar bantuan tersebut berkembang. Dinas juga sebagai pintu masuk bagi swasta (Unilever) ketika akan menjalin kemitraan dengan Gapoktan. Pihak swasta ijin dulu ke dinas, sebelum menjalin kemitraan dengan petani yang ada di wilayah kabupaten Pacitan. Peran pemerintah diatas tidak lepas dari penerapan *good governance*, dimana pemerintah diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator, monitoring, evaluasi, dan mediasi yang memungkinkan masyarakat berperan serta aktif secara mandiri sebagai pelaku ekonomi-sosial dengan cara memberdayakannya. Inisiatif untuk bermitra dan menerima Program dari swasta diperlukan ketika program pemerintah kurang berhasil atau kurang mampu memberdayakan masyarakat. Sehingga program swasta bisa melengkapi program pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

b. Peran Swasta (Unilever)

Dalam penyelenggaraan *good governance*, sektor swasta berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Sektor swasta ini meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak diberbagai bidang. Dalam hal ini pihak swasta yang berperan adalah Unilever yang masuk ke Kabupaten Pacitan dan menawarkan untuk bermitra dengan petani yang

telah terlembaga dalam program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam). Dinas menyetujui dan akhirnya dilaksanakan kerjasama antara Unilever dan Gapoktan Rejomulyo Desa Pringkuku.

Pelaksanaan kerjasama ini didasarkan pada penyelenggaraan *good governance*, pemerintah tidak lagi dominan tetapi masyarakat dan sektor swasta juga berperan dalam pemerintahan. Perjanjian kerjasama ini juga tidak lepas dari prinsip-prinsip yang melekat dalam *good governance* yaitu demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas, profesionalitas, kemitraan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dituntut sebuah bukti outentik atau perjanjian yang sah antara Gapoktan Rejomulyo dan Unilever. Perjanjian kerjasama dimulai dari tahun 2009 dan berlangsung selama 1 musim panen. Dan tiap tahun diadakan kontrak kerjasama baru. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Purwidiyanto, Project Manager Yayasan Unilever sebagai berikut:

”Kerjasama antara Unilever dan Gapoktan Rejo Mulyo Pringkuku dilakukan selama 1 musim panen. Tiap tahun dibuat perjanjian kerjasama baru. Isi surat perjanjian kerjasama ada yang pasal-pasal nya tetap sama ada yang sebagian diubah. Sesuai dengan kesepakatan bersama.” (wawancara pada hari Kamis, 9 Februari 2012, pukul 13.00, di kantor Gapoktan Rejo Mulyo Pringkuku).

Adapun Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

Perjanjian kerjasama ini adalah perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2010, oleh 4 pihak yaitu:

1. **GAPOKTAN REJO MULYO**, suatu persekutuan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**").
2. **YAYASAN UNILEVER INDONESIA**, suatu yayasan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Graha Unilever Jln. Jend. Gatot Subroto Kav-15, Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").
3. **PT UNILEVER INDONESIA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Graha Unilever Jln. Jend. Gatot Subroto Kav-15, Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Ketiga**").
4. **UNIT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN MANAGEMENT AGRO INDUSTRI**, suatu Pusat Pengembangan yang didirikan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain, bertempat di Jln. Socio Justicia Bulak Sumur Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Keempat**").

Pihak Pertama, adalah adalah koordinator lapangan yang melakukan bimbingan dan pengawasan petani dan/atau kelompok petani Kedelai Hitam binaan Pihak Keempat (selanjutnya disebut sebagai "**Petani Kedelai Hitam**") dalam penanaman Kedelai Hitam selanjutnya disebut

sebagai ”**Produk**”) pada lahan dengan luas perkiraan awal 325 Ha yang berlokasi di Kecamatan Pringuku (selanjutnya disebut sebagai ”**Lahan**”) dengan benih yang diperoleh dari Pihak Ketiga dan selaku konsumen Produk untuk kebutuhan Pihak Ketiga.

Pihak Kedua, adalah pembina dan penyedia dana pembinaan kepada pihak Keempat. **Pihak Ketiga** adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang industri berbagai barang keperluan rumah tangga dan makanan yang membutuhkan Produk untuk kegiatan usahanya. **Pihak Keempat**, adalah pembina Pihak Pertama dan pengawas lapangan Petani Kedelai Hitam dari awal masa penanaman sampai dengan masa panen dan pasca panen Produk di Lahan. Pihak Pertama bermaksud menjual Produk milik Petani Kedelai Hitam kepada Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga berkeinginan untuk membeli Produk milik Petani Kedelai Hitam.

Adapun peran swasta menurut perjanjian kerjasama diatas diatur dalam pasal 5, yaitu:

a. Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berkewajiban membantu biaya pembinaan yang dibutuhkan oleh Pihak Keempat seperti yang diuraikan dalam Pasal 5.4 perjanjian ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Keempat akan diatur secara terpisah dan diatur secara terpisah dan dibuat antara Pihak Kedua dan Keempat.

b. Apabila diperlukan, Pihak Kedua akan membantu peralatan pengolahan pasca panen kepada Petani Kedelai Hitam berdasarkan usulan dari Pihak Keempat.

c. Apabila diperlukan, Pihak Kedua akan membantu memfasilitasi Pihak Pihak Pertama untuk memperoleh bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama.

b. Kewajiban Pihak Ketiga:

a. Pihak Ketiga berkewajiban membeli hasil Produk sesuai dengan ketentuan Pasal 3.1.Perjanjian ini.

b. Pihak Ketiga bertanggung jawab terhadap pengiriman Produk yang telah dinyatakan baik oleh Pihak Pertama ke Lokasi Pihak Ketiga.

c. Apabila hasil panen dari Lahan melebihi 185.000 kg, maka Pihak Ketiga wajib membeli kelebihanannya dengan harga Rp XXXXXXXXXX belum termasuk ongkos kirim ke pabrik/lokasi Pihak Ketiga di Subang, atau tempat-tempat lainnya yang ditentukan oleh Pihak Ketiga.

c. Kewajiban Pihak Keempat:

a. Pihak Keempat berkewajiban membantu Pihak Pertama (termasuk membina petugas lapangan) dalam membina dan mengawasi Petani Kedelai Hitam dalam proses kegiatan percobaan penanaman Produk yang mencakup awal tanam, pengawasan selama kegiatan tanam sampai dengan pasca panen.

- b. Pihak Keempat berkewajiban merekrut petugas lapangan yang bertugas sebagai pembina Petani Kedelai Hitam, penanggung jawab produksi, administrasi, dan koordinator lapangan.
- c. Pihak Keempat berkewajiban memberikan laporan tertulis hasil evaluasi percobaan penanaman kedelai hitam kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dan usulan atausaran untuk perbaikan.

Peran swasta diatas merupakan peran yang tertulis dalam perjanjian kerjasama. Sedangkan peran lain Unilever adalah kontribusi pada formulasi, membantu memberdayakan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa alat, teknologi, edukasi, dan tenaga ahli. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Reno Subroto, PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, sebagai berikut:

”Dalam kontribusi dalam formulasi, Swasta membuat rumusan program sendiri yang terkait dengan kemitraan, namun untuk dilaksanakan harus sinergi dengan rumusan dinas,. Selain pemerintah, pihak swasta juga mengadakan sekolah untuk petani, yaitu FIELD (*Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy* - Prakarsa petani untuk peri kehidupan yang ekologis dan demokratis) adalah sebuah organisasi yang mendukung kelompok masyarakat marginal melalui pola pendidikan pemberdayaan. Dari sekolah tersebut petani banyak mengetahui tentang teknologi pertanian yang lebih modern.” (wawancara pada hari kamis, 5 Januari 2012, pukul 16.00, di rumah Bapak Reno).

Peran lain Unilever dalam membantu memberdayakan masyarakat dijelaskan dalam wawancara dengan Mas Yoko, Asisten Lapang dari Unilever, sebagai berikut:

Peran Unilever adalah memberikan asisten lapang seperti saya dan bertugas untuk mengontrol kegiatan petani dan kegiatan di Gapoktan, melakukan cek lahan sebelum menanam kedelai, mengadakan

sosialisasi sosialisasi awal atau satu minggu sebelum tanam, sosialisasi vegetatif atau pada saat kedelai berumur 2 sampai 3 minggu, sosialisasi generatif atau ketika kedelai berumur 60 hari, dan sosialisasi panen dan pasca panen saat kedelai berumur 85 hari. Unilever juga memfasilitasi petani untuk bersekolah di FIELD dimana disitu petani dituntut untuk mengembangkan diri, dan mencari sendiri permasalahan yang ada serta penyebabnya dengan tujuan agar masyarakat mandiri namun tetap didampingi oleh asisten lapang. (wawancara pada hari Kamis, 9 Februari 2012, pukul 13.30, di Kantor Gapoktan Rejo Mulyo, Pringkuku).

Kemudian wawancara dengan Bapak Sugiyanto Kades Pringkuku dijelaskan:

”Unilever memberikan asisten lapang untuk mendampingi para petani dalam proses menanam sampai panen. Unilever juga membina dan memberikan pelatihan ketrampilan kepada petani. Dan memberikan fasilitas-fasilitas lain seperti alat-alat yang mendukung program P3KH. (wawancara pada hari Kamis, 26 Januari 2012, pukul 15.30, di rumah Bapak Kades Pringkuku).

Bapak Sukarni, Pengurus Gapoktan, menjelaskan peran Unilever sebagai berikut:

”Unilever memberikan fasilitas berupa benih yang akan ditanam oleh petani. Jumlah benih yang diberikan sesuai dengan luas lahan. Lalu juga memberikan fasilitas berupa alat pengering kedelai, kaca pembesar, obat hama, tekanan suhu, dan alat pendukung lain seperti komputer, serta laptop. (wawancara pada hari Sabtu, 31 Desember 2011, pukul 16.00, di Kantor Gapoktan Rejo Mulyo Desa Pringkuku)

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Jumadi, (petani), sebagai berikut:

”Unilever memberikan benih kepada petani dan hanya mengganti uang transport sebesar Rp. 1000,- kemudian, juga memberikan penyemprot hama, dan petani mengganti Rp. 4000,- tiap tangki. Ada juga pendamping dari Unilever yang mendampingi kami dalam menanam kedelai. Kalau ada masalah kami tanya kepada mas atau mbak pendamping, dan nanti mereka memberikan masukan. Terus Unilever juga memberikan alat-alat yang ditaruh di Gapoktan, seperti alat pengering kedelai dan alat kaca pembesar yang digunakan pengurus untuk melihat hama tanaman di tegal kami. (wawancara

pada hari Sabtu, 28 Januari 2012, pukul 16.00, di rumah Bapak Jumadi).

Dari hasil wawancara diatas, Unilever berperan sebagai Kontribusi pada formulasi implementasi, dana, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil, monitoring, evaluasi, dan juga sebagai pemberi fasilitas baik alat, maupun tenaga ahli. Dengan kemitraan ini Unilever akan mendapatkan manfaat, karena tidak hanya mendapatkan profit tetapi juga memperluas jaringan konsumen, dan selain itu juga menciptakan hubungan yang baik dengan stakeholder yang terkait yaitu pemerintah, dan masyarakat.

c. Peran Masyarakat (Petani Desa Pringkuku) .

Masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok (baik yang terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal, seperti misalnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan. Dalam konsep *governance* masyarakat pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, dan masyarakat berperan dalam interaksi sosial, dan ekonomi politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan peran masyarakat yang selama ini sebagai objek pembangunan harus diubah menjadi subjek pembangunan melalui pemberdayaan

(*empowerment*) masyarakat mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Peran masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat adalah sebagai pelaksana program tersebut, Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini masyarakat berpartisipasi melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun program swasta yang telah disetujui oleh pemerintah. Selain itu masyarakat juga berperan dalam memberikan input berupa saran, dan kritik. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Reno, (PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan), sebagai berikut:

“Terkait dengan partisipasi dalam formulasi yang bersifat bottom-up masyarakat berperan dalam memberikan masukan, dari informasi masyarakat akan direspon oleh pemerintah. Kemudian dalam hal implementasi masyarakat sebagai pelaksana semua program baik pemerintah maupun swasta. Kemudian masyarakat juga sebagai fasilitasi dalam bentuk lahan, dana swadaya, dan tenaga. ”
(wawancara pada hari Sabtu, 18 Februari 2012, pukul 19.00, di Rumah Bapak Reno)

Menanggapi pertanyaan yang sama Bapak Sukarni (Pengurus Gapoktan) menambahkan sebagai berikut:

“Dalam program pemberdayaan ini masyarakat itu berperan sebagai pelaksana program P3KH. Peran masyarakat menanam kedelai hitam berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari sekolah petani, kemudian ikut serta dalam kumpulan-kumpulan yang diadakan Gapoktan, selain itu masyarakat juga ikut serta dalam mengeluarkan pendapat. Biasanya sebelum kumpulan dimulai saya ingatkan agar menghindari 3D, yaitu datang, duduk, diam. Jadi saya menghimbau kepada semua anggota Gapoktan agar mereka aktif dan menyampaikan uneg-uneg mereka sebagai bahan masukan, agar program ini berjalan dengan baik. (wawancara dengan Bapak Sukarni, Pengurus Gapoktan, pada hari Sabtu, 31 Desember 2011, pukul 16.00, di Kantor Gapoktan Rejo Mulyo Desa Pringkuku)

Menanggapi pertanyaan hal yang sama Bapak Kades Pringkuku menyatakan:

”Masyarakat berperan sebagai pelaksana program. Masyarakat juga berperan menyumbangkan dana swadaya, kritik, saran, dan juga menyumbangkan tenaga terlatih seperti pengurus Gapoktan, yang membantu kelancaran pelaksanaan program kemitraan”. (wawancara pada hari kamis, 26 Januari 2012, pukul 15.30, di rumah Bapak Kades Pringkuku).

Terkait dengan peran masyarakat, Ibu hartuni mengemukakan:

”Masyarakat berperan sebagai pelaksana program, sebagai pelaksana program P3KH yang banyak anggotanya laki-laki, kemudian untuk perempuan ada program Gapoksi dan Saraswati. Masyarakat juga berperan untuk memberikan kritik kepada pengurus Gapoktan apabila ada hal yang dirasa kurang pas, dan juga memberikan masukan kepada Gapoktan maupun Unilever. Seperti pada waktu ada sosialisasi pembuatan pupuk pada tanggal 9 lalu, kami mengusulkan agar harga kedelai dinaikkan lagi. (wawancara dengan Ibu Hartuni, (petani) anggota Gapoktan, Gapoksi, dan Pengurus Saraswati, pada hari Kamis, 9 Februari 2012, pukul 18.30, di rumah Ibu Hartuni).

Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan berjalan dengan bagus, sesuai dengan perannya dalam *konsep good governance*, yaitu berpartisipasi menjalankan program pemberdayaan baik program dari pemerintah maupun program kemitraan dari swasta, dalam aktivitas ekonomi, maupun sosial. Partisipasi masyarakat yang seperti ini yang diinginkan dalam penyelenggaraan *good governance*, sehingga masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan, dan mengetahui arah kebijakan dari pemerintah, serta mengetahui dampak dari kemitraan dengan swasta.

Dengan begitu masyarakat bisa menjalankan perannya dalam partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, sebagai

pelaksana program maupun sebagai pemberi input berupa saran dan kritik, jika program-program pemberdayaan tersebut kurang efektif.

2. Proses kemitraan *stakeholder* dalam memberdayakan masyarakat di Desa Pringkuku:

Pelaksanaan Partnership di Desa Pringkuku, diawali dengan saling membutuhkan antara Unilever, pemerintah, maupun masyarakat. Unilever bermitra karena membutuhkan kedelai hitam untuk bahan dasar produksi kecap. Dinas mendukung program kemitraan ini, untuk menunjang program pemberdayaan masyarakat, yaitu program Gapoktan PUAP, yang sampai saat ini belum bisa membantu petani dalam hal pemasaran. Mendukung program kemitraan ini, merupakan upaya Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan membantu petani dalam menjamin pemasaran dan mendapatkan kepastian harga ketika panen. Karena ketika panen biasanya harga hasil produksi pertanian sangat rendah. Dengan Unilever masuk dan bisa menjamin pemasaran petani, setidaknya petani sudah punya pandangan nantinya hasil produksinya harus dibawa ke mana dan kualitas barang yang dijual harus seperti apa.

Mendukung Unilever bermitra Gapoktan Rejo Mulyo juga merupakan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Dengan bermitra dengan swasta berarti masyarakat mampu mengatur dirinya sendiri, bagaimana melaksanakan kemitraan itu. Dan tidak hanya sekedar membeli produksi kedelai petani, kemitraan dalam program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam), petani juga dibina, diberdayakan, dan

Gapoktan semakin hidup dan berfungsi dengan adanya kemitraan itu. Berikut adalah proses pelaksanaan kemitraan:

a. Persiapan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan dan Gapoktan

Rejo Mulyo:

Pada tahun 2008 ketika Unilever menawarkan untuk bermitra, penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, mensosialisasikan kemitraan tersebut kepada petani-petani yang tergabung dalam Gapoktan. Dari sosialisasi tersebut petani tertarik untuk melaksanakan kemitraan. Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Bapak Reno Subroto, PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, sebagai berikut:

”Pada waktu itu Unilever masuk Pacitan dan menawarkan diri untuk bermitra dalam program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam), memberikan benih, bimbingan, kepastian harga, dan jaminan pasar. Unilever mengaku dapat rekomendasi dari Pak Dirjen Tanaman Pangan Sutarto Ali agar masuk Pacitan. Kemudian Dinas memberi tahu bahwa daerah yang subur adalah Ngadirojo. Akhirnya Pihak Unilever yang bekerjasama dengan UGM melihat kondisi di sana. Setelah diadakan sosialisasi ternyata ada permasalahan teknis, yaitu jadwal tanam petani di Ngadirojo tidak bisa sesuai dengan anjuran FTP UGM. Kemudian saya menyarankan agar melihat kondisi di Desa Pringkuku. Setelah lahan yang kering tidak masalah, akhirnya diadakan sosialisasi di Gapoktan Pringkuku.” (wawancara pada hari kamis, 5 Januari 2012)

Hasil wawancara dengan Bapak Reno Subroto, PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, berikutnya:

”Saya melakukan sosialisasi kepada perwakilan petani di Gapoktan, yang kemudian disampaikan di Poktan masing-masing. Setelah dijelaskan tentang rencana kemitraan, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana resikonya akhirnya petani tertarik. Para petani di Desa Pringkuku setuju untuk melaksanakan program kemitraan dengan Unilever. Setelah ada keta kesepakatan akhirnya diadakan persiapan

berupa penguatan kelembagaan. karena pada waktu itu memang Gapoktan belum begitu berfungsi. (wawancara pada hari kamis, 5 Januari 2012)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kemitraan Gapoktan Rejo Mulyo dengan Unilever akhirnya dilaksanakan. Kemitraan dengan Unilever dimulai pada tahun 2008. Namun pada waktu itu barulah tahap percobaan. Pada waktu itu Gapoktan Rejo Mulyo belum siap untuk bermitra karena belum berbadan hukum. Perlu adanya penguatan kelembagaan sebelum kemitraan dimulai. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Bapak Pamuji, PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, sebagai berikut:

”Unilever tidak berani melakukan kerjasama dengan lembaga yang belum ada legitimasinya seperti Gapoktan Rejo Mulyo. Karena itu pada tahun pertama, secara tertulis kerjasama dilakukan antara Unilever dengan Koperasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Tahun berikutnya (mulai tahun 2009) diharapkan Gapoktan sudah mandiri dan bisa melaksanakan kemitraan sendiri. Jika sudah mandiri Dinas hanya berperan sebagai monitoring, evaluasi, dan mediasi dari pelaksanaan kemitraan tersebut.” (wawancara pada hari Selasa, 27 Desember 2011, pukul 11.00 di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan)

Oleh karena itu pada tahun pertama Unilever secara hukum menjalin kerjasama dengan Koperasi Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Namun penjualan hasil produksi dari petani anggota dan penyetoran ke Unilever tetap ditangani oleh Gapoktan. Dalam hal ini dinas membantu para petani dalam kemitraan dengan unilever sambil menunggu Gapoktan siap untuk bermitra secara mandiri dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam bermitra. Hal ini di dukung hasil

wawancara dengan Bapak Reno Subroto, PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, sebagai berikut:

”Persiapan yang dilakukan Gapoktan bersama para petani antara lain membuat dasar hukum pembentukan Gapoktan, membentuk tim dengan melibatkan anggota Gapoktan, dan memperbaiki manajemen kelembagaan. Sehingga Gapoktan menjadi lembaga yang sah menurut hukum dan sudah memenuhi syarat untuk bermitra dengan Unilever” (wawancara pada hari Kamis, 5 Januari 2012)

Tentang persiapan Gapoktan sebelum bermitra juga didukung hasil wawancara dengan Bapak Sugiyatno, (petani) sebagai berikut:

”Sebelum bermitra masyarakat dikumpulkan dalam arisan rutin di Poktan masing-masing, kemudian diberikan sosialisasi oleh ketua Poktan bahwa akan diadakan kemitraan dengan Unilever, dan dibutuhkan 2 perwakilan dari Poktan untuk hadir dalam rapat persiapan kemitraan di Gapoktan. Kemudian hasil dari rapat tersebut disampaikan oleh perwakilan kepada semua anggota Poktan.” (wawancara pada hari Rabu, 8 Februari 2012, pukul 18.30, di rumah Bapak Sugiyatno).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, persiapan yang dilakukan Dinas dan Gapoktan Rejomulyo adalah sebagai berikut:

Pertama adalah sosialisasi, dimana penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melakukan sosialisasi tentang rencana kemitraan di Gapoktan Rejo Mulyo Pringkuku. Penyuluh memberikan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan kemitraan itu, dan apa saja risikonya. Sosialisasi di Gapoktan dihadiri oleh 2 wakil dari 14 Poktan. Kemudian dari hasil sosialisasi disampaikan oleh wakil Poktan, Di kelompok masing-masing. Dari sosialisasi itu masyarakat tertarik dan akhirnya berpartisipasi mengikuti program kemitraan tersebut.

Persiapan kedua adalah penguatan kelembagaan (Gapoktan) yang terdiri dari:

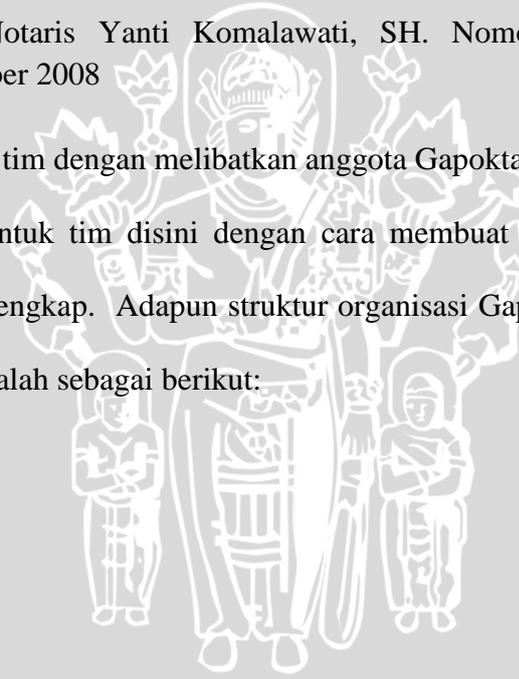
1. Membuat dasar hukum pembentukan Gapoktan sehingga Gapoktan menjadi lembaga yang berbadan hukum:

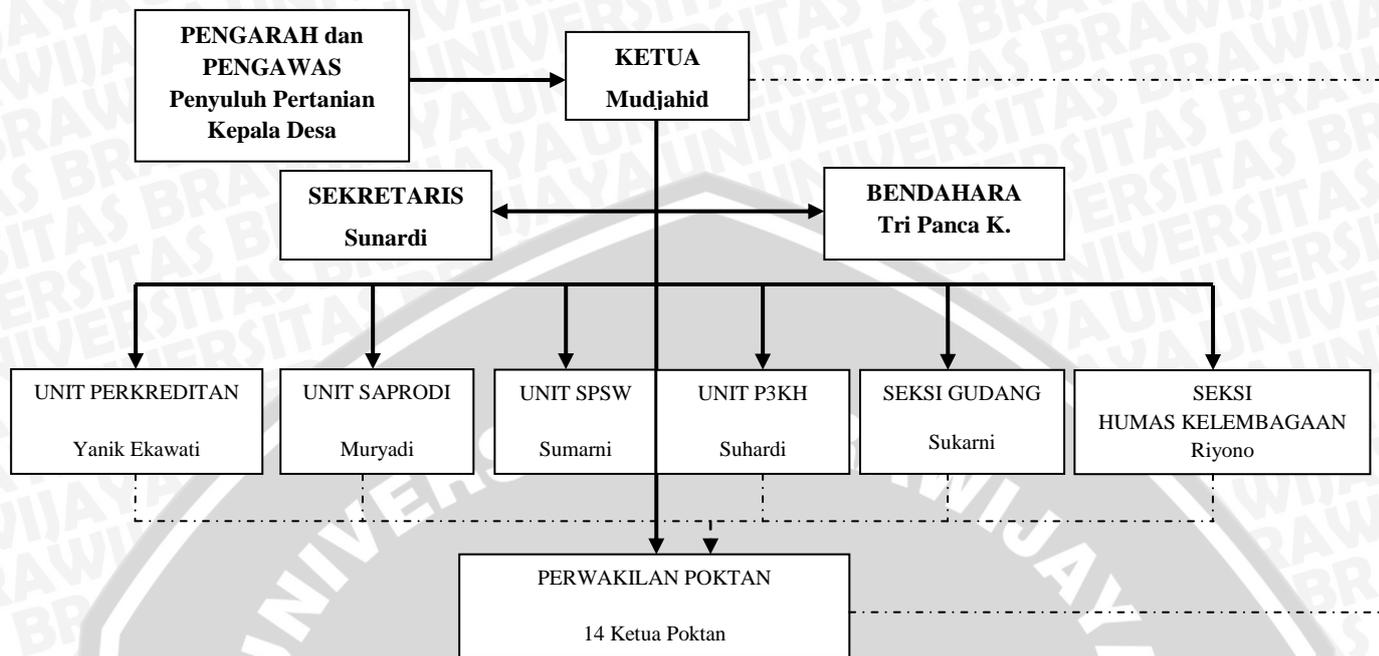
Gapoktan terdaftar menjadi lembaga yang sah secara hukum dengan dasar pembentukan sebagai berikut:

- Berita Acara Pendirian Nomor: 411.61/04/408.62.2008/2007
- SK Bupati Pacitan Nomor: 188.45/187/408.21/2008 tanggal 26 Mei 2008
- Akta Notaris Yanti Komalawati, SH. Nomor 57 tanggal 16 september 2008

2. Membentuk tim dengan melibatkan anggota Gapoktan.

Membentuk tim disini dengan cara membuat struktur organisasi yang lebih lengkap. Adapun struktur organisasi Gapoktan Rejo Mulyo Pringuku adalah sebagai berikut:





Sumber: Profil Gapoktan Rejo Mulyo 2011

Gambar 9

Struktur Organisasi Gapoktan Rejomulyo Desa Pringkuku Periode 2010-2012

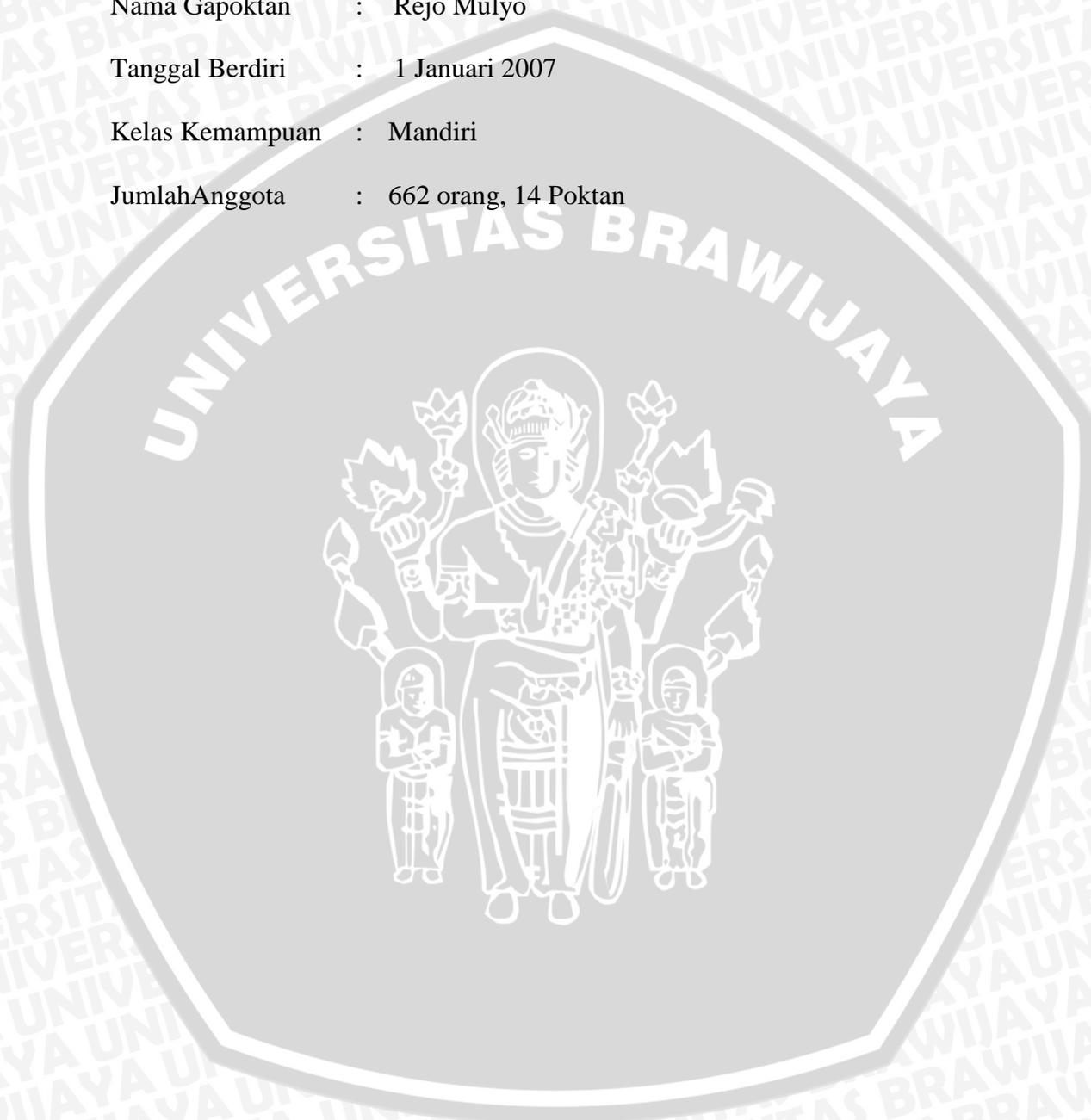
Keterangan:

1. Pengarah dan pengawas : 1. Penyuluh Pertanian
2. Kepala Desa
2. Ketua : Mudjahid
3. Sekretaris : Sunardi
4. Bendahara : Tri Panca Kurniasih
5. Unit Gudang : 1. Sukarni
2. Muryadi
3. Unit Perkreditan : Yanik Ekawati
4. Unit Simpanan : Sumarni
5. Perwakilan Poktan : 1 orang tiap kelompok tani.

Data Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Tahun 2010:

1. Identitas:

Nama Gapoktan : Rejo Mulyo
Tanggal Berdiri : 1 Januari 2007
Kelas Kemampuan : Mandiri
Jumlah Anggota : 662 orang, 14 Poktan



2. Pengurus Gapoktan:

Tabel 14
Daftar Pengurus Gapoktan Rejo Mulyo

No	Nama	L / P	Umur (th)	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Mudjahit	1	62	D2	Ketua
2.	Sunardi	1	48	SMA	Sekretaris
3.	Tri PancaKurniasih	1	38	SMA	Bendahara
4.	Muryadi	1	47	SMA	Unit Sarana Produksi
5.	Yanik Ekawati	1	35	SMA	Unit Simpan Pinjam
6.	Sujak Ismanto	1	45	SMA	Unit SPSW
7.	Suhardi	1	42	SMP	Unit P3KH
8.	Sukarni	1	45	SMA	Unit Gudang
9.	Romelan	1	43	SMP	Perwakilan Poktan
10.	Suparni	1	45	SMP	Perwakilan Poktan
11.	Giyono	1	38	SMA	Perwakilan Poktan
12.	Ponimin	1	62	SD	Perwakilan Poktan
13.	Mider Santoso	1	42	SMP	Perwakilan Poktan
14.	Sri Widodo	1	38	SMP	Perwakilan Poktan
15.	Djuman	1	50	SMP	Perwakilan Poktan
16.	Riyono	1	46	SMP	Perwakilan Poktan
17.	Jumadi	1	45	SMP	Perwakilan Poktan
18.	Bibit Sumanto	1	48	SD	Perwakilan Poktan
19.	Rustam	1	63	D2	Perwakilan Poktan
20.	Pujiono	1	42	SMA	Perwakilan Poktan
21.	Sumardi	1	36	SMA	Perwakilan Poktan
22.	Sukatno	1	42	SMP	Perwakilan Poktan
	Jumlah	20 2			

Sumber: Gapoktan Rejo Mulyo 2011

3. Memperbaiki manajemen kelembagaan.

Gapoktan memperbaiki manajemen kelembagaan dengan cara menghidupkan fungsi lembaga menjadi lebih aktif. Masing-masing pengurus yang telah dibentuk di atas mulai menjalankan fungsi masing-masing secara efektif. Dengan mendata dan mendokumentasikan anggota Gapoktan, CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) Realisasi Tanam, dan lain-lain. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Mider sebagai berikut:

”Saya datang langsung kerumah-rumah penduduk untuk mendata siapa yang akan menanam kedelai dan berapa benih yang dibutuhkan. Itu untuk data pembuatan CPCL” (wawancara pada hari Kamis 9 Februari, pukul 09.00, di rumah bapak Mider).

Biasanya pengurus Gapoktan datang langsung ke masyarakat untuk mendata berapa luas lahan yang akan ditanami kedelai dan berapa benih yang dibutuhkan. Setelah itu dibuatlah data CPCL.

b. Pelaksanaan Kemitraan Gapoktan Rejo Mulyo dengan Unilever dalam Program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam) di Desa Pringkuku.

Pelaksanaan kemitraan di Desa Pringkuku merupakan kemitraan Pola Subkontrak. ini sudah berlangsung selama 4 periode, dimulai dari tahun 2008 sampai saat ini. Kemitraan ini merupakan kemitraan jangka waktu yang pendek yaitu hanya 1 musim panen. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Purwidyanto (Project Manager Unilever) sebagai berikut:

“Kemitraan Unilever dan Gapoktan telah terjadi selama 4 periode. Akan tetapi yang pertama masih bermitra dengan koperasi dinas.

Pola kemitraan yang dilaksanakan Unilever dan Gapoktan adalah Pola kemitraan Subkontrak. Dimana Unilever memperoleh pasokan kedelai dari Gapoktan. Dan Gapoktan beserta petani mendapat bimbingan dan kemampuan teknis produksi, manajemen kelembagaan, dan peningkatan teknologi” (Wawancara pada hari Kamis 9 Februari 2012 di kantor GapoktanRejo Mulyo).

Tiap tahun diadakan kontrak kerjasama baru. Proses pelaksanaan kemitraannya adalah sebagai berikut:

1. Penandatanganan perjanjian kerjasama. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2010, oleh 4 pihak yaitu:
 - a. **GAPOKTAN REJO MULYO**, suatu persekutuan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (selanjutnya disebut sebagai **”Pihak Pertama”**).
 - b. **YAYASAN UNILEVER INDONESIA**, suatu yayasan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Graha Unilever Jln. Jend. Gatot Subroto Kav-15, Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut sebagai **”Pihak Kedua”**).
 - c. **PT UNILEVER INDONESIA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Graha Unilever Jln. Jend. Gatot Subroto Kav-15, Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut sebagai **”Pihak Ketiga”**).

d. **UNIT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN MANAGEMENT AGRO INDUSTRI,** suatu Pusat

Pengembangan yang didirikan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain, bertempat di Jln. Socio Justicia Bulak Sumur Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Keempat**").

1. Pihak Pertama, adalah adalah koordinator lapangan yang melakukan bimbingan dan pengawasan petani dan/atau kelompok petani Kedelai Hitam binaan Pihak Keempat (selanjutnya disebut sebagai "**Petani Kedelai Hitam**") dalam penanaman Kedelai Hitam selanjutnya disebut sebagai "**Produk**") pada lahan dengan luas perkiraan awal 325 Ha yang berlokasi di Kecamatan Pringkuku (selanjutnya disebut sebagai "**Lahan**") dengan benih yang diperoleh dari Pihak Ketiga dan selaku konsumen Produk untuk kebutuhan Pihak Ketiga.
2. Pihak Kedua, adalah pembina dan penyedia dana pembinaan kepada pihak Keempat.
3. Pihak Ketiga adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang industri berbagai barang keperluan rumah tangga dan makanan yang membutuhkan Produk untuk kegiatan usahanya.
4. Pihak Keempat, adalah pembina Pihak Pertama dan pengawas lapangan Petani Kedelai Hitam dari awal masa penanaman sampai dengan masa panen dan pasca panen Produk di Lahan. Pihak Pertama bermaksud menjual Produk milik Petani Kedelai Hitam

kepada Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga berkeinginan untuk membeli Produk milik Petani Kedelai Hitam.

Para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama, dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan syarat:

Pasal 1 tentang Obyek Perjanjian:

Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama pegadaaan Produk hasil penanaman Petani Kedelai Hitam pada Lahan sesuai spesifikasi sebagaimana terlampir di dalam lampiran 1 Perjanjian ini, yang menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 2 tentang pengadaan produk:

5.1 Pihak Pertama akan melakukan koordinasi untuk menjamin Petani Kedelai Hitam menjual Produk kepada Pihak Ketiga, dan melakukan pemeriksaan spesifikasi Produk (termasuk jumlah Produk) di bawah pengawasan Pihak Keempat.

Pihak Ketiga akan membeli Produk milik Petani Kedelai Hitam yang telah dikemas di dalam kemasan karung plastik ukuran 50 (lima puluh) kilogram sesuai dengan spesifikasi yang diatur di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

5.2 Para Pihak Sepakat bahwa perhitungan hasil produksi Produk adalah berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga di pabrik/lokasi yang akan ditentukan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3 tentang Harga Produk:

3.1 Para Pihak sepakat bahwa harga jual Produk dari Pihak Pertama kepada pihak ketiga adalah Rp [REDACTED] per kg franco gudang Pihak Pertama.

3.2 Harga tersebut diatas tidak termasuk biaya pengiriman ke pabrik Pihak Ketiga dan tidak termasuk PPN sebesar 10%. Pengaturan mengenai biaya dan tata cara pengiriman dari lokasi Pihak Pertama ke Pabrik /lokasi Pihak Ketiga adalah merupakan tanggungan Pihak Ketiga.

Pasal 4 tentang pembayaran:

4.1 Pihak Ketiga akan membayar dimuka sejumlah 80% (delapan puluh perseratus) dari perkiraan hasil produksi yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli dan Oktober 2010. Selisih atas pembayaran hasil produksi akan dibayarkan dan/atau diselesaikan oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja setelah Produk diterima secara baik dan benar oleh Pihak Ketiga.

4.2 Pengajuan tagihan hanya dapat dan sah jika dilaksanakan di kantor Pihak Ketiga, dengan disertai bukti-bukti pendukung sebagai berikut:

- a. Kwitansi asli bermaterai cukup.
- b. Berita acara penerimaan barang.
- c. Kelengkapan pajak yang sesuai dengan tagihan.

Pasal 5 tentang kewajiban Para Pihak:

5.1 Kewajiban Pihak Pertama:

- a. Pihak Pertama berkewajiban membina hasil kerja Petani Kedelai hitam yang mencakup pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di periode awal tanam, pengawasan selama kegiatan tanam sampai dengan periode pasca panen serta pengemasan Produk.
- b. Pihak Pertama berkewajiban untuk memastikan Petani Kedelai Hitam menjual seluruh hasil produksi Produk Kepada Pihak Ketiga, serta menjamin kebersihan kemasan Produk tidak terkontaminasi oleh kotoran dan / atau bahan kimia apapun, dan tertutup rapat serta terjahit dengan sempurna untuk mencegah kerusakan atas spesifikasi Produk.
- c. Pihak Pertama berkewajiban menjamin hasil Produk pada Lahan Petani Kedelai Hitam berjumlah minimal 185 ton. Namun demikian bilamana selisih kekurangan antara volume aktual panen Produk dengan uang muka pembelian Produk yang telah dibayarkan oleh Pihak Ketiga, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang muka pembelian Produk kepada Pihak Ketiga.

5.2 Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berkewajiban membantu biaya pembinaan yang dibutuhkan oleh Pihak Keempat seperti yang diuraikan dalam Pasal perjanjian ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak

Keempat akan diatur secara terpisah dan diatur secara terpisah dan dibuat antara Pihak Kedua dan Keempat.

- b. Apabila diperlukan, Pihak Kedua akan membantu peralatan pengolahan pasca panen kepada Petani Kedelai Hitam berdasarkan usulan dari Pihak Keempat.
- c. Apabila diperlukan, Pihak Kedua akan membantu memfasilitasi Pihak Pihak Pertama untuk memperoleh bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama.

5.3 Kewajiban Pihak Ketiga:

- a. Pihak Ketiga berkewajiban membeli hasil Produk sesuai dengan ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian ini.
- b. Pihak Ketiga bertanggung jawab terhadap pengiriman Produk yang telah dinyatakan baik oleh Pihak Pertama ke Lokasi Pihak Ketiga.
- c. Apabila hasil panen dari Lahan melebihi 185.000 kg, maka Pihak Ketiga wajib membeli kelebihanannya dengan harga Rp /kg belum termasuk ongkos kirim ke pabrik/lokasi Pihak Ketiga di Subang, atau tempat-tempat lainnya yang ditentukan oleh Pihak Ketiga.

5.4 Kewajiban Pihak Keempat:

- a. Pihak Keempat berkewajiban membantu Pihak Pertama (termasuk membina petugas lapangan) dalam membina dan mengawasi Petani Kedelai Hitam dalam proses kegiatan percobaan penanaman

Produk yang mencakup awal tanam, pengawasan selama kegiatan tanam sampai dengan pasca panen.

- b. Pihak Keempat berkewajiban merekrut petugas lapangan yang bertugas sebagai pembina Petani Kedelai Hitam, penanggung jawab produksi, administrasi, dan koordinator lapangan.
- c. Pihak Keempat berkewajiban memberikan laporan tertulis hasil evaluasi percobaan penanaman kedelai hitam kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dan usulan atau saran untuk perbaikan.

2. Pengurus gapoktan membuat perencanaan berdasarkan prediksi, berapa ha yang akan ditanami kedelai, pada musim marengan berapa ha dan pada waktu kemarau berapa ha. Setelah itu dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Unilever. Jika sudah disetujui maka Gapoktan menindak lanjuti.

3. Pengurus Gapoktan Datang ke masyarakat, dan mendata siapa yang ingin menanam, berapa luas lahan yang akan ditanami dan berapa benih yang dibutuhkan. Kemudian dari hasil pendataan itu disusun CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi). Akan tetapi setelah benih diberikan kadang ada petani yang tidak segera ditanam, atau tidak jadi menanam. Data yang sudah ada akhirnya perlu dirubah lagi. Berikut adalah data yang diperoleh dari Kantor Gapoktan mengenai CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) tahun 2010 berdasarkan Poktan:

Tabel 15
Daftar CPCL Gapoktan Rejo Mulyo

No	Kelompok Tani	Dusun	Verifikasi Kebutuhan Benih (kg)	Luas (ha)	Jumlah Peserta
1.	Gondang Rejo I	Gondang	600	17,14	79
2.	Gondang Rejo II	Pagutan	335	9,79	38
3.	Gondang Rejo V	Baksari	215	6,14	53
4.	Gondang Rejo VIII	Seso	190	5,34	27
5.	SidoMakmur I	Pringkuku	170	4,86	38
6.	Sido Makmur II	Pringkuku	380	10,86	44
7.	Sido Makmur III	Pringkuku	290	8,29	45
8.	Tani Mulya	Jodog	115	3,29	33
9.	Pindul Malmur	Pindul	305	8,71	47
10.	Karya Makmur	Pagutan	185	5,29	51
11.	Maju Makmur	Gondang	245	7,00	32
12.	Wayah Makmur	Pagutan	305	8,71	40
13.	Kembang Rejo	Seso	150	4,29	21
14.	Sambi Rejo	Seso	165	4,71	48
	Jumlah		3650	104,29	596

CPCL ini kemudian disetorkan ke Unilever sebagai buktit tertulis bahwa benih yang dipakai adalah 3650 kg. Jika ada benih yang sisa maka nantinya digunakan untuk sulam jika ada kedelai yang tidak tumbuh.

- Pengurus Gapoktan menyusun realisasi penanaman kedelai. Tim datang langsung ke lapangan dan meihat tanaman kedelai. Jika ada kedelai yang tidak tumbuh maka menganjurkan untuk menyulam kembali.

Dibawah ini adalah data mengenai realisasi tanam P3KH:

Tabel 16
Realisasi Tanam P3KH Tahun 2010

No	Nama Klp.tani	Petani	Jumlah Benih (kg)		% daya tumbuh	Luas Penanaman	Luas Tanam (ha)	Populasi (btg)	Jumlah Polong per batang	% luas panen
			Pokok	Sulam						
1	Gondang Rejo I	79	390	52	 47	11.14	4.29	1,501,700	50	95
2	Gondang Rejo II	38	366	50	 51	10.46	5.48	1,917,800	-	-
3	Gondang Rejo V	50	277	32	 41	7.91	3.46	1,210,900	-	-
4	Gondang Rejo VIII	27	225	35	 56	6.43	3.37	1,305,700	-	-
5	Sido Makmur I	38	174	45	 49	4.97	2.45	857,700	-	-
6	Sido Makmur II	46	420	41	 52	12.00	6.85	2,396,400	15	50
7	Sido Makmur III	41	276	2	 52	7.89	4.22	1,477,200	-	-
8	Tani Mulya	28	113	5	 59	3.23	1.95	678,600	-	4
9	Pindul Makmur	47	495	8	 50	14.14	7.22	2,526,800	-	-
10	Karya Makmur	51	195	18	 58	5.57	3.33	1,164,300	-	-
11	Wayah Makmur	35	285	11	 48	8.14	4.08	1,426,800	-	-
12	Kembang Makmur	41	314	10	 43	8.97	4.00	1,399,200	-	-
13	Kembang Rejo	21	150	2	 58	4.29	2.54	888,700	-	-
14	Sambi Rejo	49	215	14	 58	6.14	3.52	1,232,000	-	-
15	Sido Mulyo	57	195	3	 46	5.63	2.60	911,000	-	-
		648	4092	295	53	116.91	59.71	20,894,700		

Sumber: Kantor Gapoktan Rejo Mulyo 2011

Kemudian setelah kedelai tumbuh pengurus Gapoktan juga terjun ke lapangan untuk melihat perkembangan tanaman kedelai. Dari situ mereka mengukur berapa daya tumbuh kedelai, berapa populasinya, dan berapa jumlah polong perbatang, kemudian setelah itu barulah mereka menyusun realisasi kedelai yang nantinya disetorkan ke Unilever.

5. Proses selanjutnya adalah menyetorkan realisasi tanam tersebut ke Unilever dan meminta talangan dana ke Unilever untuk pembelian kedelai hasil panen petani binaan. Pada tahun 2010 Gapoktan mendapatkan dana untuk

pembelian kedelai dari petani sebesar Rp 160.000.000,- dana talangan benih Rp 48.010.000,- sehingga totalnya Rp 208.010.000,- Kemudian dana yang digunakan untuk pembelian kedelai Rp 135.238.733,- dan dana benih kedelai Rp 48.010.000,- sehingga dana yang dikembalikan ke Unilever sebesar Rp 24.761.267,- Dana tersebut digunakan untuk membeli hasil produksi kedelai petani dengan harga Rp 5.800,- per kg, dengan syarat kedelai dalam keadaan sudah disortir. Namun jika kedelai belum bersih harga dikurangi sebesar Rp.300,- untuk biaya sortir ulang. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

” Pada tahun 2010 dan 2011 musim marengan Gapoktan membeli hasil produksi kedelai petani dengan harga Rp 5.800,- per kg. Akan tetapi jika kedelai belum bersih akan dipotong sebesar Rp 300,- sebagai pengganti biaya sortir ulang. Jadi Gapoktan membeli hasil produksi kedelai petani dengan harga Rp 5.500,-.” (wawancara dengan Bapak Muryadi, Pengurus Unit Saprodi Gapoktan Rejo Mulyo, pada hari kamis, 26 Januari 2012, pukul 15.00, di rumah Kades Pringkuku).

Setelah proses jual beli selesai, pengurus Gapoktan membuat laporan hasil produksi, dan laporan pembelian, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 17
Laporan produksi P3KH Marengan tahun 2010

No	Nama Kelompok Tani	Rekapitulasi Realisasi Setoran Hasil (kg)						Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Gondang Rejo I	617,0	48,5	699,5	267,5	110,5	25,5	1.768,5
2	Gondang Rejo II	501,5	859,5	691,5	265,5	139,0	50,5	2.507,5
3	Gondang Rejo V	658,5	776,0	582,5	36,5	13,0	-	2.066,5
4	Gondang Rejo VIII	1.098,5	69,5	341,0	-	-	-	1.509,0
5	Sido Makmur I	145,5	278,0	349,0	58,0	104,5	231,5	1.166,5
6	Sido Makmur II	852,5	119,5	791,5	958,0	183,5	-	2.905,0
7	Sido Makmur III	222,0	149,5	409,5	368,0	312,5	663,5	2.125,0
8	Tani Mulya	331,5	273,5	67,5	-	-	-	672,5
9	Pindul Makmur	263,0	573,0	673,0	1.006,0	610,0	16,0	3.144,0
10	Karya Makmur	984,5	38,5	43,0	62,5	-	-	1.128,5
11	Maju Makmur	718,0	308,0	291,5	22,0	-	-	1.339,5
12	Wayah Makmur	991,0	96,5	430,5	123,0	36,5	16,5	1.694,0
13	Kembang Rejo	168,5	212,0	127,0	-	-	-	507,5
14	Sambi Rejo	393,0	382,5	178,0	227,0	-	-	1.180,5
15	Sido Mulyo	234,5	1.029,0	-	-	-	-	1.263,5
	Jumlah	8.152,5	5.213,5	5.675,0	3.394,0	1.509,5	1.003,5	24.948,0

Sumber: Kantor Gapoktan Rejo Mulyo 2011

Tabel 18
Laporan Pendapatan Gapoktan Rejo Mulyo 2010

No	Uraian	Debet	No	Uraian	Kredit
1	Saldo	-	1	Pembelian	153.095.125
2	Dana Talangan Unilever	160.000.000	2	Beban Konsumsi	435.000
3	Dana Talangan Benih	48.010.000	3	ATK dan alat habis pakai	2.299.600
4	Cash Back		4	Beban Transportasi	2.290.525
			5	Beban Organisasi/ Opnal	5.884.500
			6	Upah tenaga kerja	7.535.000
			7	Insentif	5.245.000
			8	Pengembalian Sisa dana	24.761.267
			9	Disetorkan ke Gapoktan	-
				Saldo	6.463.750
	Jumlah	208.010.000		Jumlah	208.010.000

Sumber: Kantor Gapoktan Rejo Mulyo 2011

Tabel 19
Laporan Penggunaan Dana Gapoktan Rejo Mulyo 2010

Uraian	Jumlah Kedelai (kg)	Harga per kg (Rp)	Jumlah
Dana Talangan Unilever			160.000.000
Dana Talangan Benih			48.010.000
Jumlah			208.010.000
Setoran Konsumsi	21.131,1	6400	135.238.733
Setoran Benih	6.317,1	7.600	48.010.000
Sisa / dikembalikan			24.761.267

Sumber: Kantor Gapoktan Rejo Mulyo 2011

Tabel 20
Laporan Pendapatan Bersih Gapoktan Rejo Mulyo 2010

Uraian	Jumlah Kedelai (kg)	Uraian	Selisih harga	Jumlah
Pendapatan Konsumsi	21.131,1		900	19.017.947
Pendapatan Bersih	6.317,1		1763	11.135.461
		Pendapatan Kotor		30.153.408
		Beban Biaya		23.689.625
		Pendapatan Bersih		6.463.783

Sumber: Kantor Gapoktan Rejo Muyo 2011

Dana talangan Unilever dan dana talangan benih yang awalnya yang awalnya berjumlah Rp 208.010.000,-, digunakan sebesar Rp183.248.733, - untuk setoran konsumsi dan setoran benih, serta dikembalikan ke Unilever sebesar Rp 24.761.267,-. Sehingga laba yang diperoleh Gapoktan sebesar Rp 6.463.783,-.

- Proses Gudang, yang terdiri dari sortasi, standarisasi mutu, dan packing. Sortasi adalah proses memilih dan membersihkan kedelai hitam dari kotoran dan biji yang rusak, hingga dihasilkan kedelai yang bersih dan utuh. Kemudian standarisasi mutu kedelai hitam adalah bersih, utuh dan kering. Untuk kedelai yang bersih dan utuh diperoleh dengan cara sortasi, kemudian untuk kedelai yang kurang kering atau kadar airnya terlalu tinggi, harus dikeringkan terlebih dahulu dengan alat pengering, hingga dihasilkan kedelai yang sesuai standar. Kemudian proses packing yang terdiri dari mengemas kedelai dengan kantong plastik, kemudian kantong plastik tersebut dikemas lagi dengan sak kemudian dijahit dengan benang.

Tiap satu sak berisi 50 kg kedelai. Setelah semua proses selesai semua kedelai disetorkan ke Subang Jawa Barat, dan dilanjutkan dengan penyelesaian masalah keuangan. Kedelai yang sudah di setor diperiksa kembali apabila ada yang tidak memenuhi standar kedelai akan dibeli dengan harga yang berbeda.

7. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan dalam program kemitraan ini terfokus pada evaluasi produksi dan komitmen. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan bapak Reno (Penyuluh Pertanian) sebagai berikut:

”Evaluasi yang dalam pelaksanaan kemitraan dengan Unilever lebih ditekankan pada pencapaian produksi perseorangan. Jika produksi bagus kemitraan akan tetap berjalan (lanjut), jika produksi rendah akan dapat peringatan, dan jika gagal akan dihentikan.” (wawancara pada hari Sabtu 18 Februari 2012, di rumah bapak Reno).

Ini semua dilakukan agar petani mau berusaha meningkatkan produksinya dengan ketrampilan yang telah diberikan. Karena jika ketrampilan itu dilaksanakan dengan baik hasilnya akan baik pula.

Dari kemitraan Gapoktan dengan Unilever dalam P3KH ini, kemudian dikembangkan program lain yang berkaitan dan bermanfaat untuk masyarakat yaitu Program Gapoksi (Gabungan kelompok sortasi). Gapoksi meruakan program pemberdayaan terhadap ibu-ibu petani. Dalam program ini ibu-ibu diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat untuk mereka dan juga diberi dana stimulant agar digunakan untuk usaha. Adapun tujuan dari Gapoksi, menurut hasil wawancara dari pendamping Gapoksi adalah:

”Tujuan Gapoksi ada 4 yaitu memberdayakan perempuan, meningkatkan perekonomian, membuat perilaku hidup bersih dan sehat dan pengembangan usaha kelompok. Adapun implementasi yang sudah dilakukan adalah: 1. pelatihan daur ulang sampah atau yang biasa disebut dengan ”trashion”, 2. pemberian materi PHBS, 3. membuat media kecil sederhana seperti cergam, komik, dan kobar, 4. Pelatihan management keuangan, 5. Pelatihan pembuatan produk makanan, seperti kue-kue, 6. belajar teater, 7. Program saraswati (penjualan produk-produk unilever) yang melibatkan ibu-ibu sortasi” (Wawancara dengan Himawan, pendamping Gapoksi pada hari Sabtu, 25 Februari 2012, pukul 09.00, di rumah Bapak Sukarni).

Di Desa Pringkuku terdapat 11 kelompok ibu sortasi yang tersebar di tujuh Dusun di desa Pringkuku, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 21
Daftar Gabungan Kelompok Sortasi Desa Pringkuku

No	Nama Kelompok	Alamat	Anggota
1	Malika Unggul	SM I Pringkuku Pacitan	30
2	Bango Berkembang	SM II Pringkuku Pacitan	46
3	KIS Bango	SM III Pringkuku Pacitan	47
4	Malika Langgeng	Jodog Pringkuku Pacitan	15
5	Malika Makmur	Pagutan etan Pringkuku Pacitan	51
6	Bango Jaya	Pagutan kulon Pringkuku Pacitan	17
7	Malika Indah	Gondang I Pringkuku Pacitan	39
8	Bango Malika	Gondang Pringkuku Pacitan	49
9	Malika Jaya	Baksari Pringkuku pacitan	32
10	Malika Hitam	Seso Pringkuku Pacitan	32
11	Sumber Malika	Pindul Pringkuku Pacitan	32
		Jumlah	390

Sumber: Data Gapoksi 2010

Kelompok ibu sortasi di Desa Pringkuku sebanyak 11 kelompok, dengan total anggota 390 orang yang tersebar di tujuh dusun. Di Dusun Pringkuku terdapat tiga kelompok ibu sortasi yaitu, Dusun Gondang dua kelompok sortasi, Dusun Pagutan dua kelompok sortasi, dan empat Dusun lainnya satu kelompok sortasi.

Terkait tujuan Gapoksi yang pertama memberdayakan perempuan yaitu dengan cara diajarkan membuat media kecil sederhana seperti cergam, komik, dan kobar. Ini bermanfaat untuk memberdayakan ibu-ibu secara tidak langsung. Karena dengan membuat cerita bergambar, komik, dan koran selembur berarti ibu-ibu berlatih untuk berpikir kreatif dan kegiatan ini berguna untuk menyalurkan bakatnya. Lalu ibu-ibu juga diajak belajar teater, dan dilombakan. Dengan belajar teater ibu-ibu berani tampil di depan umum, yang tadinya hanya di rumah saja kini ibu-ibu bisa melaksanakan kegiatan keluar rumah. Kemudian pelatihan management keuangan, dimana ibu-ibu diajari untuk membuat perencanaan belanja, dengan membedakan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan masa depan. Selanjutnya pelatihan daur ulang sampah atau yang biasa disebut dengan "trashion", dimana ibu-ibu diajarkan untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Diantaranya dari bungkus sabun, shampo, permen, dari sedotan limun dan lain-lain. Barang-barang tersebut dimanfaatkan menjadi taplak meja, tas, topi, dan sebagainya. Ada juga pelatihan pembuatan makanan dan kue-

kue. Dan terakhir adalah program saraswati yang bisa menambah lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu fasilitatornya.

Dari kegiatan daur ulang sampah dan pembuatan makanan serta kue, apabila itu dilaksanakan dengan baik maka itu bisa menjadi tujuan Gapoksi yang kedua yaitu meningkatkan perekonomian. Namun sayangnya ibu-ibu di Desa Pringkuku hanya sebagian kecil menerapkan itu. Kemudian terkait tujuan yang ketiga membuat perilaku hidup bersih dan sehat, ibu-ibu diajarkan untuk cuci tangan sebelum melakukan aktivitas, gosok gigi yang benar, mencuci sayur atau buah sebelum dimakan, pencegahan demam berdarah dan cikungunya, dan lain sebagainya.

Tujuan Gapoksi yang terakhir atau keempat adalah pengembangan usaha kelompok, dimana setiap kelompok sortasi diberikan dana stimulan sebesar Rp 470.000,- yang diharapkan digunakan untuk usaha. Namun kenyataannya uang tersebut digunakan untuk usaha memproduksi makanan seperti kripik, minuman serbuk jahe, tepung mokaf, dan juga disimpan pinjamkan. Dalam kegiatan usaha kelompok tersebut ada kelompok yang berhasil dan dana tersebut berkembang ada juga yang kurang berkembang. Mengenai perkembangan dana stimulan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22
Daftar perkembangan Dana Stimulan Gabungan Kelompok Sortasi
Desa Pringku

No	Nama Kelompok	Kegiatan Kelompok	Stimulan Awal (Rp)	Perkembangan		Total Dana Akhir (Rp)
				Usaha Kelompok	Dana Swadaya	
1	Malika Unggul	Tepung mokaf, budidaya jamur	470.000	305.000		775.000
2	Bango Berkembang	Jahe instan, Simpan pinjam	470.000	867.000		1.397.000
3	KIS Bango	Simpan pinjam, kripik ketela, geplak	470.000	1.765.000		2.235.500
4	Malika Langgeng	Simpan pinjam	470.000	765.000		1.235.500
5	Malika Makmur	Simpan pinjam, kacang selimut, krecek	470.000	3.147.000	2.500.000	3.617.000
6	Bango Jaya	Simpan pinjam, kripik pisang	470.000	1.318.200		1.788.200
7	Malika Indah	Tepung mokaf, keripik pisang & ketela	470.000	965.000		1.435.000
8	Bango Malika	Simpan pinjam, keripik ketela & pisang	470.000	2.546.000		3.016.000
9	Malika Jaya	Simpan pinjam, keripik ketela	470.000	598.600		1.068.600
10	Malika Hitam	Simpan pinjam, keripik pisang	470.000	1.318.200		1.788.200
11	Sumber Malika	Simpan pinjam, keripik ketela & pisang	470.000	1.142.600		1.612.600

Sumber: Data Gapoksi 2010

Dana stimulant tersebut membantu ibu-ibu anggota dalam mengembangkan usaha kelompok. Bahkan juga menjadikan ibu-ibu mengembangkan usaha sendiri, sehingga bisa menambah pendapatan mereka. Dari pengembangan usaha tersebut, pendamping Gapoksi juga mendaftarkan produk makanan tersebut, sehingga telah ada PIRT nya. Selain itu ada juga program saraswati, yaitu dengan menjual produk-produk Unilever dengan harga di bawah harga pasar. Dimana program itu sangat bermanfaat karena Desa Pringkuku jauh dari kota, sehingga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci, shampo, pasta gigi, kecap dan kebutuhan lainnya. Apalagi harga yang ditawarkan adalah harga yang dibawah harga pasar. Masyarakat Desa Pringkuku merasa memperoleh manfaat dari program ini.

6. Dampak kemitraan stakeholder bagi masyarakat Desa Pringkuku dalam perubahan kondisi sosial dan ekonomi:

a. Dampak Sosial

1. SDM petani menjadi lebih baik karena adanya sekolah petani yang diadakan oleh Unilever. Perwakilan petani disekolahkan di Sekolah Petani Kedelai Hitam (FIELD) di Yogyakarta. Kemudian hasil dari sekolah tersebut diajarkan kepada rekan-rekan petani di Desa Pringkuku. Dengan sekolah tersebut petani yang tadinya masih menggunakan budidaya tanam tradisional, menjadi tahu cara menanam yang modern, baik, dan benar, dari segi pemilihan bibit yang baik, jarak

tanam yang pas, pemupukan yang pas, obat hama yang sesuai keperluan, cara panen dan hasil panen yang sesuai standar. Dan yang paling penting dari sekolah ini petani lebih mandiri karena dituntut untuk bisa menemukan masalah sendiri di lapangan, penyebab masalah tersebut, dan menyelesaikan masalah tersebut secara bersama dengan petani lain.

Hal ini didukung hasil wawancara sebagai berikut:

“Dengan mengikuti program kemitraan ini saya jadi lebih tahu bagaimana cara memilih mengolah tanah kering, cara menanam kedelai yang baik, bagaimana jarak tanam yang benar, pemupukan yang pas, dan diperkenalkan dengan bibit kedelai malika yang sebelumnya disini tidak ada” (wawancara dengan Bapak Sugiyatno, (petani) anggota Gapoktan Rejo Mulyo, pada hari Rabu, 8 Februari 2012, pukul 18.30, di rumah Bapak Sugiyatno).

Dari kemitraan ini petani mendapatkan manfaat dari segi SDM. Mereka lebih tahu tentang bagaimana menanam kedelai yang baik dan benar agar produktivitas bisa meningkat, serta mereka dikenalkan pada bibit kedelai hitam unggul “malika”. yang sebelumnya belum ada petani yang menanam kedelai tersebut. Walaupun sebelumnya pernah ada yang menanam kedelai, namun yang ditanam adalah kedelai kuning.

2. Pemberdayaan terhadap ibu-ibu petani memberikan dampak lebih percaya diri kepada ibu-ibu anggota ketika menghadapi orang lain.

Karena ibu-ibu dididik untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan informasi kepada orang lain, serta berani tampil di tempat umum dengan acara-acara yang diadakan oleh Unilever seperti Teater dan Apresiasi seni lainnya. Ibu-ibu diberi materi Perilaku hidup

bersih dan sehat, agar bisa diterapkan ketika di rumah dan diajarkan kepada keluarganya, juga diajarkan agar ibu-ibu berani mengambil keputusan dalam rumah tangga. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

“Dengan ikut Gapoksi banyak keuntungan yang saya dapatkan. Tiap kelompok dapat dana stimulant Rp 470.000,- yang digunakan untuk usaha, dan kelompok saya menggunakannya untuk produksi jahe instan bubuk, dan juga sudah mendapatkan PIRT. Sekarang modal kelompok kami telah bertambah. Saya juga tambah banyak pengalaman, karena sering ada pelatihan-pelatihan pembuatan makanan. Saya juga sering ada acara di luar kota seperti festival jajanan bango di Surabaya, acara lomba di Yogyakarta, dan lain-lain.” Wawancara dengan Ibu Hartuni (petani), pada hari Kamis, 9 Februari 2012, pukul 18.30, di rumah Ibu Hartuni).

Menanggapi pertanyaan yang sama, diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Setelah mengikuti program Gapoksi pengalaman saya bertambah. Dalam Gapoksi sering diadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pembuatan makanan dan kue-kue, pelatihan daur ulang sampah yang setelah di daur ulang nantinya jadi barang yang berguna seperti taplak meja, topi, dan lain-lain. Lumayanlah tidak perlu membeli taplak meja karena bisa membuat sendiri, dan saya sekarang juga mulai membuat roti bolu yang dijual suami saya sambil jual sayur, saya titipkan di warung-warung dekat rumah, dan pasar, dan Alhamdulillah laris. Dan tiap kelompok itu harus bisa menyuguhkan tontonan tiap kali ada lomba ataupun ada tamu dari Unilever maupun dari pihak pemerintah seperti menteri, dirjen. Dan sekarang ini kelompok saya sedang latihan gamelan tiap hari Rabu dan Minggu”. (Wawancara dengan Ibu Nur (petani), pada hari Rabu, 15 Februari 2012, pukul 15.00, di rumah Ibu Nur).

Dengan adanya kemitraan dengan Unilever ternyata ibu-ibupun merasakan manfaatnya, terutama mereka merasa pengalaman mereka bertambah, karena sering ada pelatihan-pelatihan yang harapannya

setelah diberi pelatihan mereka menerapkannya, sehingga pelatihan yang diberikan bermanfaat dan ibu-ibu bisa lebih berdaya.

3. Dari sisi kelembagaan Gapoktan bisa menjadi lembaga yang lebih maju karena ada kegiatan di dalamnya dan menjadi lembaga yang pengurusnya mampu mengelola usahanya melalui kemitraan yang dilaksanakan dengan Unilever. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“Dulunya Gapoktan belum bisa apa-apa, apalagi mengembangkan usahanya. Kegiatan di Gapoktan hanya arisan dan simpan pinjam tiap bulan sekali, dan ada pertemuan hanya ketika ada sosialisasi dari Dinas tanaman pangan. Namun setelah bermitra kegiatan di Gapoktan banyak, pengurus Gapoktanpun punya tugas dan tanggungjawab yang harus dikerjakan. Sebelum menanam kedelai Gapoktan bertugas mengecek luas lahan petani untuk menentukan berapa banyak benih yang dibutuhkan, dan bertanggungjawab menyiapkan benih kedelai yang akan ditanam masyarakat. Setelah benih diberikan pengurus Gapoktan perlu mengecek lagi apakah benih sudah ditanam. Kemudian melihat perkembangannya dan mengambil sampel dari beberapa batang kedelai kira-kira berapa panen yang akan dihasilkan. Lalu melaporkan kepada Unilever sehingga Unilever memberikan 80% uang untuk membeli hasil panen petani yang telah diperkirakan tadi. Setelah panen pengurus Gapoktan membeli hasil panen ke petani dengan sistem jemput bola. Kemudian hasil pembelian kedelai tersebut disortir ulang, dikemas, dan disetorkan ke Subang.” (wawancara dengan Bapak Sukarni, Seksi Gudang Gapoktan Rejo Mulyo, pada hari Sabtu, 31 Desember 2011, pukul 15.30, di kantor Gapoktan).

Kemitraan yang dilaksanakan Gapoktan dengan Unilever ternyata berpengaruh terhadap dinamika Gapoktan. Di Gapoktan dulunya belum ada kegiatan rutin seperti yang dilakukan sekarang, bahkan dulu pengurusnya bisa dikatakan tidak ada pekerjaan. Dengan adanya kemitraan mereka jadi sibuk dengan tugasnya masing-masing, dan Gapoktanpun semakin berkembang dan menjadi lembaga petani yang hidup.

4. Petani menjadi lebih gaul, dan sering bertemu dengan orang-orang penting seperti Menteri Pertanian, Dirjen Departemen Pertanian dan lain-lain serta sering keluar kota karena acara yang diadakan oleh Unilever. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:

“Dulu saya jarang sekali ke luar kota, tapi sekarang jadi sering karena mengikuti acara yang diadakan Unilever seperti apresiasi seni, lomba-lomba, festival jajanan bango, dan tiap beberapa bulan sekali saya mengambil insentif program saraswati ke Jogja bersama ibu-ibu yang lain. Saya juga ketemu langsung dengan Pak menteri Pertanian, Pak Dirjen Pertanian, Pak Presiden, artis Surya saputra dan masih banyak lagi dan kami bisa ngobrol langsung dengan mereka ketika ada acara kunjungan ke Gapoktan.” Wawancara dengan Ibu Hartuni (petani), pada hari Kamis, 9 Februari 2012, pukul 18.30, di rumah Ibu Hartuni).

Para petani merasa bangga dan senang karena mereka bisa bertemu langsung dengan Menteri, Presiden, artis dan lain-lain.

2. Dampak Ekonomi:

1. Adanya pertambahan peredaran uang dalam masyarakat, yang tentunya berpengaruh terhadap penambahan pendapatan masyarakat walaupun dalam skala kecil. Dan dipaparkan sebagai berikut:

“Faktanya dengan adanya kemitraan dengan Unilever, uang yang masuk ke masyarakat berjumlah ratusan juta. Ini berarti terjadi perputaran uang dalam masyarakat, dan otomatis berpengaruh kepada penghasilan petani, walaupun dalam skala kecil” (wawancara dengan Bapak Reno Subroto, PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, pada hari kamis, 5 Januari 2012, pukul 16.00, di rumah Bapak Reno).

Selain itu bapak Sugiyatno memaparkan, jika iklim mendukung hasil dari kedelai hitam juga lumayan menambah penghasilan, dan dijelaskan berapa biaya yang dikeluarkan serta hasil yang diterima, yang dijelaskan sebagai berikut:

“Ketika panen 2010 dulu, saya panen 183 kg. Biaya untuk produksinya Rp 784.000,-, pendapatan dari hasil panen Rp 1.061.400. Ketika dihitung keuntungan yang saya terima hanya Rp 277.400,-. Kalau di hitung hitung hanya menambah pendapatan Rp 92.500 per bulan. Tapi menanam kedelai hitam apabila iklim mendukung hasilnya panennya lebih lumayan dari pada saya menanam kedelai putih selain produksinya lebih rendah harganya juga lebih murah. Dulu saya menanam kedelai putih hanya panen 80 kg, dan per kilonya Rp 4000,-. Total pendapatan saya Rp 320.000,- hannya saja biaya produksi sedikit lebih rendah dari pada kedelai hitam, karena kadang tidak dipupuk. Petani itu tidak ada untungnya. Karena itu saya berharap harga pembelian kedelai hitam dinaikkan lagi agar bisa membantu menambah pendapatan saya. Karena dengan tambahan Rp 92.000,-perbulan untuk makan saja tidak cukup, ditambah lagi dengan kebutuhan lain yang masih banyak.” (wawancara dengan Bapak Sugiyatno, (petani) anggota Gapoktan Rejo Mulyo, pada hari Sabtu, 25 Februari 2012, pukul 19.30, di rumah Bapak Sugiyatno).

Dari segi ekonomi kemitraan dengan Unilever menunjukkan bisa menambah pendapatan petani tapi hanya dalam skala kecil, namun pendapatan tersebut tidak bisa menjadikan berdaya keadaan ekonomi petani. Karena dari hasil penjualan kedelai tersebut hanya habis untuk dikonsumsi selama beberapa hari.

2. Adanya dana stimulan terhadap ibu-ibu, dan pelatihan daur ulang sampah menjadi taplak meja dan sebagainya dan pelatihan pembuatan kue dan membantu dalam mendapatkan PIRT produknya menjadikan ibu-ibu mampu memproduksi dan berlatih untuk memproduksi barang untuk dijual dan sebagainya dipakai mereka sendiri. Dengan bisa memproduksi sendiri berarti ibu-ibu bisa mengendalikan pengeluaran mereka. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Dengan adanya stimulant membantu ibu-ibu untuk modal produksi, kemudian program saraswati (menjual produk unilever) juga menambah penghasilan tambahan untuk ibu-ibu yang menjadi

fasilitator, walaupun sedikit tapi lumayan bisa buat tambahan belanja kebutuhan sehari-hari.” Wawancara dengan Ibu Hartuni (petani), pada hari Kamis, 9 Februari 2012, pukul 18.30, di rumah Ibu Hartuni).

Menanggapi hal yang sama, Ibu Nur menjelaskan sebagai berikut:

”Dari hasil pelatihan saya di Gapoksi, saya sekarang membuat roti bolu dan juga bolu kering, dan sudah ada PIRNya. Dari hasil penjualan tersebut bisa menambah penghasilan sedikit. Kemudian dengan menjadi fasilitatornya saraswati saya juga mendapat insentif. Kalau dihitung-hitung tidak sesuai dengan capeknya karena insentif itu dihitung berdasarkan poin. Kemarin saja 8 periode atau sekitar 4 bulan saya mendapat insentif Rp 330.000,-. Tapi lumayan bisa buat jajan. (Wawancara dengan Ibu Nur (petani), pada hari Rabu, 15 Februari 2012, pukul 15.00, di rumah Ibu Nur).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa program kemitraan dapat menambah penghasilan mereka tapi tidak bisa membuat perekonomian mereka lebih berdaya karena tambahan tersebut hanya dalam skala kecil dan belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari (kebutuhan pokok) .

C. Analisis dan Interpretasi

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti berusaha untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana metode ini ditujukan untuk dapat menggambarkan fenomena dampak Program Kemitraan di Desa Pringku Kabupaten Pacitan. Sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan program berikutnya. Berikut secara berturut-turut disajikan analisis dan interpretasi data-data yang dimaksud.

1. Peran Stakeholder dalam memberdayakan masyarakat Desa Pringkuku.

a. Peran Pemerintah (Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan).

Hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat merupakan unsur yang tidak terlepas dalam penyelenggaraan *good governance*. Seperti yang dijelaskan Dalam salah satu prinsip *governance*, yaitu dikemukakan oleh Mustopadjidja dalam Syamsiar (2006: 63-66), yaitu: Prinsip demokrasi dan pemberdayaan dimana Dinas Tanaman pangan dan pemerintah Desa Pringkuku mengakui dan menghormati hak dan kewajiban warga negara. Peran negara diperlukan dalam pemberdayaan seperti pengurangan hambatan atas partisipasi masyarakat, perluasan akses pelayanan serta pengembangan kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam semua program baik dari pemerintah maupun swasta, dan juga diberi kebebasan untuk menggunakan segala fasilitas yang ada untuk menunjang keberhasilan program tersebut agar bermanfaat untuk masyarakat.

Prinsip pelayanan, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat serta menjadi mitra atau melakukan kerjasama dengan masyarakat diperlukan semangat melayani masyarakat, yang bisa terwujud melalui pembudayaan perilaku aparatur. Dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan dan pemerintah Desa Pringkuku membudayakan perilaku aparatur yang lebih baik, lebih ramah, dan lebih peduli kepada masyarakat. Jika ada

kesulitan atau permasalahan program di lapangan pemerintah siap membantu dan berupaya menyelesaikan masalah tersebut.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas Dalam upaya peningkatan partisipasi dan kemitraan maka diperlukan beberapa pendekatan yaitu mengembangkan keterbukaan birokrasi pemerintah, dimana Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan terbuka kepada masyarakat atas dana-dana yang diperoleh dari pusat, dan juga berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dari kinerja yang dilakukan.

Prinsip Partisipasi yaitu pemerintah desa Pringkuku dan dinas tanaman pangan Kabupaten Pacitan Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat melalui proses kemitraan serta kebersamaan yang dapat dilakukan dengan pola desentralisasi pelayanan yaitu memberikan wewenang kepada pengurus Gapoktan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat sejalan dengan meningkatnya peran serta masyarakat.

Prinsip Kemitraan, dimana untuk kemajuan pembangunan nasional maka diperlukan iklim yang kondusif bagi terciptanya kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dalam skala kecil, menengah maupun besar dan mendorong pertumbuhannya. Dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pacitan telah menganut prinsip kemitraan ini. Dengan tujuan agar Gapoktan bisa tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang lebih mandiri.

Jadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan peran dari ketiga unsur *governance* tersebut untuk saling bekerjasama menjadi mitra dan saling melengkapi dalam memberdayakan masyarakat. Sejalan dengan pendapat (LAN:2000), bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi diantara domain-domain negara. Kemitraan ini terbukti mampu memberikan dampak positif, bagi pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat. Dampak yang dihasilkan mampu menimbulkan kesinergisan dari ketiga *stakeholder* yang ada. Dari kemitraan tersebut tidak ada yang dianggap dominan. Semua mempunyai peran yang penting dan saling mendukung.

Dari hasil penelitian dilapangan Peranan pemerintah (dinas tanaman pangan) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pringkuku adalah sebagai penyusun formulasi, penetapan *Policy*, Pembuat Kebijakan: Umum, Khusus / Departemen / sektoral, Penganggaran, penetapan Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan, Peraturan hukum, penyelesaian sengketa, fasilitator, yaitu dengan memberikan bantuan dana, alat, sistem manajemen, informasi, teknologi serta edukasi terhadap masyarakat. Pemerintah juga berperan sebagai monitoring, evaluasi, dan mediasi.

Hal tersebut sejalan dengan peran pemerintah sebagai aktor dalam pemberdayaan masyarakat yang disebutkan Sulistiyani (2004: 97): "Peran

pemerintah yang paling menonjol terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan” Lebih rincinya bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 23
Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan Penetapan <i>Policy</i> , Implementasi Monitoring dan evaluasi. Mediasi.	Kebijakan: Politik, Umum, Khusus/ Departemen/ sektoral. Penganggaran, Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan. Peraturan hukum, penyelesaian sengketa.	Dana, jaminan, alat, teknologi, network, system manajemen informasi, edukasi.

Sumber: Sulistiyani (2004: 97)

Dalam perannya sebagai formulasi peran dinas tanaman pangan membuat perencanaan, yaitu menggabungkan program dari pemerintah pusat atau provinsi dengan potensi yang ada di wilayah, sehingga program dari pemerintah pusat atau provinsi bisa ditempatkan pada wilayah yang sesuai, setelah itu mengalokasikan target ke wilayah-wilayah kecamatan.

Dalam menetapkan *policy* dinas tanaman pangan menggunakan aturan yang ada dan kebijakan yang ditetapkan itu mendukung dalam pelaksanaan program yang akan dialokasikan ke kecamatan-kecamatan. Setelah ada kebijakan, dinas tanaman pangan mengimplementasikan program dengan SDM dan SDA yang ada, dengan petugas yang dimiliki, dengan sarana dan prasarana untuk diterapkan di lapangan. Setelah diimplementasikan semua program baik dari pemerintah maupun dari swasta dimonitoring secara sistematis menurut aturan yang ada. Monitoring dilakukan oleh penyuluh pertanian/dinas langsung, tiap bulan atau

menyesuaikan. Kemudian dinas melakukan evaluasi program, dalam pelaksanaannya evaluasi sama dengan monitoring, akan tetapi evaluasi dilaksanakan dalam enam bulan sekali. Peran selanjutnya adalah melakukan mediasi ketika dilapangan ada hambatan atau permasalahan, dinas mempunyai peran untuk menyelesaikan. Namun tidak hanya itu, ketika ada swasta yang ingin masuk ke Pacitan untuk bermitra, dinas memastikan program kemitraan tersebut mau dibawa kemana nantinya, dan swasta bisa masuk karena ada mediasi dari dinas. Selain itu mediasi diperlukan untuk mengontrol peran swasta supaya berjalan wajar dan tidak merugikan masyarakat.

Bentuk output peran pemerintah dalam pemberdayaan yang pertama adalah membuat kebijakan, baik kebijakan khusus, umum, departemen dan sektoral, yaitu menangani komoditas apa yang sebaiknya ditanam sesuai dengan kondisi wilayahnya. Yang kedua adalah penganggaran, dimana pemerintah berperan sebagai pemberi anggaran untuk pelaksanaan program. Dana itu terdiri dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Output ketiga adalah sebagai pembuatan juknis dan juklak, yang berfungsi dan berkaitan dengan implementasi program agar program itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Inti dari adanya juknis dan juklak adalah sebagai acuan untuk dinas dan pelaksana program. Output yang keempat adalah penetapan indikator keberhasilan yang terdiri dari tiga aspek indikator yaitu:

1. Kelembagaan

Indikator pertama yaitu meningkatnya dinamika kelembagaan (Gapoktan), dimana Gapoktan bisa menjadi lembaga tani yang dinamis, di dalamnya terdapat aktivitas petani, bisa melayani masyarakat dengan lancar dengan berbagai sarana dan prasarananya, hingga bisa menangani pemasaran hasil produksi petani. Pada dasarnya lembaga yang dinamis adalah lembaga yang bisa mandiri dan selalu berupaya mampu memandirikan petani.

2. Masyarakat

Indikator yang kedua adalah respon atau partisipasi dari masyarakat. Respon atau partisipasi dari masyarakat terjadi karena adanya perubahan pola pikir. Tanpa adanya perubahan pola pikir masyarakat tidak akan bisa respon jika ada perubahan teknologi, dan ada informasi baru. Dari indikator ini dikatakan berhasil jika masyarakat sudah respon dan partisipatif.

3. Produksi

Indikator yang ketiga adalah peningkatan produktivitas hasil tanaman yang ditanam oleh petani. Jika produktivitas meningkat berarti mencapai indikator keberhasilan, Jika produktivitas menurun berarti petani gagal mencapai indikator keberhasilan tersebut. Karena dalam memberdayakan masyarakat, masyarakat dibimbing dan diberi contoh, dan akhirnya dituntut untuk mandiri, dan tidak tergantung bantuan orang lain.

Output peran yang kelima adalah peraturan hukum. Peraturan hukum tersebut berupa SK- SK atau penugasan-penugasan yang nantinya bisa dijadikan pegangan bagi pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah pegawai dinas tanaman pangan dan peternakan. Output yang terakhir adalah penyelesaian sengketa, yaitu jika ada permasalahan dilapangan dinas akan memberikan arahan atau solusi, berdasarkan peraturan yang ada, sehingga solusi yang diberikan bisa tepat dan benar-benar bisa menyelesaikan masalah.

Selanjutnya adalah fasilitasi yang diberikan pemerintah/dinas dalam memberdayakan masyarakat Desa Pringkuku. Yang pertama adalah terkait dengan dana. Dinas memberikan dana yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Besar kecilnya dana yang diberikan tergantung jenis programnya, yang jelas semua program sudah ada ketentuannya. Fasilitasi yang kedua adalah jaminan, dimana dinas memberikan kepastian program dan kepastian manfaat. Jika setiap program yang diprogramkan dinas dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh oleh masyarakat maka akan mendapatkan hasil yang baik. Fasilitasi yang ketiga adalah berupa alat, dalam hal ini dinas memberikan peralatan alat budidaya seperti hand traktor, dan pompa air. Peralatan panen dan pasca panen seperti, treser (mesin perontok), dan pemipil jagung. Alat pengolahan seperti alat pembuat pupuk organik, perajang (chupper), dan kendaraan (Tossa). Terakhir adalah alat yang berupa sarana dan prasarana seperti jalan usaha tani, dam, dan rumah produksi pupuk.

Fasilitasi dari dinas yang keempat adalah berupa teknologi dimana dinas memberikan anjuran dan mendampingi petani agar petani mau melaksanakan budidaya yang benar sesuai anjuran dari dinas tanaman pangan mulai dari pra panen/ budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Fasilitasi yang kelima adalah network, dimana dinas tanaman pangan mendekatkan jaringan yang bisa membantu petani dalam hal sarana, prasarana, serta pemasaran. Dalam hal ini dinas bisa juga menjalin network dengan swasta atau pihak lain yang bisa membantu petani. Fasilitasi yang keenam adalah sistem manajemen, dari dinas ada kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen.

Fasilitasi ketujuh adalah terkait dengan informasi, yaitu dinas menerima, menyampaikan, dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Namun sebelum itu dinas merubah bahasa dan tulisan yang ilmiah menjadi bahasa petani agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh petani. Yang terakhir adalah fasilitasi berupa edukasi, dimana dinas memberikan pembelajaran baik individu maupun kelompok agar bisa merubah pola pikir petani. Dimulai dengan mengadakan sekolah yang terdiri dari SLI (Sekolah Lapang Iklim), SLPTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tananam Terpadu), SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) untuk mengurangi OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

Tujuan dari pengadaan sekolah lapang khususnya SLI agar petani bisa merespon informasi iklim yang ada, agar bisa menyusun strategi

tanam yang tepat sehingga resiko kegagalan bisa dikurangi dari dampak iklim. Edukasi selanjutnya adalah pemberian penyuluhan kepada petani dengan memberikan pebelajaran teknis, sosial, atau ekonomi, tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Dari bentuk fasilitasi tersebut diatas memang bisa membantu masyarakat untuk membantu masyarakat petani memperoleh pinjaman uang dan pengetahuan baru. Namun sayang pinjaman tersebut tidak digunakan untuk usaha sehingga uang pinjaman tersebut tidak berkembang. Dan pengetahuan baru yang mereka peroleh juga tidak dimanfaatkan. Karena itu pemerintah (dinas tanaman pangan dan peternakan) mempunyai tugas untuk lebih memperbaiki lagi perannya terutama menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan program sesuai dengan aturan dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan dengann sebaik-baiknya, agar hasilnya bisa maksimal.

b. Peran Swasta (Unilever)

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peran swasta (Unilever) adalah berperan sebagai Kontribusi pada formulasi implementasi, dana, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil, monitoring, evaluasi, dan juga sebagai pemberi fasilitas baik alat, maupun tenaga ahli. Unilever berperan sebagai Kontribusi pada formulasi implementasi, dana, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil, monitoring, evaluasi, dan output berupa konsultasi, kebijakan, implementasi, private investment, dan juga sebagai pemberi fasilitas baik alat, maupun tenaga ahli. Tenaga ahli berasal dari Yayasan Unilever. Yayasan Unilever sendiri merupakan bagian dari

Unilever, dan memiliki 3 pilar, yaitu peningkatan kesejahteraan, peningkatan kesehatan, dan pemeliharaan lingkungan. Dengan menjalin kemitraan ini Unilever akan mendapatkan manfaat, karena tidak hanya mendapatkan profit tetapi juga memperluas jaringan konsumen, dan selain itu juga menciptakan hubungan yang baik dengan *stakeholder* yang terkait yaitu pemerintah, dan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan peran swasta sebagai aktor dalam pemberdayaan masyarakat yang disebutkan Sulistiyani (2004: 97), bahwa "Swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah / *policy action* bersama masyarakat." Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 24
Peran Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi implementasi, monitoring dan evaluasi.	Konsultasi & rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/ <i>policy action</i> implementasi, donator, private investment, pemeliharaan	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil.

Sumber: Sulistiyani (2004: 97)

Peran swasta dalam pemberdayaan terkait dengan empat hal. Yang pertama adalah kontribusi pada formulasi, dimana Unilever membuat perencanaan yang terkait dengan merubah kebiasaan masyarakat Desa Pringkuku, dengan teknologi, dan budidaya penanaman kedelai bersama mitranya seperti UGM. Akan tetapi formulasi tersebut harus sinergi

dengan rumusan dinas tanaman pangan dan peternakan Pacitan. Peran dalam implementasi Unilever mempunyai standar pelaksanaan tersendiri yaitu yang terkait dengan harga Unilever yang menentukan dan tidak bisa di ganggu gugat. Terkait dengan teknis, Unilever memberikan anjuran dalam hal budidaya kedelai. Terkait dengan social Unilever memfasilitasi petani dengan sekolah petani FIELD (*Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy* - Prakarsa petani untuk perikehidupan yang ekologis dan demokratis) adalah sebuah organisasi yang mendukung kelompok masyarakat marginal melalui pola pendidikan pemberdayaan. dan untuk perempuan ada program pemberdayaan perempuan Gapoksi. Terkait masalah ekonomi Unilever berperan memberikan tambahan penghasilan bagi petani di Desa Pringkuku.

Unilever juga memonitoring pelaksanaan program P3KH yang dilakukan oleh asisten lapang dari Unilever, yang dilakukan 3-4 kali dalam satu tahun. Kemudian terkait dengan evaluasi dari Unilever lebih ditekankan pada pencapaian produksi. Dalam laporan evaluasi hasil produksi dibagi menjadi tiga, yaitu stop (warna merah) bila hasil produksinya sangat buruk, warning (warna kuning) untuk yang hasil produksinya sedang, dan continue (warna hijau) untuk yang hasil produksinya bagus.

Bentuk output swasta ada lima yaitu konsultasi dimana Unilever memberikan masukan berupa rumusan kebijakan, dari hasil konsultasi tersebut ditindaklanjuti di lapangan. Ketika di lapangan ada masalah,

Unilever beserta dinas menjalin komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Sebagai donator, Unilever merupakan sumber biaya, terutama untuk benih, alat, dan dana talangan. Dalam hal pemeliharaan, Unilever mengusahakan agar program itu tetap berjalan di Desa Pringkuku.

Kemudian bentuk fasilitasi yang diberikan Unilever adalah berupa dana talangan untuk pembelian kedelai hitam dari petani, alat-alat produksi yang mendukung program P3KH, tenaga ahli dan sangat terampil, yaitu asisten lapang yang mendampingi petani dari awal tanam sampai pada panen. Dari peran, output, dan fasilitasi yang diberikan oleh swasta tersebut membantu masyarakat dalam meningkatkan kondisi sosial mereka, tapi belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat. Untuk itu, menjadi tanggungjawab pihak Unilever untuk mengevaluasi masalah-masalah kemitraan di tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi masalah itu, bisa dijadikan pembelajaran bagi asisten lapang. Unilever hendaknya menyediakan tenaga ahli yang lebih professional, yang lebih memahami kondisi tanah dan masyarakat Desa Pringkuku, dan masalah-masalah yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga bisa mengantisipasi masalah yang sama, serta memperbaiki pelaksanaan kemitraan di waktu yang akan datang agar hasilnya yang lebih baik lagi.

c. Peran masyarakat (Petani Desa Pringkuku)

Peran masyarakat, berdasarkan hasil penelitian dilapangan adalah berperan dalam partisipasi dalam formulasi yang bersifat bottom-up, implementasi dengan melaksanakan program tersebut sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi usaha sendiri dan lembaga, pemberi input berupa saran dan kritik.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Sulistiyani (2004:97), “Peran masyarakat secara umum diberikan dalam bentuk partisipasi. dalam rangka memberdayakan masyarakat agar berkemampuan untuk memberikan ide, kritik, dan sebagainya perlu dilakukan proses edukasi masyarakat.” Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 25
Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan. Policy action, dana swadaya. Menjadi obyek, partisipan, pelaku utama/subyek. Menghidupkan fungsi sosial kontrol	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih.

Sumber: Sulistiyani (2004: 97)

Peran masyarakat adalah berpartisipasi dalam formulasi yang bersifat bottom-up. Dari informasi masyarakat akan direspon oleh pemerintah. Dalam implementasi, masyarakat berperan sebagai pelaksana semua kebijakan dan program yang ada, dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilaksanakan masyarakat terhadap usaha secara pribadi maupun kelembagaan. Monitoring terhadap usaha secara pribadi adalah dengan

melihat bagaimana tanaman mereka, kira-kira panennya berhasil atau tidak. Kemudian dievaluasi jika tidak berhasil langkah apa yang akan dilakukan pada musim tanam berikutnya agar hasil produksinya lebih bagus. Kemudian terkait dengan monitoring secara kelembagaan, karena kegiatan kemitraan dilaksanakan lembaga petani, maka masyarakat berhak mendapat informasi dari Gapoktan tentang seluruh pelaksanaan program. Kemudian masyarakat berhak untuk mengevaluasi kinerja pengurus Gapoktan, untuk menjadikan Gapoktan lebih baik dan lebih berkembang.

Adapun output yang diberikan masyarakat adalah berupa saran, kritik, rekomendasi, keberatan, menjadi obyek, dan subyek, pemberdayaan serta menghidupkan fungsi sosial kontrol. Saran, kritik, dan rekomendasi banyak diberikan masyarakat saat ada pertemuan rutin tiap bulan atau ketika ada pertemuan khusus misal ketika ada suatu sosialisasi.

Fasilitasi yang diberikan oleh masyarakat berupa tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih, yaitu mereka yang telah disekolahkan, dan diberikan pelatihan-pelatihan. Masyarakat juga memberikan fasilitas berupa dana swadaya. Dana tersebut bisa membantu kelancaran pelaksanaan program. Contohnya ketika ada kekurangan dana seperti pada tahun 2009 dana swadaya sebagai dana cadangan bisa membantu kelancaran program kemitraan. Dan yang lebih penting lagi adalah fasilitasi berupa partisipasi dari masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan program tersebut. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat cukup besar untuk berjalannya suatu program.

Oleh karena itu diharapkan kesungguhan dari masyarakat untuk ikut terlibat dalam program pemberdayaan yang ada. Sehingga masyarakat dapat lebih memperhatikan hidupnya, dan memiliki pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru yang bermanfaat untuk meningkatkan kondisi sosial yaitu SDMnya dan ekonomi yang berupa peningkatan pendapatan. Pemberdayaan masyarakat akan lebih baik hasilnya jika dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, sesuai perannya masing-masing untuk saling melengkapi kekurangan dan pemberdayaan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sampai masyarakat terbiasa dan memanfaatkan bimbingan yang diperoleh sehingga masyarakat benar-benar berdaya.

2. Proses kemitraan *stakeholder* dalam memberdayakan masyarakat di Desa Pringkuku:

Program kemitraan usaha merupakan program andalan yang dipromosikan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Penguatan jaringan kemitraan usaha merupakan upaya menjalin kerjasama antar pelaku usaha dan para pendukungnya secara setara dan sinergis guna mencapai tujuan yang tidak hanya saling menguntungkan salah satu pelaku kemitraan, tetapi juga bermanfaat bagi semua.

Untuk mewujudkan kemitraan yang menguntungkan perlu dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat Desa Pringkuku yang berprofesi sebagai petani. Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua

potensi yang ada. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial.

a. Persiapan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan serta Gapoktan dalam kemitraan dengan Unilever:

Fenomena kemiskinan yang terjadi khususnya di pedesaan membutuhkan intervensi pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan tersebut adalah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, baik segi sosial maupun ekonomi masyarakat. Pendekatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Pringkuku dalam Program Gapoktan PUAP yang kemudian didukung dengan adanya kemitraan dengan Unilever dalam program P3KH, Gapoksi, maupun saraswati, mengandung prinsip yang dikemukakan oleh Prijoko dan Pranaka dalam Sulistiyani (2004:78) dimana pemberdayaan mengandung dua makna pokok, yakni: pertama, *to give power or authority* (artinya memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat, yang belum atau kurang berdaya. Kedua, *to give ability or enable* (artinya memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk

melakukan sesuatu). Dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat Desa Pringkuku untuk melaksanakan kemitraan dengan Unilever, yang sebelumnya dicontohkan dulu oleh dinas. Tujuan dari pemberian kewenangan ini adalah untuk memberikan kemampuan dan peluang agar masyarakat bisa mandiri.

Persiapan program pada dasarnya merupakan tahapan pertama yang dilakukan sebagai langkah pertama pengenalan kepada masyarakat. Kegiatan persiapan sebuah program harus dilakukan dengan cara yang tepat sehingga kegiatan program pemberdayaan ini dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Pendekatan dan upaya-upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dapat memberikan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Hal ini memerlukan komunikasi dan penyebaran informasi yang efektif untuk menyentuh masyarakat.

Adapun persiapan yang dilakukan dalam kemitraan ini yang pertama adalah tahap sosialisasi. Dimana Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan memberikan informasi yang terkait dengan kemitraan tersebut kepada masyarakat petani-petani yang tergabung dalam Gapoktan. Tujuan sosialisasi adalah agar masyarakat memahami program yang akan dilaksanakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program kemitraan tersebut. Terlaksananya kemitraan di Desa Pringkuku didukung oleh proses sosialisasi yang cukup

efektif dan keberhasilan dari sosialisasi dilihat dari banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mengikuti program kemitraan. Dengan sosialisasi yang efektif, akan berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan program berikutnya.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di kantor Gapoktan Rejo Mulyo Pringkuku yang dihadiri oleh wakil-wakil Poktan dari 14 kelompok tani. Penyuluh pertanian dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan memberikan sosialisasi seputar tujuan program kemitraan, tata cara pelaksanaannya, dan segala resikonya. Kemudian dari hasil sosialisasi itu wakil-wakil dari poktan menyampaikan hasil sosialisasi itu dikelompok masing-masing. Dengan sosialisasi ini masyarakat tertarik dan juga telah memahami bagaimana pelaksanaan serta resiko dari kemitraan.

Tahap sosialisasi merupakan bagian dari proses penyadaran masyarakat untuk memberdayakan kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartasasmita (2000:159) juga menyatakan bahwa salah satu strategi awal pemberdayaan adalah dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), yang mana titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Sentuhan

penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan sebuah program pemberdayaan, masyarakat merupakan elemen penting dan suyek pembangunan, dengan tujuan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Tahap persiapan selanjutnya yaitu penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara membentuk legitimasi Gapoktan, agar menjadi lembaga yang terdaftar secara hukum. Selanjutnya membentuk tim dengan melibatkan anggota Gapoktan, yaitu dengan membentuk pengurus Gapoktan. Yang tadinya pengurus Gapoktan hanya terdiri dari pengurus sederhana maka perlu dibentuk seksi-seksi lain yang dibutuhkan berkaitan dengan adanya kemitraan dengan Unilever. Yang terakhir adalah serta memperbaiki manajemen kelembagaan. Gapoktan memperbaiki manajemen kelembagaan dengan cara menghidupkan fungsi lembaga menjadi lebih aktif. Masing-masing pengurus yang telah dibentuk di atas mulain menjalankan fungsi masing-masing secara efektif. Dengan mendata dan mendokumentasikan anggota Gapoktan, CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) Realisasi Tanam, dan lain-lain. Biasanya pengurus Gapoktan datang langsung ke masyarakat untuk mendata berapa luas lahan yang akan ditanami kedelai dan berapa benih yang dibutuhkan.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Huraerah (2008: 90) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat salah satunya diperlukan langkah pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal. Pembentukan legitimasi Gapoktan, pembentukan pengurus Gapoktan, dan manajemen kelembagaan yang telah dilakukan Gapoktan Rejo Mulyo diatas merupakan langkah pembentukan dan penguatan institusi di tingkat lokal. Dimana masyarakat terlibat langsung dan menjadi pelaku dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan. Dengan adanya sosialisasi dan penguatan kelembagaan, masyarakat Desa Pringkuku telah berpartisipasi dalam persiapan kemitraan. Untuk itu, dalam pelaksanaan program kemitraan ini dituntut kesiapan masyarakat Desa Pringkuku untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kemitraan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama dengan segala resikonya.

b. Pelaksanaan Kemitraan Gapoktan Rejo Mulyo dengan Unilever dalam Program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam) di Desa Pringkuku.

Kemitraan pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1. Bahwa “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil

dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Dari pengertian tersebut diatas, maka Sulistiyani (2004:129) menjelaskan bahwa kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

5. Ada dua pihak atau lebih.
6. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
7. Ada kesepakatan.
8. Saling membutuhkan.

Kemitraan yang terbentuk di Desa Pringkuku, telah memenuhi persyaratan diatas, dimana dalam perjanjian kerjasama kemitraan ada empat pihak yang menandatangani perjanjian. Kemudian juga mempunyai kesamaan visi, yaitu terwujudnya petani yang sejahtera dengan cara memberdayakan melalui program kemitraan tersebut. Lalu ada kesepakatan antara pihak yang bermitra. Kesepakatan tersebut tertulis dalam Perjanjian Kerjasama, baik kesepakatan akan kewajiban masing-masing pihak, kesepakatan harga, volume, dan lain-lain. Yang terakhir adalah saling membutuhkan. Tentu saja baik pihak Unilever maupun petani dan Gapoktan saling membutuhkan. Unilever membutuhkan petani untuk mendapatkan produk kedelai yang akan digunakan PT Unilever untuk membuat kecap Bango, dan juga membutuhkan Gapoktan (suatu lembaga yang telah memiliki legitimasi) untuk bisa bermitra dengan masyarakat. Begitu juga dengan petani membutuhkan Unilever untuk

membeli hasil kedelai hitam mereka, mendapatkan jaminan pasar dan kepastian harga serta mendapatkan berbagai ketrampilan, pengetahuan dan teknologi baru yang bermanfaat untuk mereka. Gapoktan sendiri menjadi dinamis karena adanya kemitraan dengan Unilever. Kemitraan antara Gapoktan dan Unilever telah memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan yang dilaksanakan Unilever dengan Gapoktan Rejomulyo adalah kemitraan dengan pola subkontrak. Penjelasan diatas sejalan dengan pendapat Hafisah (2000:72) bahwa: "Ciri khas dari bentuk kemitraan subkontrak adalah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga, dan waktu. Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan ketrampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha".

Unilever dan Gapoktan telah membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga, dan waktu. Volume, harga dan waktu tersebut tertulis dalam perjanjian kerjasama yang disertai dengan lampiran-lampiran standar produk yang akan dijual ke Unilever, petunjuk mengenai prinsip usaha dan sebagainya.

Hal tersebut juga sejalan dengan UU no 9 tahun 1995 Pasal 26 ayat 3 yang menyebutkan "Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan

teknologi”. Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan.

Dimana pihak Unilever tidak sebatas bermitra dalam pengadaan kedelai hitam namun juga disertai dengan pembinaan kepada petani dan lembaga petani. Dalam hal produksi dan pengolahan dibina dan dididik untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi melalui pola tanam yang lebih modern hingga mendapatkan hasil produksi yang berkualitas. Selain itu dikenalkan dengan bibit Malika, yaitu bibit kedelai unggul yang tetap bisa tumbuh pada tanah kering. Dan hasil produksi yang dihasilkan Malika lebih banyak dari pada kedelai-kedelai biasa.

Selain itu pihak Unilever juga menjamin hasil pemasaran dan juga memberikan kepastian harga kepada petani. Mengingat sulitnya pemasaran hasil pertanian di Desa Pringkuku, kemitraan tersebut bisa membantu petani dalam memasarkan hasil produksinya karena Desa Pringkuku jauh dari akses pasar. Dari kemitraan tersebut, petani memperoleh penghasilan tambahan walaupun hanya sedikit. Selain masalah pemasaran petani juga diberikan fasilitasi berupa pendidikanan pelatihan. Dari itu pengetahuan

petani bertambah dari yang tadinya menggunakan pola tanam tradisional, menggunakan bibit sembarang, kini mereka telah lebih modern. Itu semua merupakan cara untuk memberdayakan masyarakat agar pikiran mereka terbuka dan bisa membedakan bagaimana hasil yang didapatkan sebelum dan sesudah dilaksanakan program tersebut. Selain itu dengan kemitraan tersebut Gapoktan menjadi lembaga tani yang dinamis dan lebih berkembang dari pada sebelum bermitra.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Menurut Sulistiyani (2004:130-132), bahwa model kemitraan *Conjugation Partnership* atau Kemitraan Melalui Peleburan dan Pengembangan adalah kemitraan yang dilakukan oleh organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok, atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Gapoktan yang tadinya statis (tidak ada kegiatan apa-apa di dalamnya) karena bermitra dengan Unilever akhirnya menjadi dinamis, dan lebih berkembang. Setelah bermitra dengan Unilever di dalam Gapoktan terdapat kegiatan-kegiatan rutin, bisa menjadi usaha tani yang tiap tahunnya mendapatkan laba dan bisa membagikan SHUnya kepada petani.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan kemitraan Gapoktan dengan Unilever diawali dengan kesepakatan tentang isi surat perjanjian kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan oleh pihak yang bermitra. Yang kedua membuat perencanaan tanam berdasarkan

prediksi untuk dilaporkan dan dikonsultasikan ke Unilever. Yang ketiga mendata masyarakat untuk dijadikan data CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi). Keempat menyusun realisasi tanam dan sulam. Kelima melaporkan realisasi tanam ke Unilever dan meminta dana talangan untuk membeli kedelai hasil produksi petani. Kemudian proses gudang, terdiri dari sortasi, standarisasi mutu, dan packing. Yang terakhir adalah evaluasi, namun evaluasi yang dilaksanakan hanya berdasarkan hasil produksi dan komitmen saja.

Kemudian berdasarkan penelitian lapangan pemberdayaan terhadap ibu-ibu juga dilakukan diantaranya: 1. pelatihan daur ulang sampah atau yang biasa disebut dengan "trashion", 2. pemberian materi PHBS, 3. membuat media kecil sederhana seperti cergam, komik, dan kobar, 4. Pelatihan management keuangan, 5. Pelatihan pembuatan produk makanan, seperti kue-kue, 6. belajar teater, 7. Program saraswati (penjualan produk-produk unilever). Dari program tersebut ibu-ibu juga mengakui mendapatkan manfaat. Pengalaman mereka bertambah, mereka mempunyai usaha kelompok, dan bagi ibu-ibu yang mau menerapkan ketrampilan dan pelatihan yang diberikan penghasilan mereka juga menjadi bertambah. Dan jika ketrampilan yang mereka miliki dijalankan terus menerus mereka akan semakin berdaya.

Ketika kita melihat evaluasi yang dilakukan dalam kemitraan tersebut evaluasi hanya sebatas pada evaluasi produksi dan komitmen. Memang benar dari evaluasi produksi bisa berpengaruh terhadap

pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena dengan produksi yang tinggi maka pendapatan petani akan semakin meningkat. Namun evaluasi dari segi sosial belum ada. Padahal kegagalan petani dalam memproduksi kedelai juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, dan juga SDM yang terbatas.

Melihat nama program yang digagas Unilever yaitu program P3KH (Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kedelai Hitam) maka keberdayaan ekonomi, SDM, kapasitas dan kapabilitas petani juga harus diperhatikan. Kalau memang produksi kedelai belum bisa mencapai target, mungkin diperlukan bimbingan lagi kepada petani. Karena memberdayakan masyarakat membutuhkan proses yang lama dan berkelanjutan. Mengingat yang diberdayakan adalah petani yang SDMnya rendah. Bimbingan yang dilakukan antara lain dengan memberikan pendidikan lagi, kepada petani yang gagal memproduksi kedelai. Diharapkan pendamping datang langsung ke lapangan dan memberikan contoh bagaimana cara budidaya yang benar agar petani benar-benar paham. Jika hanya melakukan sosialisasi, ketika di lapangan petani ada yang tidak mematuhi anjuran, karena dianggap ribet dan tidak begitu paham. Tapi dengan pendamping terjun langsung ke lapangan petani akan benar-benar mengerti.

Untuk menekan biaya produk di petani agar hasil yang didapatkan lebih maksimal, sebaiknya pemerintah maupun pendamping Unilever mendukung program pemerintah yaitu dengan penggunaan pupuk organik.

Dimana pupuk tersebut lebih aman dan ramah untuk tanah dan lingkungan, dan juga bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau bahkan bisa dibuat sendiri oleh petani. Selain itu masyarakat juga diharapkan bisa berpikir lebih maju dan kreatif, dengan cara mematuhi segala anjuran yang diberikan oleh Unilever maupun pemerintah. Karena semua anjuran yang diberikan tersebut apabila dilaksanakan akan sangat bermanfaat untuk mereka.

Kemudian, karena program kemitraan ini adalah pemberdayaan petani, dan pemberdayaan masyarakat itu memerlukan proses yang lama dan berkelanjutan, maka dalam kemitraan ini Unilever hendaknya melaksanakan proses pemberdayaan secara berkelanjutan yang terdiri dari: Pertama proses penyadaran, yaitu masyarakat disadarkan akan kemampuan yang dimiliki. Disadarkan bahwa sebenarnya mereka mampu melakukan lebih dari apa yang mereka lakukan sekarang dan menyadarkan agar membuat rencana untuk masa depan mereka. Kedua proses pembiasaan, yaitu masyarakat diberi persepsi baru dengan diberi pembinaan dan pelatihan bagaimana cara meningkatkan kemampuan mereka. Ketiga proses pemanfaatan, yaitu setelah masyarakat sadar dan mengerti akan pemberdayaan, saatnya untuk memulai menggunakan ketrampilan dan kemampuan mereka. Keempat proses penggunaan atau pemahaman, yaitu menggunakan ketrampilan dan kemampuan mereka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

3. Dampak kemitraan stakeholder bagi pemberdayaan masyarakat Desa Pringkuku:

Suatu program baik itu dari pemerintah maupun swasta pasti mempunyai dampak terhadap masyarakat. Demikian pula program kemitraan yang dilaksanakan di desa Pringkuku berdampak terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Melihat kondisi desa Pringkuku dari data Profil Desa 2008, dimana penduduk miskinnya cukup banyak, yaitu 554 kk dari 987 kk maka pada tahun 2011 akan bisa dilihat bagaimana dampak yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan dalam kemitraan dengan Unilever. Hal ini sejalan dengan pendapat Sulistiyani (2004:28) bahwa: "Kemiskinan dibarengi oleh ketidakberdayaan. Orang miskin tidak memiliki daya atau kemampuan yang cukup. Biasanya tidak berdaya secara ekonomi, pendidikan, politik, sosial, maupun kekuasaan."

Ketidakberdayaan ekonomi disebabkan oleh terbatasnya akses produksi, alat produksi, kegiatan pelayanan jasa dan lain-lain. Walaupun masyarakat miskin terlibat dalam kegiatan produksi, pelayanan, jasa dan aktivitas ekonomi lainnya, biasanya hanya dalam komoditas yang rendah nilainya, dengan perputaran waktu yang lambat, sehingga sangat sedikit keuntungan yang diperoleh. Penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk dikonsumsi, tidak dapat melakukan *saving* atau membangun permodalan dari komoditas yang diusahakannya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dampak ekonomi dan sosial terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dampak Sosial

SDM petani menjadi lebih baik karena adanya sekolah petani (FIELD) yang diadakan oleh Unilever. Pemberdayaan terhadap ibu-ibu petani memberikan dampak positif terhadap pola pikir ibu-ibu. Dari sisi kelembagaan Gapoktan bisa menjadi lembaga yang dinamis. Petani menjadi lebih gaul, dan sering bertemu dengan orang-orang penting seperti Menteri Pertanian, dan lain-lain serta sering keluar kota karena acara yang diadakan oleh Unilever. Hal ini sejalan dengan pendapat Alshop dan Heinshon bahwa: "Pemberdayaan sosial lebih merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan menyadarkan posisi dan peran seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dalam komunitasnya". Sumaryadi (2005:10). Dari tersebut dapat disimpulkan secara sosial masyarakat Desa Pringkuku berhasil diberdayakan. Karena dari sekolah, pelatihan, dan ketrampilan yang diberikan kemampuan sumber daya manusia mereka meningkat. Mereka menjadi tahu akan teknologi, dan pola budidaya modern.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Sulistiyani (2004: 129) bahwa; "Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik." Dalam hal ini masyarakat petani di Desa Pringkuku, kapasitas dan kapabilitas mereka dalam bidang sosial terutama SDM mereka sudah menjadi lebih baik. Dari

pembinaan yang diberikan, para petani mendapatkan banyak pembelajaran, diantaranya bisa berhubungan dengan pihak lain seperti Unilever, mengenal tanaman baru seperti kedelai hitam malika, mereka telah menerapkan pembinaan yang telah diberikan, dengan tidak menterlantarkan dan membiarkan lahan mereka bero, menanami lahan mereka dengan memilih komoditi yang hasilnya lebih baik, SDM mereka dalam teknik tanam juga menjadi lebih baik, dan mereka lebih kreatif, serta pergaulan mereka menjadi lebih luas. Bagi perempuan mendapatkan pelatihan dan ketrampilan pembuatan makanan, pemanfaatan barang bekas dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Suharto (2005:64), mengenai indikator pemberdayaan yang terkait dengan sosial yaitu: “Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian”. Dengan bermitra dengan Unilever petani di Desa Pringkuku tingkat mobilitasnya lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka sering ke luar kota, dan bagi ibu-ibu mereka ke luar kota sendirian tanpa pasangannya ketika ada acara-acara untuk ibu-ibu sortasi yang diadakan oleh Unilever di luar kota.

Namun demikian Unilever hendaknya mengevaluasi sejauh mana keberhasilannya dalam memberikan pembinaan pelatihan, dan bimbingan kepada petani. Sehingga bagi petani yang kurang paham bisa dibina lebih mendalam lagi, dan pembinaan hendaknya diberikan secara terus-menerus

dan berkesinambungan. Sehingga SDM petani akan terus berkembang dan kondisinya semakin membaik.

2. Dampak Ekonomi

Adanya penambahan peredaran uang dalam masyarakat, yang tentunya berpengaruh terhadap penambahan pendapatan masyarakat walaupun dalam skala kecil. Adanya dana stimulan terhadap ibu-ibu, dan pelatihan ketrampilan menjadikan penghasilan mereka bertambah tapi hanya sedikit.

Alshop dan Heinshon berpendapat bahwa: “Pemberdayaan ekonomi adalah pendekatan yang diutamakan kepada masyarakat kelas bawah untuk mampu beraktifitas dalam bidang ekonomi dan memiliki penghasilan yang lebih baik, sehingga mampu menanggung dampak negatif dari pertumbuhan yang terjadi”. Sumaryadi (2005:10). Melihat kenyataan dilapangan bila dibandingkan dengan teori yang ada, maka program pemberdayaan melalui kemitraan ini belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat. Karena penghasilan yang mereka dapatkan dari penjualan kedelai sangat minim, bahkan untuk makan sehari-hari saja masih kurang, padahal indikator pemberdayaan menurut Suharto (2005:64) yang terkait dengan ekonomi adalah:

1. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampo). Individu dianggap

mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya ; terlebih jika ia dapat membeli barang- barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

2. Kemampuan untuk membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang- barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas. Poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya ; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Hasil penjualan dari kedelai hitam belum mampu memberdayakan ekonomi mereka. Untuk membeli barang primer dan komoditas kecil saja masih dirasa kurang, apalagi untuk membeli barang tersier dan komoditas besar.

Sebagai bukti hasil yang didapatkan Bapak Sugiyatno ketika panen pada 2010. Keuntungan yang didapat dari kedelai hitam sebesar Rp 277.400,-. Penanaman kedelai berlangsung selama 3 bulan, jika dibagi 3 maka pendapatan tambahan perbulan dari kedelai hitam hanya Rp 92.000,-

Hasil penjualan tersebut tidak akan merubah kondisi mereka. Mereka yang miskin akan tetap miskin dengan tambahan penghasilan itu. Didukung oleh perbandingan data profil desa mengenai tingkat kesejahteraan di Desa Pringkuku pada tahun 2008 (sebelum kemitraan dilaksanakan) dan pada tahun 2011. Pada tahun 2008 rumah tangga miskin berjumlah 56,12 persen atau 554 kk dari 987 kk, dan pada tahun 2011 rumah tangga miskin tetap berjumlah 554.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di desa Pringkuku sesuai dengan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Salah satu indikator yang dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 1994, yaitu mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan mempergunakan indikator ekonomi, kesehatan, gizi, dan sosial. pemetakan kesejahteraan dalam tingkatan sebagai berikut:

6. Keluarga Pra sejahtera
7. Keluarga Sejahtera I
8. Keluarga Sejahtera II
9. Keluarga Sejahtera III
10. Keluarga Sejahtera III Plus

Sulistiyani (2004:35) juga menjelaskan bahwa keluarga yang masuk dalam kategori miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Perbandingan masyarakat miskin dan dan kaya di desa Pringkuku secara signifikan lebih besar masyarakat miskin. hal ini disebabkan karena

pengangguran masih cukup tinggi dan tingkat pendapatan seseorang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Huraerah (2008:168) bahwa ukuran atau indikator utama kemiskinan saat ini adalah dilihat dari tingkat pendapatan seseorang, yaitu dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, papan, pangan kesehatan, dan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa selama ada kemitraan tidak ada perubahan terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat yang miskin tetap miskin dengan pemberdayaan melalui kemitraan tersebut. Agar pendapatan masyarakat bisa lebih baik lagi sebaiknya masyarakat mematuhi apa yang telah diajarkan oleh asisten lapang mengenai cara menanam yang benar. Untuk menekan biaya produksi, dan juga untuk menjaga pencemaran tanah dan lingkungan salah satu caranya adalah hendaknya Unilever mengarahkan petani agar menerapkan pupuk, dan obat hama organik. Selain itu Unilever hendaknya menyediakan asisten lapang yang lebih professional, yang lebih memahami kondisi tanah dan masyarakat Desa Pringkuku, dan masalah-masalah yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga asisten lapang Unilever bisa membimbing petani mengantisipasi kegagalan dengan cara mencari solusi dari masalah-masalah tahun sebelumnya. Sehingga jika terjadi masalah yang serupa seperti kekeringan, hujan yang terlalu deras, maupun hama petani sudah bisa mengatasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Tanaman Pangan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pringkuku, adalah sebagai penyusun formulasi, penetapan *Policy*, Pembuat Kebijakan, Penganggaran, penetapan Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan, penyelesaian sengketa, fasilitator, yaitu dengan memberikan bantuan dana, alat, sistem manajemen, informasi, teknologi serta edukasi terhadap masyarakat. Pemerintah juga berperan sebagai monitoring, evaluasi, dan mediasi. Peran swasta Kontribusi pada formulasi implementasi, dana, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil, monitoring, evaluasi. Sedangkan peran masyarakat adalah partisipasi dalam formulasi, implementasi dengan melaksanakan program tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi usaha sendiri dan lembaga, pemberi input berupa saran dan kritik. Masyarakat juga berperan dalam fasilitasi berupa tenaga terdidik, terlatih, setengah terdidik, dan terlatih yang sebelumnya telah disekolahkan, diberi pelatihan dan ketrampilan.
2. Proses kemitraan stakeholder dalam memberdayakan masyarakat Desa Pringkuku terdiri dari dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kemitraan. Tahap persiapan yang dilakukan dalam kemitraan

tersebut yang pertama adalah tahap sosialisasi. Tahap yang kedua adalah penguatan kelembagaan, yang dilakukan dengan cara membentuk legitimasi Gapoktan, membentuk tim (pengurus Gapoktan), dan memperbaiki manajemen kelembagaan. Proses kemitraan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kemitraan. Pelaksanaan kemitraan diawali dengan penandatanganan kesepakatan isi surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang bermitra. Yang kedua membuat perencanaan tanam berdasarkan prediksi. Yang ketiga membuat data CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi). Keempat menyusun realisasi tanam dan sulam. Kelima melaporkan realisasi tanam ke Unilever dan meminta dana talangan untuk membeli kedelai hasil produksi petani. Keenam proses gudang, dan terakhir adalah evaluasi.

3. Dampak kemitraan kemitraan Unilever dengan Gapoktan terdiri dari dampak sosial dan ekonomi. Dari segi sosial petani bisa berdaya karena SDM petani menjadi lebih baik, pemberdayaan terhadap ibu-ibu petani memberikan dampak positif terhadap pola pikir ibu-ibu. Dari sisi kelembagaan Gapoktan bisa menjadi lembaga yang dinamis. Petani menjadi lebih gaul, dan sering bertemu dengan orang-orang penting dan terkenal. Dari segi ekonomi pendapatan petani bertambah, namun belum bisa dikatakan berdaya karena hasil yang diperoleh tersebut hanya dalam skala kecil dan untuk membeli komoditi kecil (kebutuhan sehari-hari) saja belum mencukupi.

B. Saran

1. Peran pemerintah hendaknya ditingkatkan lagi terutama dalam usaha menyadarkan masyarakat agar mau melaksanakan program sesuai aturan agar hasilnya maksimal. Swasta hendaknya meningkatkan perannya dalam evaluasi jangan hanya dievaluasi dari besar produksi yang akan disetorkan ke Unilever, tapi perhatikan juga pendapatan bersih petani, dan kemampuan SDM mereka, karena program kemitraan yang ditawarkan petani ini adalah program pemberdayaan petani. Sebagai bentuk kepedulian Unilever kepada petani, akan lebih efektif bila evaluasi ditindak lanjuti dengan meninjau biaya produksi petani dibanding hasil yang di dapatkan dan juga ditinjau lagi bagaimana SDM petani setelah dibimbing dan dibina. Jika petani gagal produksi, akan tetapi masih ingin ikut bermitra dan komitmennya bagus, hendaknya diberi kesempatan dan dibimbing lagi apa masalahnya. Bagi masyarakat, dalam bermitra masyarakat hendaknya sungguh-sungguh dan mematuhi aturan dalam melaksanakan program pemberdayaan yang ada. Karena jika dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh hasilnya akan lebih baik. Sehingga masyarakat dapat lebih memperhatikan hidupnya, dan memiliki pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru yang bermanfaat untuk meningkatkan kondisi sosial yaitu SDMnya dan ekonomi yang berupa peningkatan pendapatan yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Pemberdayaan masyarakat akan lebih baik hasilnya jika dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, sesuai perannya masing-masing untuk saling melengkapi kekurangan dan pemberdayaan

tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan sampai masyarakat terbiasa dan memanfaatkan bimbingan yang diperoleh sehingga masyarakat benar-benar berdaya.

2. Dalam proses kemitraan antara Gapoktan dengan Unilever diharapkan kesepakatan bersama dalam hal penentuan volume, harga, dan peraturan lain yang telah tertulis dalam kesepakatan. Gapoktan dan petani jangan hanya setuju saja dengan isi surat perjanjian, akan tetapi jika ada kesepakatan yang tidak sesuai misal harga yang dianggap kurang atau volume terlalu banyak hendaknya dirundingkan lagi sehingga didapatkan hasil yang sama-sama menguntungkan. Kemudian karena program kemitraan ini adalah pemberdayaan petani, dan pemberdayaan masyarakat itu memerlukan proses yang lama dan berkelanjutan, maka dalam kemitraan ini Unilever hendaknya melaksanakan proses pemberdayaan secara berkelanjutan yang terdiri dari: Pertama proses **penyadaran**, yaitu masyarakat disadarkan akan kemampuan yang dimiliki. Disadarkan bahwa sebenarnya mereka mampu melakukan lebih dari apa yang mereka lakukan sekarang dan menyadarkan agar membuat rencana untuk masa depan mereka. Kedua proses **pembiasaan**, yaitu masyarakat diberi persepsi baru dengan diberi pembinaan dan pelatihan bagaimana cara meningkatkan kemampuan mereka. Ketiga proses **pemanfaatan**, yaitu setelah masyarakat sadar dan mengerti akan pemberdayaan, saatnya untuk memulai menggunakan ketrampilan dan kemampuan mereka. Keempat proses **penggunaan atau pemahaman**, yaitu

menggunakan ketrampilan dan kemampuan mereka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

3. Agar menghasilkan produksi yang lebih baik dan agar ekonomi mereka bisa berdaya petani hendaknya menerapkan dan mematuhi aturan serta apa yang telah diajarkan oleh asisten lapang mengenai cara menanam yang benar, dan menjaga komitmen agar pemasaran hasil panen kedelai tetap terjamin. Untuk menekan biaya produksi petani perlu menerapkan pupuk organik yang bisa dibuat sendiri dengan biaya yang terjangkau seperti yang telah diajarkan oleh PPL Dinas Tanaman Pangan. Selain itu Unilever hendaknya menyediakan asisten lapang yang lebih professional, yang lebih memahami kondisi tanah Desa Pringkuku, dan masalah-masalah yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga asisten lapang Unilever bisa membimbing petani mengantisipasi kegagalan dengan cara mencari solusi dari masalah-masalah tahun sebelumnya. Sehingga jika terjadi masalah yang serupa seperti kekeringan, hujan yang terlalu deras, maupun hama petani sudah bisa mengatasi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bakhit, Izzedin. 2001. *Menggempur Akar-Akar Kemiskinan*. Jakarta: Yakoma-PGI.
- Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang: Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD).
- Habib, Achmad. 2007. *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Tantangan Ilmu Kesejahteraan di Era Globalisasi)*. Malang: UMM Press.
- Hafsah, Mohammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Iffe, James. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Melbourne: Longman.
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Mendukung Pertumbuhan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Aderindo.
- Kartono, Rinekso. 2007. *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Konstruksi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pada Otoda)*. Malang: UMM Press.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Korten, D.C. dan Carner. "Kerangka Kerja Perencanaan untuk Pembangunan yang berpusat pada Rakyat", dalam Korten dan Sjahrir. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Lendriyono, Fauzik. 2007. *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Pelayanan Publik)*. Malang: UMM Press.
- Morse and Field 1995. Morse JM, Field PA. *Qualitative Methods For Healthh Profesionals*. Thousand Oaks, California: SAGE
- Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parson,et.al. 1994. *The Integrationof Social Work Practice*. Sidney: Allyn and Bacon
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah)*. Bandung: PT Mandar Maju.
- 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Siagian P. Sondang. 1984. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soetrisno. 2001. *Pemberdayaan dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2009. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2010. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Medika Sumarto.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

—————, 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Syamsiar, Sjamsuddin Indradi. 2006. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Adminisrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2006. *Good Governance*. Jakarta: UI-Press.

Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Utama, Adi Candra. 2006. *LSM vs LAZ Bermitra atau Berkompetisi? (Mencari Model Kemitraan, Meminimalisasi Potensi Filantropi, Menuju Keadilan Sosial)*. Depok: Piramedia.

Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Mannual*. London: Grower Publishing Company.

B. Jurnal

Allahdad , Fatemeh Allahdadi Fatemeh. 2011. Women's Empowerment for Rural Development. *American Journal Science Vol 7 (1): 40 42*

Briliantes, Alex Jr. B. 2000. Developing Indicators for Good Local Governance. "Paper presented at the East-West Center Association 2000 International Conference on Building an Asia Pacific Community: The EastWest Centrer. Honolulu, Hawaii: 88 89.

Fujikake, Yoko. 2008. Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerent. *Japanese Journal of Evaluation Studies, Vol 8 (2): 25 37.*

C. Peraturan Perundang- Undangan

Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan BLT

Peraturan Kementerian Pertanian Nomor: 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Berprestasi, Tahun anggaran 2009).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273, Tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Kelompok tani Dan Gabungan Kelompok Tani.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan.

D. Lain- lain

Asian Development Bank (ADB). 2000. *Introductory Notes on ADB Publications on Governance*. Diakses melalui <http://www.adb.org/Governance/goypub.asp>,

BPS. 2010. *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Diakses melalui: http://www.bps.go.id/brs_file/Penjelasan_Data_Kemiskinan.pdf

Kementerian Pertanian. 2010. *Petunjuk Teknis Pemeringkatan GAPOKTAN PUAP*.

Badan Pengembangan Penyuluhan Pertanian. 2008. *Laporan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Peta Distribusi Kemiskinan Jawa Timur



Lampiran 2

Foto Kegiatan Pelaksanaan Kemitraan Gapoktan Rejo Mulyo dan Unilever



Pengecekan Lahan Sebelum ditanami Kedela



Pengecekan Lahan Ketika Kedelai berumur 2-3 minggu



Pengecekan Tanaman Oleh PPL Dinas tanaman Pangan dan Peternakan, Assisten Lapangan Unilever, dan Pengurus Gapoktan ketika kedelai berumur 60 hari



Pengecekan Lahan saat Kedelai Berumur 85-90 hari (saat panen)



Pembelian Hasil Produksi Kedelai Petani dengan System Jemput Bola



Sortasi Kedelai oleh Ibu-ibu Gabungan kelompok Sortasi (Gapoksi)



Proses Packing Kedelai yang diawasi oleh PPL Dinas Tanaman Pangan dan
Peternakan serta Assisten Lapang Unilever



Parcel untuk Petani Setelah Panen



Pemberdayaan Ibu-ibu Sortasi Melalui Pelatihan Pembuatan Makanan



Pemberdayaan Ibu-ibu Sortasi Melalui Praktek Pembuatan Makanan



Pembinaan terhadap Bapak-bapak Petani oleh PPL Dinas Tanaman Pangan dan
Peternakan serta Assisten Lapang Unilever

(Sumber; Dokumentasi Gapoktan Rejo Mulyo Pringku 2010)



Sosialisai Pembuatan Pupuk Organik

(Sumber: Peneliti)

Lampiran 3

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN
KEDELAI HITAM DI PACITAN**

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kedelai Hitam ini (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal 18 Februari 2010, oleh dan antara:

1. **GAPOKTAN REJO MULYO**, suatu persekutuan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”).
2. **YAYASAN UNILEVER INDONESIA**, suatu yayasan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Graha Unilever Jln. Jend. Gatot Subroto Kav-15, Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”).
3. **PT UNILEVER INDONESIA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, Graha Unilever Jln. Jend. Gatot Subroto Kav-15, Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Ketiga**”).
4. **UNIT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN MANAGEMEN AGRO INDUSTRI**, suatu Pusat Pengembangan yang didirikan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain, bertempat di Jln. Socio Justicia Bulak Sumur Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Keempat**”).

Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Para Pihak**”, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

BAHWA

- A. Pihak Pertama adalah koordinator lapangan yang melakukan bimbingan dan pengawasan petani dan/atau kelompok petani Kedelai Hitam binaan Pihak Keempat (selanjutnya disebut sebagai “**Petani Kedelai Hitam**”) dalam penanaman Kedelai Hitam (selanjutnya disebut sebagai “**Produk**”) pada lahan dengan luas perkiraan awal 325 Ha yang berlokasi di Kecamatan Pringkuku (selanjutnya disebut sebagai “**Lahan**”) dengan benih yang diperoleh dari Pihak Ketiga dan selaku produsen Produk untuk kebutuhan Pihak Ketiga.
- B. Pihak Kedua adalah pembina dan penyedia dana pembinaan kepada Pihak Keempat.
- C. Pihak Ketiga adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam industri berbagai barang keperluan rumah tangga dan makanan yang membutuhkan Produk untuk kegiatan usahanya.
- D. Pihak Keempat adalah pembina Pihak Pertama dan pengawas lapangan Petani Kedelai Hitam dari awal masa penanaman sampai dengan masa panen dan pasca panen Produk di Lahan.
- E. Pihak Pertama bermaksud menjual Produk milik Petani Kedelai Hitam kepada Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga berkeinginan untuk membeli Produk milik Petani Kedelai Hitam.

MAKA KARENANYA, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian (termasuk lampiran-lampirannya yang menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini.

Pasal 1 Obyek Perjanjian

Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan Produk hasil penanaman Petani Kedelai Hitam pada Lahan sesuai spesifikasi sebagaimana terlampir di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, yang menjadi bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 2 Pengadaan Produk

- 2.1. Pihak Pertama akan melakukan koordinasi untuk menjamin Petani Kedelai Hitam menjual Produk kepada Pihak Ketiga, dan melakukan pemeriksaan spesifikasi Produk (termasuk jumlah Produk) di bawah pengawasan Pihak Keempat.
- 2.2. Pihak Ketiga akan membeli Produk milik Petani Kedelai Hitam yang telah dikemas di dalam kemasan karung plastik ukuran 50 (lima puluh) kilogram sesuai dengan spesifikasi yang diatur di dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- 2.3. Para Pihak sepakat bahwa perhitungan hasil produksi Produk adalah berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga di pabrik/lokasi yang akan ditentukan oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3 Harga Produk

- 3.1. Para Pihak sepakat bahwa harga jual Produk dari Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga adalah Rp [REDACTED] per kg franco gudang Pihak Pertama.
- 3.2. Harga tersebut diatas tidak termasuk biaya pengiriman ke pabrik Pihak Ketiga dan tidak termasuk PPN sebesar 10%. Pengaturan mengenai biaya dan tata cara pengiriman dari lokasi Pihak Pertama ke pabrik/lokasi Pihak Ketiga adalah merupakan tanggungan Pihak Ketiga.

Pasal 4 Pembayaran

- 4.1. Pihak Ketiga akan membayar di muka sejumlah 80% (delapan puluh perseratus) dari perkiraan hasil produksi Produk kepada Pihak Pertama dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum panen Produk yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli dan Oktober 2010. Selisih atas pembayaran hasil produksi akan dibayarkan dan/atau diselesaikan oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Produk diterima secara baik dan benar oleh Pihak Ketiga.
- 4.2. Pengajuan tagihan hanya dapat dan sah jika dilaksanakan di kantor Pihak Ketiga, dengan disertai bukti-bukti pendukung sebagai berikut :
 - a. Kwitansi asli bermaterai cukup.
 - b. Berita acara penerimaan barang.
 - c. Kelengkapan pajak yang sesuai dengan tagihan.

Pasal 5 Kewajiban Para Pihak

- 5.1. Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Pihak Pertama berkewajiban membina hasil kerja Petani Kedelai Hitam yang mencakup pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di periode awal tanam, pengawasan selama kegiatan tanam sampai dengan periode pasca panen serta pengemasan Produk.
 - b. Pihak Pertama berkewajiban untuk memastikan Petani Kedelai Hitam menjual seluruh hasil produksi Produk kepada Pihak Ketiga, serta menjamin kebersihan kemasan Produk tidak terkontaminasi oleh kotoran dan/atau bahan kimia apapun, dan tertutup rapat serta terjahit dengan sempurna untuk mencegah kerusakan atas spesifikasi Produk.
 - c. Pihak Pertama berkewajiban menjamin hasil Produk pada Lahan Petani Kedelai Hitam berjumlah minimal 185 Ton. Namun demikian bilamana terdapat selisih (kekurangan)

antara volume aktual panen Produk dengan uang muka pembelian Produk yang telah dibayarkan oleh Pihak Ketiga, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang muka pembelian Produk kepada Pihak Ketiga.

- 5.2. Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Pihak Kedua berkewajiban membantu biaya pembinaan yang dibutuhkan oleh Pihak Keempat sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pihak Keempat seperti yang diuraikan dalam Pasal 5.4 Perjanjian ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Keempat akan diatur secara terpisah dan dibuat antara Pihak Kedua dan Pihak Keempat.
 - b. Apabila diperlukan, Pihak Kedua akan membantu peralatan pengolahan pasca panen kepada Petani Kedelai Hitam berdasarkan usulan dari Pihak Keempat.
 - c. Apabila diperlukan, Pihak Kedua akan membantu memfasilitasi Pihak Pertama untuk memperoleh bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama.
- 5.3. Kewajiban Pihak Ketiga :
- a. Pihak Ketiga berkewajiban membeli hasil Produk milik Petani Kedelai Hitam dengan harga Produk sesuai dengan ketentuan Pasal 3.1. Perjanjian ini.
 - b. Pihak Ketiga bertanggung jawab terhadap pengiriman Produk yang telah dinyatakan baik oleh Pihak Pertama ke lokasi Pihak Ketiga.
 - c. Apabila hasil panen dari Lahan melebihi 185.000 kg, maka Pihak Ketiga wajib membeli kelebihanannya dengan harga Rp ██████/kg belum termasuk ongkos kirim ke pabrik/lokasi Pihak Ketiga di Subang, atau tempat-tempat lainnya yang ditentukan oleh Pihak Ketiga.
- 5.4. Kewajiban Pihak Keempat :
- a. Pihak Keempat berkewajiban membantu Pihak Pertama (termasuk membina petugas lapangan) dalam membina dan mengawasi Petani Kedelai Hitam dalam proses kegiatan percobaan penanaman Produk yang mencakup awal tanam, pengawasan selama kegiatan tanam sampai dengan pasca panen.
 - b. Pihak Keempat berkewajiban merekrut petugas lapangan yang bertugas sebagai pembina Petani Kedelai Hitam, penanggung jawab produksi, administrasi dan koordinator lapangan.
 - c. Pihak Keempat berkewajiban memberikan laporan tertulis hasil evaluasi percobaan penanaman kedelai hitam kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dan usulan atau saran untuk perbaikan.

Pasal 6

Masa Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian

- 6.1. Perjanjian ini berlaku untuk sejak tanggal 18 Februari 2010 dan akan berakhir sampai dengan selesainya perkiraan periode masa panen sesuai ketentuan Pasal 4.1. Perjanjian ini atau dengan selesainya pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- 6.2. Para Pihak yang mengadakan Perjanjian ini mengesampingkan, sejauh diperlukan untuk memberlakukan ketentuan tentang keputusan Perjanjian yang dituangkan di atas, berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 6.3. Pengakhiran Perjanjian ini bagaimanapun tidak melepaskan Para Pihak dari segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini sebelum pengakhirannya.
- 6.4. Masing-masing pihak dengan ini menyetujui bahwa pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apapun tidak memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengadakan tuntutan pemberian ganti rugi berupa apapun kepada pihak lainnya, kecuali jika dinyatakan secara lain di dalam Perjanjian ini.

Pasal 7 **Kadaan Memaksa**

- 7.1. Jika terjadi kegagalan atau penundaan pelaksanaan oleh salah satu pihak atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan pihak itu, Para Pihak akan bekerjasama dalam usaha untuk mencari cara-cara lain untuk menghindari kegagalan atau penundaan sehingga akan dapat memperkecil kerugian dan mencapai sejauh mungkin tujuan yang dimaksud. Kadaan-kadaan memaksa tersebut terbatas pada bencana alam, kerusuhan massa, perang, gangguan keamanan yang melumpuhkan aktivitas perekonomian lainnya.
- 7.2. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi yang berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- 7.3. Apabila keadaan memaksa berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, maka Para Pihak dapat bersepakat untuk mengakhiri atau meneruskan Perjanjian ini, dan dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian maka masing-masing Pihak tetap harus memenuhi kewajiban-kewajibannya yang belum dilaksanakan sebelum terjadinya keadaan memaksa tersebut.

Pasal 8 **Pilihan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa**

- 8.1. Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 8.2. Setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara final dan mengikat melalui forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BANI") sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur peraturan arbitrase dari BANI.

Pasal 9 **Ketentuan Lain-Lain**

- 9.1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama antara Para Pihak dan akan dituangkan ke dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- 9.2. Pihak Pertama dengan ini menyatakan telah memperoleh, mempunyai dan akan senantiasa memenuhi dengan sah semua persetujuan, lisensi dan ijin-ijin Pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya yang dipersyaratkan bagi Pihak Pertama untuk melakukan semua fungsi-fungsinya dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.
- 9.3. Pihak Pertama menyatakan telah menerima dan membaca Petunjuk Mengenai Prinsip Usaha (*Code of Business Principles*) dan Petunjuk Rekanan Usaha (*Business Partner Code*) dan akan senantiasa mematuhi setiap kebijakan dan petunjuk lainnya (termasuk perubahan-perubahannya) yang akan diberitahukan atau ditetapkan oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu, termasuk dan tidak terbatas ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (terlampir-Lampiran 3.).
- 9.4. Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini berikut penambahan dan/atau perubahan-perubahannya harus diperlakukan secara rahasia (*confidential*) oleh masing-masing pihak, termasuk karyawan masing-masing pihak, oleh karena itu tidak ada satu pun data atau informasi lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada pihak ketiga manapun tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- 9.5. Apabila sebagian dari Perjanjian ini akan dinyatakan tidak berlaku karena sebab apapun, bagian lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan seolah-olah Perjanjian ini sudah berlaku tanpa bagian yang mungkin telah dinyatakan tidak berlaku itu.

- 9.6. Tak satu pihakpun dapat memindahkan/menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya.
- 9.7. Perjanjian ini mengikat Para Pihak atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing Para Pihak.
- 9.8. Perjanjian ini memuat, dan karenanya menggantikan semua pengertian dan kesepakatan yang telah dicapai oleh Para Pihak sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, baik tertulis maupun lisan, mengenai hal yang sama.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal sebagaimana tersebut di bagian awal Perjanjian ini.

**Pihak Pertama,
GAPOKTAN REJO MULYO**



(Mudjahid)
Ketua

**Pihak Kedua,
Yayasan Unilever Indonesia
Pengurus,**

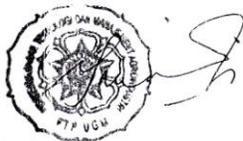
(Sinta Kaniawati)
Ketua

**Pihak Ketiga,
PT Unilever Indonesia Tbk**



(Joseph Bataona)
Direktur

**Pihak Keempat,
Unit Pengembangan Teknologi dan
Managemen Agro Industri**



(Prof. Dr. Ir. MARY ASTUTI, MS)
Kepala Pusat Pengembangan Teknologi
dan Manajemen Agroindustri

(Franky Jamin)
Bendahara

(Okty Damayanti)
Direktur

Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Ronggo Warsito .7 Telp. (0357) 881066

PACITAN

SURAT KETERANGAN

Untuk Melakukan Penelitian

Nomor : 072 / 1892 / 408.45 / 2011

Dasar :

1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan ;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 56 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan ;
7. Surat : **FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI “ UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG ”**

Nomor : 12497 /UN 10.3/PG /2011

Tanggal : 19 Desember 2011

Perihal : Ijin Melakukan Penelitian

Dengan dasar tersebut diatas dengan ini kami **Tidak Keberatan** dan memberikan Surat Keterangan untuk melakukan Ijin Melakukan Penelitian di Kabupaten Pacitan kepada :

- a. Nama : Ika Sulistyawati
- b. NIM / NIP : 0810310068
- c. Alamat : RT. 002 RW. 002 Pringkuku Ds/Kel..Pringkuku Kab. Pacitan
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tema/Keg : “ Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Upaya Memberdayakan Masyarakat dalam Perspektif *Partnership* (Studi Pelaksanaan *Partnership* di Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku Kabupaten. Pacitan)
- g. Lokasi : Desa Pringkuku, Kecamatan Pringkuku Kabupaten. Pacitan
- h. Tanggal : 21 Desember s/d 21 Maret 2012
- i. Pengikut : -

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar hal-hal tersebut diatas.
3. Setelah melakukan Survey/Penelitian/Praktek Kerja Lapangan, sebelum meninggalkan Kabupaten Pacitan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Camat setempat dan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
4. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan kegiatan Survey/Penelitian/Praktek Kerja Lapangan, diwajibkan memberikan laporan tentang Hasil Survey/Penelitian/Praktek Kerja Lapangan dan hasil lainnya kepada :
 - a. Bupati Pacitan
 - b. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab Pacitan .
 - c. Kepala Bakesbang Pol dan Linmas Kab Pacitan .
 - d. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Instansi terkait.
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa Pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Pacitan, 21 Desember 2011

**An. KEPALA BADAN KESBANG POL
DAN LINMAS KABUPATEN PACITAN**

Sekretaris

**Tembusan :**

- Yth. 1. Bupati Pacitan
 2. Kodim 0801 Pacitan
 3. Kapolres Pacitan
 4. Kepala Bappeda dan PM Kab Pacitan
 5. Kepala Balitbang dan Statistik Kab Pacitan
 6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab Pacitan
 7. Camat Pringkuku
 8. Kepala Desa Pringkuku
-

Lampiran 5

Pedoman Wawancara

Pemerintah (PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan):

1. Apakah peran Dinas Tanaman Pangan dalam upaya memberdayakan masyarakat (petani)?
2. Bagaimanakah latar belakang dilakukannya kemitraan Gapoktan Rejo Mulyo Pringkuku dengan Unilever?
3. Apakah tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan mendukung tawaran Unilever untuk bermitra?
4. Bagaimanakah peran PPL Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan dalam kemitraan program P3KH?
5. Apakah sajakah Fasilitas yang diberikan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan dalam upaya memberdayakan masyarakat petani Desa Pringkuku?
6. Bagaimanakah peran swasta (Unilever) dalam kemitraan program P3KH?
7. Bagaimanakah peran Masyarakat dalam kemitraan program P3KH?
8. Bagaimanakah pelaksanaan kemitraan program P3KH?
9. Bagaimanakah dampak kemitraan P3KH terhadap masyarakat (petani) Desa Pringkuku?

Pemerintah (Kepala Desa Pringkuku):

1. Apakah tujuan Kepala Desa Pringkuku mendukung tawaran Unilever untuk bermitra ?
2. Bagaimanakah peran kepala Desa dalam kemitraan program P3KH?
3. Bagaimanakah peran Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan dalam kemitraan program P3KH?
4. Bagaimanakah peran Unilever dalam kemitraan program P3KH?

5. Bagaimanakah peran masyarakat dalam kemitraan program P3KH?

Swasta (Unilever):

1. Apakah latar belakang Unilever tertarik mengadakan kemitraan di Kabupaten Pacitan?
2. Apakah tujuan Unilever melakukan kemitraan program P3KH?
3. Apakah pola kemitraan yang dilakukan Unilever dengan Gapoktan Rejo Mulyo?
4. Berapa lama kemitraan tersebut dilaksanakan?
5. Bagaimana peran Unilever dalam kemitraan program P3KH?
6. Apakah tugas asisten lapang Unilever dalam program P3KH?
7. Apa sajakah fasilitas yang diberikan Unilever kepada Gapoktan dan Masyarakat Desa Pringkuku?

Masyarakat (Pengurus Gapoktan dan Petani Desa Pringkuku):

1. Apakah menyebabkan masyarakat tertarik mengikuti program P3KH?
2. Bagaimakah peran masyarakat dalam program P3KH?
3. Fasilitas apa sajakah yang diberikan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan kepada masyarakat?
4. Apa sajakah fasilitas yang diberikan Unilever kepada masyarakat?
5. Apakah sebelum dilaksanakan program P3KH ada sosialisasi?
6. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan masyarakat dalam program P3KH?
7. Apakah manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kemitraan program P3KH?
8. Apakah pendapatan masyarakat bertambah setelah mengikuti program P3KH?
Pendapatan yang diperoleh tersebut digunakan untuk apa?
9. Apakah kerugian dalam mengikuti program P3KH?

CURRICULUM VITAE

Nama : Ika Sulistyawati
Nomor Induk Mahasiswa : 0810310068
Tempat dan Tanggal Lahir : Pacitan, 20 April 1989
Alamat : Rt 02, Rw 02, Pringkuku, Pacitan
Nomor telp : 082143275959
Pendidikan :
1. TK Marga Utama Tamat Tahun 1996
2. SDN Pringkuku I Tamat Tahun 2002
3. SMPN I Pringkuku Tamat Tahun 2005
4. SMAN I Pacitan Tamat Tahun 2008
5. Universitas Brawijaya Tamat Tahun 2012

